# DEMOKRASI SEBAGAI SIASAT

## Menafsirkan Tapak Politik Demokrasi Sultan Hamengku Buwono IX

**Bastian Widyatama**

Kata Pengantar:
Bayu Dardias Kurniadi



**Demokrasi sebagai Siasat**
**Menafsirkan Tapak Politik Demokrasi**
**Sultan Hamengku Buwono IX**



**Penulis:** Bastian Widyatama
**Editor:** Dias Prasongko
**Pengindeks:** Dias Prasongko
**Pemeriksa Aksara:** Umi Nurun Ni'mah
**Desain Cover:** Damar Nugrahono Sosodoro
**Tata Letak Isi:** M. Baihaqi Latif
**Penyelaras Akhir:** Mahesti Hasanah
Cetakan I, Mei 2017

## Diterbitkan oleh Penerbit PolGov

*Penerbit PolGov* khusus menerbitkan buku-buku politik dan pemerintahan, berada di bawah payung *Research Centre for Politics and Government (PolGov)*.

*Research Centre for Politics and Government (PolGov)* adalah lembaga riset dan publikasi dari Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM. Saat ini *PolGov* berfokus ke dalam empat tema kunci sesuai dengan kurikulum DPP, yaitu: 1) politik lokal dan otonomi daerah, 2) partai politik, pemilu, dan parlemen, 3) HAM dan demokrasi, 4) reformasi tata kelola pemerintahan dan pengembangan sistem integritas.

Lt. 4 Gedung Fisipol UGM
Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
http://jpp.fisipol.ugm.ac.id
Telp./Fax: (0274) 552212
Surel: polgov.ugm@gmail.com

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Widyatama, Bastian
Demokrasi sebagai Siasat
Menafsirkan Tapak Politik Demokrasi Sultan Hamengku Buwono IX
Penulis: Bastian Widyatama; Editor: Dias Prasongko
Cet.1 — Yogyakarta: Penerbit PolGov, Mei 2017
xxxii + 204 hlm. 14,5 x 21cm
ISBN: 978-602-60933-4-9
1. Demokrasi/Politik/Sultan Hamengku Buwono IX I. Judul

# Sultan Hamengku Buwono IX: Politisi Empat Zaman

**Bayu Dardias Kurniadi**

(Pengajar pada Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL, UGM)

Buku yang ada di hadapan anda ini adalah skripsi mahasiswa yang diterbitkan dalam format buku, setelah mengalami berbagai penyesuaian. Terdapat beberapa buku yang mengupas biografi Sultan Hamengku Buwono (HB) IX yang bertahta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1940-1988. Dalam hal itu, buku ini menjadi pelengkap buku-buku yang sudah ada sebelumnya dan fokus pada aspek siasat politik. Pengantar singkat ini akan membahas tentang bagaimana seorang HB IX mampu bertahan dan menjadi aktor penentu di empat kondisi politik yang tidak hanya berbeda, tetapi juga berseberangan satu dengan lainnya, yaitu : kolonial, revolusi, Soekarno dan Soeharto. Saya berpendapat bahwa kepiawaian politik Sultan HB IX

dilatari oleh kemampuan adaptif dan reaktifnya terhadap iklim politik yang berubah. Kemampuan adaptif ini membuat tradisionalisme mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan dan menjadikan Kasultanan Yogyakarta (dan Kadipaten Pakualaman) menjadi institusi tradisional yang diakui negara pasca diundangkannya Undang-Undang (UU) Keistimewaan Yogyakarta No. 13 Tahun 2012. Komparasi dengan dua Praja di Surakarta penting untuk melihat bagaimana perbedaan kemampuan adaptif berdampak pada survivilitas institusi tradisional.

Virginia Hooker (2015) dalam pengantar buku *A Prince in a Republic* karya John Monfries (2015), memilih kutipan bahwa apabila dicari 20 tokoh politik paling berpengaruh tahun 1940 dan 1975, niscaya Sultan HB IX adalah satu-satunya orang yang akan masuk dalam daftar tersebut (hal. ix). Masa kolonial Belanda merupakan masa persiapan bagi Dorodjatun (nama kecil HB IX) untuk menimba ilmu dari keluarga-keluarga Belanda di mana dia dititipkan. Tanpa kemampuan adaptif yang mumpuni, mustahil ia dapat bertahan di keluarga Belanda yang berbeda gaya hidup dan tatacara pergaulan. Kurang harmonisnya hubungan ayah ibunya mungkin menjadi salah satu pertimbangan Dorodjatun dititipkan di keluarga-keluarga Belanda sejak usia sangat belia. Namun demikian, keluarga yang kurang harmonis tidak menjadi penghalang seseorang untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Fase politik Indonesia menunjukkan, Soekarno, Soeharto, Megawati, dan SBY tidak berasal atau memiliki "keluarga ideal" sesuai prinsip BKKBN. Fase kolonial Belanda diakhiri dengan perintah kembali ke Indonesia dari Sultan HB VIII

sekaligus ia menunjuk Dorodjatun menjadi Putra Mahkota untuk selanjutnya menjadi Sultan. Menurut Monfries (2015, p. 50), selama bersekolah di Belanda, Dorodjatun adalah mahasiswa yang kurang menonjol secara akademik tetapi aktif di organisasi. Sayangnya satu-satunya yang tersisa dari naskah akhir untuk mendapatkan gelar Doktorandus/Drs. hanyalah sebuah judul tentang kontrak politik Kasunanan Surakarta, *The Political Contract Between the Sunan of Solo and the Dutch Government*.

Namun demikian, konsisten pada prinsip dan keras kepala menjadi sifat yang ditunjukkan HB IX sejak mula-mula. Pada penandatanganan kontrak dengan Belanda menjelang pelantikannya sebagai Sultan, HB IX terlibat perdebatan sengit. Menurut Mochtar (2011, pp. 35-36), perdebatan terjadi seputar persoalan yang menyangkut jabatan Patih, Dewan Penasehat, dan prajurit keraton. Namun, Monfries (2015, p. 73) menulis isu sebetulnya terkait dengan menurunnya secara berkala pembayaran kepada Sultan sebesar seperempat dari seluruh anggaran untuk Keraton dari kantong Belanda. Kesepakatan yang diraih adalah tidak ada pengurangan anggaran tahun 1940 dan 1941, tetapi akan ada pengurangan pada tahun-tahun berikutnya. Belanda memang memberlakukan standar yang rinci dan ditulis dengan lengkap tentang pengeluaran untuk daerah Swapraja yang diperintah secara tidak langsung.[1] Hal ini termasuk dalam enam kontrak standar yang diberlakukan di seluruh

1 Lihat misalnya laporan tahun 1918 (*Uitgave-Van-Het-Encyclopaedisch-Bureau-Aflevering-XIX*, 1919).

Hindia Belanda (Spit, 1911). Karena kontrak tidak mudah diamandemen selama tidak ada raja baru yang bertahta, maka mencari kata sepakat, terutama terkait anggaran, adalah hal yang sulit dicari titik temunya. Ketika Jepang datang, salah satu yang dilakukan Sultan HB IX untuk meminimalisir dampak romusha adalah membangun Selokan Mataram yang manfaatnya masih dirasakan hingga saat ini. Sultan HB IX menunjukkan sikap adaptif dengan tidak melakukan perlawanan frontal, tetapi berusaha menyesuaikan kondisi untuk meminimalisir dampak buruk kepada rakyat.

Pasca proklamasi, Sultan HB IX dan PA VIII mengumumkan maklumat yang isinya sama persis dengan maklumat Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran empat hari sebelumnya. Sampai pada waktu itu, keempat institusi tradisional di Jawa masih merupakan institusi yang terpisah dan mandiri antar satu dengan lainnya. Bahkan Kasunanan Surakarta lebih memiliki pengaruh di mata Belanda dan penduduk Jawa. Pertanyaannya, mengapa hanya Yogyakarta yang bertahan sementara dua institusi tradisional di Surakarta terus menurun pengaruhnya secara politik baik lokal maupun nasional? Setidaknya terdapat tiga penjelasan. *Pertama*, Sultan HB IX mengambil langkah taktis dengan menawarkan dan membiayai republik baru untuk pindah ke Yogyakarta pada Januari 1946 sampai menjelang selesainya masa revolusi tahun 1949. Perubahan ini membawa dampak yang signifikan karena berpindahnya delapan kementerian berikut aparaturnya. Selain itu, Selo Soemardjan (1962) mencatat, perubahan tuntutan zaman menjadikan kehidupan para bangsawan berubah drastis. Revolusi membutuhkan sumber daya manusia

yang menguasai kemampuan manajerial yang dihasilkan dari pendidikan modern dan tidak lagi berdasarkan prinsip feodalisme dalam hal ini ekstraksi ekonomi dari penguasaan tanah. Banyak bangsawan jatuh melarat karena tidak memiliki ketrampilan yang dibutuhkan di masa modern. Hal inilah yang harus dihadapi Sultan HB IX secara internal dalam menghadapi saudara-saudaranya tetapi tidak banyak dikupas.

*Kedua*, sebagaimana diuraikan di buku ini dan detailnya dapat dibaca di lampiran buku ini, HB IX dan PA VIII melakukan reorganisasi struktur desa dan kelurahan sebagai satu kesatuan, bukan lagi atas nama dua institusi terpisah : Kasultanan dan Pakualaman. Hal ini tidak pernah dilakukan di Surakarta. Padahal, sebelumnya keduanya memiliki wilayah kekuasaan yang berbeda. Pakualam menguasai sebagian kecil Pakualaman (sekarang Kecamatan Pakualaman) dan beberapa *kepanewonan* (struktur lama antara kecamatan dan desa) di Adikarto. Pada tahun 1951, ketiga kecamatan bergabung menjadi Kabupaten Kulonprogo. Sementara itu, Kasultanan menguasai wilayah lainnya kecuali tiga kecamatan: Kotagede dan Imogiri yang merupakan *enclave* Kasunanan Surakarta dan sebagian besar Kecamatan Ngawen yang menjadi *enclave* Mangkunegara (Cribb, 2010). Belakangan seluruh *enclave* Surakarta secara administratif menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 1950, walaupun sebagian wilayah, secara tradisional tetap menjadi bagian dari Kasunanan Surakarta. Selain itu, perubahan drastis juga terjadi dengan ditunjuknya Walikota Yogyakarta pertama yang berasal dari etnis Sunda. Perubahan di Yogyakarta dapat dilakukan karena selain karena legitimasi Sultan HB IX, juga karena

dukungan Laskar Rakyat — elemen rakyat yang hanya setia kepada Sultan.

*Ketiga*, kondisi masyarakat yang berbeda antara Yogyakarta dan Surakarta. Surakarta memiliki basis massa republiken dan komunis yang kuat dan radikal. Buku *Raja di Alam Republik* karya Setiadi, Hadi, and Trihandayani (2000) barangkali merupakan perbandingan setara tentang apa yang terjadi pada masa revolusi di Yogyakarta dan di Surakarta. Kasunanan dihadapkan pada persoalan penentangan daerah-daerah dan aksi radikal yang menculik dan membunuh Pepatih Dalem, Bupati dan Gubernur Jawa Timur Soeryo yang secara khusus ditugaskan untuk menyelesaikan konflik di Surakarta. Kondisi di Surakarta tidak terjadi di Yogyakarta, salah satunya karena Yogyakarta saat itu menjadi ibukota republik. Prestasi dalam fase revolusi diakhiri dengan cantik ketika Sultan HB IX menjadi wakil Indonesia dalam penyerahan kedaulatan olah Belanda di Jakarta tahun 1949. Dari fase ini terlihat bagaimana adaptif dan reaktifnya Sultan HB IX mengikuti irama moderniasi pemerintahan dengan menginisiasi peleburan struktur birokratisnya ke dalam institusi negara modern.

Sultan HB IX juga terus memainkan peran politik semasa pemerintahan Soekarno. Sebagaimana diuraikan dalam buku ini, kematangan politik Sultan HB IX diuji ketika ia menduduki berbagai posisi dalam pemerintahan Soekarno. Namun demikian, sejatinya, kunci kepiawaian politik Sultan HB IX ditunjukkan dalam sikapnya terhadap komunis yang kuat sejak zaman pergerakan nasional. Ketika Solo (wilayah dari Kasusnanan Surakarta) menjadi pusat komunis baru

pada masa revolusi, Yogyakarta tidak terpengaruh. Pada laporan CIA tanggal 4 Januari 1949 tertulis, "*there is almost no visible Communist activity in the town of Jogjakarta nor is there much social activity.*" HB IX membentuk Laskar Rakyat untuk membendung pengaruh PKI di kalangan pemuda tetapi mendapatkan keramahan PKI pada peristiwa Oktober 1952 (Monfries, 2015, pp. 2, 159). *Adaptability* terhadap komunisme bisa jadi merupakan kunci yang menyebabkan Sultan dapat menjadi bagian penting pada masa Soekarno dan pada fase awal Orde Baru.

Seorang sejarawan menandai pergantian "Indonesia lama" dan "Indonesia baru" melalui pemilihan Sultan HB IX sebagai Wakil Presiden Soeharto yang pertama. Sultan HB IX tidak diangkat melalui jalur tradisional berbasis keturunan, tetapi dipilih oleh MPR yang merupakan perintah dari konstitusi. Ailsa Zainu'ddin (1980) menulis:

> *As a contrast between the old Indonesia and the new, we could not find a more appropriate example than the fact that, when newly appointed President Suharto, son of a peasant in Godean (near Yogyakarta), set out on his first visit overseas, he named as his Acting President Sultan Hamengkubuwono IX, descendent from the ruler of the kraton of Mataram, whose authority came, not from his princely descent, but from the President appointed by the (Provisional) People's Consultative Assembly established by the constitution of the Republic of Indonesia (*Zainu'ddin, 1980, hal. 281*).*

Namun demikian, fase selanjutnya yang terjadi setelah Sultan HB IX berhenti menjadi Wakil Presiden yang menandai

puncak kariernya ditunjukkan dengan tidak diperhatikannya Yogyakarta (dan sebagian besar institusi tradisional lain di luar Jawa) dalam konstelasi politik, baik lokal maupun nasional. Sebagian bangsawan lokal menjadi bagian dari struktur politik Orde Baru yang melebur ke jalur ABRI, birokrasi dan Golkar. Di Wajo, Sulawesi Selatan misalnya, aristokrat lokal yang melebur ke dalam rezim Orde Baru melalui jalur ABRI terus menunjukkan dominasi dalam perebutan posisi elite lokal bahkan setelah reformasi (Bakti, 2007). Buku yang ada dihadapan pembaca ini ditutup dengan mangkatnya Sultan HB IX pada 1988. Sungguhpun demikian, sebagai penutup saya juga ingin menambahkan tentang warisan politik Sultan HB IX yang menjadikan DIY berhasil menjadi satu-satunya daerah yang institusi tradisionalnya diakui dan digabungkan dalam institusi politik modern.

Sepeninggal Sultan HB IX, posisi Gubernur DIY tidak "diwariskan" kepada penerusnya, Sultan HB X. Walaupun, Sultan HB X telah menunjukkan "loyalitas" sebagai kader Golkar di DIY dan salah satu adik kandungnya, GBPH Joyokusumo menjadi politisi Golkar, tampaknya hal tersebut tidak membuat Soeharto bergeming. Karenanya sejak 1988-1998, posisi Gubernur DIY dipegang oleh Sri Paduka Paku Alam VIII yang dipilih Suharto. Suharto kemudian mendekat ke Surakarta. Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 33 Tahun 1984 dan No. 7 Tahun 1991 yang menjamin sebagian aset tanah Kasunanan dan Mangkunegaran. Kasunanan mendapatkan haknya di Baluwarti sementara Mangkunegaran diberikan total aset senilai 5 juta US dolar saat itu. Sementara itu, di DIY, tidak

ada perlindungan aset tanah terutama setelah tahun 1984 ketika Sultan HB IX berkomitmen untuk melaksakan UU Pokok Agraria di DIY. Artinya, seluruh tanah Swapraja dan bekas Swapraja beralih menjadi milik negara. Komitmen ini dikukuhkan melalui Keppres No. 33 Tahun 1984 sehingga periode 1988-1998 merupakan periode terburuk bagi Kasultanan baik secara politik lokal maupun nasional.

Keadaan berbalik setelah Sultan HB X bergabung dengan gerakan reformasi pada detik-detik terakhir. Kuatnya lokalisme yang mengiringi reformasi diwujudkan dengan penobatan sepihak Sultan HB X sebagai Gubernur DIY beberapa bulan setelah Soeharto jatuh. Kontestasi politik selanjutnya adalah perebutan pengaruh antara Yogyakarta-Jakarta seputar Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta yang hampir seluruhnya dibangun atas narasi sejarah revolusi (Dardias, 2009). Perjuangan keistimewaan Yogyakarta adalah perjuangan ingatan atas peran Yogyakarta dan siasat politik Sultan HB IX semasa revolusi melawan amnesia Orde Baru yang mencoba mengecilkan peran Yogyakarta dan Sultan HB IX, salah satunya melalui film Janur Kuning. Artinya, walaupun telah mangkat sejak 1988, siasat politik Sultan HB IX mampu direproduksi menjadi perjuangan politik dalam proses penyusunan UU Keistimewaan. Hal ini mengantarkan institusi tradisional di DIY mendapatkan kembali kekuasaan tanah dan politik. Inilah sejatinya buah paling lezat dari keseluruhan siasat politik Sultan HB IX dengan sifat adaptinya menghadapi perubahan zaman.

**Referensi**

Bakti, A. F. (2007). Family Rule in Wajo South Sulawesi. In H. S. Nordhort & G. v. Klinken (Eds.), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post Soeharto Indonesia*. Leiden: KITLV.

CIA. (1949). *Communist Activity and Chinese Communist Influence*, (https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R004100270004-7.pdf)

Cribb, R. (2010). *Digital Atlas of Indonesian History*. Denmark: Nordic Institute of Asian Studies.

Dardias, B. (2009). Yogyakarta in Decentralized Indonesia: Integrating Traditional Institution into Democratic Transitions. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 13*(2).

Hooker, V. (2015). A Fine Balance: The Professional Life of Sultan Hamengku Buwono IX. In J. Monfries (Ed.), *A Prince in a Republic*. Singapore: ISEAS.

Mochtar, K. (2011). Bisikan Gaib. In Atmakusumah (ed.), *Tahkta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Monfries, J. (2015). *A Prince in a Republic: The Life of Sultan Hamengku Buwono IX of Yogyakarta*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Selo Soemardjan. (1962). *Social Changes in Yogyakarta*. New York: Cornell Univeristy Press.

Setiadi, B., Hadi, Q., & Trihandayani, D. S. (2000). *Raja di Alam Republik, Keraton Kasunanan Surakarta dan Pakubuwono XII/The King in a Republic, The Surakarta*

*Sunnanate and the Sunan Pakubuwono XII*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Spit, H. J. (1911). *De Indische zelfbesturende landschappen*: Het Vaderland.

Uitgave-Van-Het-Encyclopaedisch-Bureau-Aflevering-XIX. (1919). *Financieele Aangelegenheden: Begrootingen van de Zelfbesturende Landschappen in de Buitenewesten 1918*. Semarang-Soerabaja: Uitgave Van Het Encyclopaedisch Bureau Aflevering XIX.

Zainu'ddin, A. G. T. (1980). *A Short History of Indonesia* (Second Edition ed.). Melbourne: Cassel Australia.

# Pengantar Penulis

Pada awalnya, karya ini muncul karena ketertarikan penulis untuk menyusun skripsi yang bertemakan tentang Yogyakarta, khususnya Keraton Yogyakarta. Seketika, Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah salah satu sosok yang muncul dibenak penulis. Kemunculan itu tidak lain karena ketertarikan penulis terhadap cerita-cerita unik yang menghiasi perjalanan hidup Sultan HB IX. *Tahta Untuk Rakyat* adalah judul buku pertama yang penulis baca untuk menelisik karakter Sultan HB IX. Lambat laun, penulis menyadari bahwa sang sultan adalah sosok feodal yang sebenarnya jauh dari aspek-aspek demokrasi. Pada sisi yang lain, ia justru menunjukkan kontradiksi tersebut dengan berperilaku sebagai seorang demokrat sejati. Kontradiksi itulah yang membuat penulis tertantang untuk menyelami lebih dalam karakter sang sultan.

Alhasil, penulis pada mulanya ingin menguak pemikiran sang sultan tentang demokrasi. Aspek tersebut sebenarnya bisa dilihat dari kepemimpinannya selama menjabat sebagai seorang raja atau pemegang jabatan lainnya. Sayangnya, tidak mudah untuk menguak pemikiran sang sultan karena

menurut John Monfries, Sultan HB IX adalah sosok yang sulit untuk diprediksi. Banyak kontradiksi yang tidak bisa disimpulkan dengan mudah. Berangkat dari hal itu, penulis memutuskan untuk mengubah arah tulisan menjadi model penafsiran tapak politik yang dilakukan oleh Sultan HB IX tanpa menghilangkan aspek demokrasi yang ingin diangkat. Dengan demikian, penulis mencoba untuk memberikan makna di balik setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Sultan HB IX.

Bagi masyarakat yang mengetahui benar tentang sepak terjang Sultan HB IX, tentu akan menilai bahwa sultan adalah sosok yang berwibawa dan pantas dijadikan teladan. Berbagai media, mulai dari buku hingga media sosial menjadi alat yang ampuh untuk tetap mengangkat sultan sebagai sosok yang patut untuk diteladani. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Hanya saja, karya ini sedikit menjadi selingan singkat yang menunjukkan bahwa Sultan HB IX juga adalah *zoon politicon* yang sarat akan kepentingan. Tentu kesimpulan itu akan dipaparkan secara rinci di dalam buku ini berdasarkan penafsiran yang dilakukan oleh penulis. Artinya, Sultan HB IX adalah sosok cerdas yang mampu mengatur dan menjaga kekuasaan tradisionalnya di tengah arus modernisasi dan demokratisasi. Sampai dengan saat ini pun, peninggalan kekuasaannya masih terjaga dengan baik.

Karya ini nantinya akan disusun dengan pemaparan singkat tentang riwayat hidup Sultan HB IX, mulai dari masa kecil hingga ia menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan. Tahap itu dilakukan untuk menemukan kepentingan sultan dalam melakukan demokrasi, termasuk faktor-faktor yang

mempengaruhi keputusannya tersebut. Selanjutnya, penulis akan memaparkan tapak-tapak politik sultan yang tidak lain adalah strateginya untuk membangun citra demokratis. Tahap itu nantinya akan bisa dilihat dalam tiga dimensi demokrasi yaitu partisipasi, kompetisi, dan kebebasan berekspresi. Terakhir, penulis akan mencoba menafsirkan tapak politik yang dilakukan oleh sang sultan dengan menggunakan nilai-nilai demokrasi. Penafsiran ini akan menentukan apakah sang sultan berhasil menjadi sosok yang demokratis atau tidak, termasuk rencananya untuk mempertahankan kekuasaan tradisionalnya.

Proses penulisan karya ini tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Mengangkat tokoh yang hidup di era 1912-1988 tentu membutuhkan banyak literatur. Karya ini tidak akan menjadi sesuatu yang berharga bagi penulis tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Teruntuk Ibu Ratnawati selaku dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih. Berkat beliau, intisari dari tulisan ini bisa dipresentasikan dalam program *Research Days FISIPOL UGM* pada akhir tahun 2015. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Gaffar selaku dosen penguji yang telah mengingatkan penulis tentang pentingnya memvasukkan argumen Monfries dalam tulisan ini. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Purwo yang telah mengubah skripsi saya menjadi karya yang cantik. Penulis hafal betul dengan apa yang beliau sampaikan, mulai dari motivasi untuk mempercantik skripsi hingga membantu penulis menemukan intisari.

Buku ini secara khusus penulis persembahkan kepada orang yang selama ini menjadi penutan hidup penulis,

alm.Basuki. Penulis menyadari bahwa dengan menulis dan berkarya seperti ini akan membuat jiwa Bapak akan senantiasa hidup untuk mengayomi dan menjadi panutan bagi keluarga. Izinkanlah penulis untuk meneruskan apa yang menjadi cita-cita bapak selama ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Endang Wahyuwati yang senantiasa memberikan semangat dan doa di setiap keputusan yang penulis ambil. Tanpa adanya Ibu, tentu penulis tidak akan sampai pada titik di mana penulis bisa terus berkembang menjalani nadi kehidupan. Penulis ucapkan terima kasih juga kepada mbak Besty dan dua keponakan penulis yang senantiasa memberikan semangat untuk terus menjalani dan menikmati hidup. Tanpa ada kalian semua, tentu karya ini tidak akan ada artinya.

Berbicara tentang sultan dan Keraton tentu tidak bisa dilepaskan dari rekan-rekan penulis yang selama ini menjadi *partner* dalam berdiskusi. Penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Paguyuban Dimas Diajeng Kota Yogyakarta yang senantiasa mendukung penulis untuk segera mendokumentasikan skripsi penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Maz Permadi dan Aldino Deanasa yang juga sudah membantu penulis memahami seluk beluk sultan dan Keraton. Tidak lupa juga penulis sampaikan terima kasih kepada Dias Prasongko yang sudah berkenan membantu penulis untuk menyempurnakan karya ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua dosen dan staf DPP, serta rekan-rekan PolGov yang senantiasa menjadi motivasi bagi penulis.

Terakhir, karya ini penulis persembahkan kepada separuh jiwa penulis, Tasha Nastiti Waris, yang senantiasa menjadi

penyemangat penulis dalam menyelesaikan karya ini. Terima kasih atas lima tahun yang sangat mengesankan untuk senantiasa berkembang bersama. Buku ini akan menjadi saksi bahwa perjuangan penulis untuk bisa membuat karya ini tidak bisa dilepaskan dari dirimu. Terpisah sejauh 5290 km bukan menjadi penghambat bagi kita untuk terus berusaha mencapai asa. Percayalah semua usaha kita akan terbayar di masa depan kelak. Mari kita jaga bara api semangat ini untuk melakukan yang terbaik bagi nusa dan bangsa.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan bahwa karya ini masih jauh dari sempurna sehingga perlu adanya karya-karya lain yang bisa menjadi pelengkap dari karya ini. Semoga kehadiran buku ini bisa menjadi warna baru di dunia akademis, khususnya dalam kajian biografi Sultan HB IX di tengah romantisme yang ada saat ini. Terima kasih dan selamat membaca.

*Gyeongsan-si, 30 September 2016*

**Bastian Widyatama**

# Daftar Isi

# Glosarium

| | | |
|---|---|---|
| Abdi Dalem Punokawan | : | Abdi Dalem (pelayan atau pegawai Keraton) yang berasal dari masyarakat luas (umum) dan mendapatkan gaji sesuai dengan jenjang kepangkatan |
| Abdi Dalem Keprajan | : | Abdi Dalem yang berasal dari birokrat atau pegawai negeri sipil (PNS) |
| Amanat | : | Pernyataan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh sultan sendiri atau bersama paku alam yang bertahta |
| Aristokrasi | : | Pemerintahan (kekuasaan) yang berada di tangan kaum bangsawan |
| Babad Tanah Jawi | : | Karya sastra sejarah (khususnya Kerajaan Mataram) yang berbentuk puisi tembang Jawa |
| Darah Dalem | : | Golongan masyarakat yang termasuk dalam bangsawan (memiliki hubungan atau silsilah dengan raja-raja keraton yang sudah ada sebelumnya) |
| Dewan Agung | : | Lembaga representasi rakyat terhadap kekuasaan yang berfungsi memberikan nasihat kepada raja yang bertahta |

| | | |
|---|---|---|
| Een B | : | Sekolah dasar yang diperuntukkan bagi kalangan bangsawan Eropa pada era kolonialisme di Indonesia |
| Feodal | : | Tradisi kepemimpinan yang didasarkan pada keturunan bangsawan (turun-temurun berdasarkan ikatan darah) |
| Garwa Ampeyan | : | Selir (bukan istri utama) |
| Garwa Padmi | : | Permaisuri atau istri utama |
| Giyanti | : | Nama tempat (sekarang di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo) di tenggara Kota Karanganyar, Jawa Tengah yang menjadi tempat penandatanganan perjanjian Giyanti |
| Kawedanan | : | Wilayah administrasi kepemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia Belanda |
| Kudeta | : | Perebutan kekuasaan dari pemerintahan yang sah yang dilakukan secara illegal dan sering kali bersifat brutal |
| Kyai Jaka Piturun | : | Nama keris di Keraton Yogyakarta yang diberikan oleh seorang raja kepada anaknya yang ditunjuk sebagai pewaris tahta kekuasaan |
| Laku Pepe | : | Tradisi masyarakat Jawa untuk berjemur diri di alun-alun dengan mengenakan busana putih-putih dalam rangka menyampaikan keluh kesah kepada raja |

| | | |
|---|---|---|
| Laskar Rakyat Mataram | : | Organisasi masyarakat semi militer yang dibentuk oleh Sri Sultan HB IX |
| Maklumat | : | Sebuah kebijakan yang dibuat bersama antara Sultan, Paku Alam, dan Ketua KNI Daerah Yogyakarta |
| Merit System | : | Sistem perekrutan birokrat yang didasarkan pada prestasi kerja dan kemampuan yang dimilikinya |
| Oligarki | : | Pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari kelompok tertentu |
| Pamong Desa | : | Orang-orang yang menangani pemerintahan (administrasi) desa untuk membantu tugas kepala desa |
| Panewu | : | Istilah kepala kecamatan yang digunakan pada era kolonialisme dan pasca kemerdekaan |
| Paniradya | : | Semacam departemen atau kementerian di dalam sistem pemerintahan Keraton Yogyakarta |
| Paris Club | : | Grup informal pejabat-pejabat finansial dari 19 negara terkaya di dunia yang menyediakan layanan finansial seperti strukturisasi hutang |
| PELITA | : | Program pembangunan jangka pendek yang dilaksanakan setiap lima tahun yang kemudian dikenal dengan istilah pembangunan lima tahun di era Orde Baru |

| | | |
|---|---|---|
| Pepatih Dalem | : | Jabatan yang memiliki fungsi seperti perdana menteri (tangan kanan Sultan), tetapi memiliki dua loyalitas yaitu kepada Sultan dan pihak Belanda |
| Serangan Umum 1 Maret | : | Serangan pada 1 Maret 1949 yang dilakukan terhadap Yogyakarta (di bawah pendudukan Belanda) untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa kekuatan TNI (Indonesia) masih ada |
| Sultan Ground | : | Tanah milik Keraton Yogyakarta (peninggalan leluhur) yang pemanfaatannya digunakan untuk tempat tinggal masyarakat dengan status 'magersari' demi kepentingan masyarakat |
| The Bronze Wolf | : | Penghargaan tertinggi yang diberikan oleh *World Organization of the Scout Movement* kepada individu yang yang dinilai memberikan jasa luar biasa kepada gerakan Pramuka dunia |
| Triumvirat | : | Sebuah rezim politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa yang masing-masing disebut triumvir |
| *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) | : | Persekutuan dagang yang dibentuk pengusaha Belanda yang tergabung dalam Heeren XVII pada 20 Maret 1602 |

*Voorstenlanden* : Bagian dari negara jajahan pemerintah Hindia-Belanda dengan sistem jajahan tidak langsung atau *indirect rule* yang berjumlah 19 daerah, termasuk empat kerajaan pecahan Mataram Islam

# Singkatan

BBC : *British Broadcasting Corporation*
BP : Badan Pekerja
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GBPH : Gusti Bendara Pangeran Harya
GPH : Gusti Pangeran Harya
HB : Hamengku Buwono
HBS : *Hogere Burger School*
IGGI : *Inter-Governmental Group on Indonesia*
IMF : *International Monetary Fund*
KGPA : Kanjeng Gusti Pangeran Arya
KMB : Konferensi Meja Bundar
KNI : Komite Nasional Indonesia
KNID : Komite Nasional Indonesia Daerah
KNIL : *Koninklijk Nederlands Indisch Leger*
KRA : Kanjeng Raden Ayu
KRT : Kanjeng Raden Tumenggung
NHJJS : *Neutrale Hollands Javaanse Jongens School*
NIPV : *Ned Indische Padvinders Club*
NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

| | |
|---|---|
| RIS | : Republik Indonesia Serikat |
| TKR | : Tentara Keamanan Rakyat |
| TPS | : Tempat Pemungutan Suara |
| UGM | : Universitas Gadjah Mada |
| VOC | : *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* |

# BAB 1

# SANG SULTAN TERSERET ARUS DEMOKRATISASI

## Melacak Kepentingan Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Untuk menemukan tapak politik Sri Sultan Hamengku Buwonog (HB) IX, tulisan ini menjabarkan secara singkat tentang sejarah hidup Sultan. Bagian ini nantinya hanya akan menjelaskan momen-momen terpenting Sri Sultan HB IX selama hidupnya. Hal ini dilakukan untuk menarik sebuah benang merah tentang kepentingan atau misi yang dibawa oleh Sultan baik sebelum maupun setelah masa-masa ketika dirinya naik tahta pada tahun 1940. Semenjak memiliki kekuasaan sebagai seorang raja, Sri Sultan HB IX banyak melakukan pembaharuan yang dinilai demokratis. Selain melacak kepentingan sang sultan, misi bab ini adalah untuk menemukan faktor sosial-historis (kognisi, interaksi, dan kebutuhan untuk aksi) yang mempengaruhi tindakan

politik Sri Sultan HB IX terkait demokrasi. Berbagai pengalaman tersebut selanjutnya mempermudah untuk menafsirkan tapak politik Sri Sultan HB IX tentang demokrasi yang nantinya akan dilihat berdasarkan basis tindakan-tindakan yang dilakukan.

## Sang Penjaga Tradisi Keraton

### *Keraton Yogyakarta Sebagai Penerus Kerajaan Mataram Islam*

Perlu menjadi catatan penting bahwa kerajaan Mataram yang didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan mencapai masa kejayaannya di era kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kegigihannya melawan pemerintahan kolonial Belanda membuat Sultan Agung menjadi salah satu raja yang disegani pada waktu itu. Kegigihan tersebut dibuktikan oleh Sultan Agung ketika dirinya melakukan penyerangan terhadap Belanda di Jakarta. Meskipun demikian, kejayaan kerajaan Mataram tidak berlangsung lama, terutama ketika Sultan Agung meninggal dan digantikan oleh Sunan Amangkurat I. Semenjak itu, kejayaan kerajaan Mataram terus menerus menurun hingga pada akhirnya terbelah menjadi empat kerajaan, Kasusnanan Surakarta, Mangkunegaran, Keraton Yogyakarta dan Pakualaman.

Keraton Yogyakarta Hadiningrat sebagai salah satu kerajaan yang memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari Kerajaan Mataram. Sejarah Kerajaan Mataram tersebut erat kaitannya dengan kehadiran *Vereenigde Oost-Indische*

*Compagnie* (VOC), sebuah perusahaan dagang Belanda yang banyak mengambil keuntungan dari kekayaan sumber daya di seluruh wilayah Indonesia. Hubungan Kerajaan Mataram dan VOC telah dibuktikan dengan adanya 111 persetujuan dagang hingga tahun 1705.[1] Salah satu peristiwa penting yang mengubah relasi VOC dan Mataram yaitu ketika adanya pemberontakan oleh etnis Tionghoa yang membuat pusat kerajaan Mataram Islam dipindahkan dari Kartasura ke Surakarta pada 1742.[2]

Peran VOC semakin kuat ketika Susuhunan Paku Buwono II, raja Mataram waktu itu, menerima tawaran VOC untuk menangani pemberontakan etnis Tionghoa tersebut. Namun, bantuan tersebut harus dibayar oleh Susuhunan dengan memberikan kebebasan kepada VOC untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah kerajaan. Keputusan Susuhunan tersebut ditentang oleh salah satu anggota keluarganya yakni Raden Mas Said (RM Said) yang kemudian melakukan pemberontakan. Pangeran Mangkubumi, yang notabane masih saudara Susuhunan, kemudian mengambil peran untuk mengatasi pemberontakan tersebut. Hal ini karena Susuhunan memberikan iming-iming berupa daerah Sukowati kepada siapa pun yang mampu mengatasi pemberontakan RM Said.

---

1 Lihat Selo Soemardjan, *Social Changes in Jogjakarta,* Cornell University Press, Ithaca N.Y, 1962, hal. 10.

2 Selengkapnya lihat Bayu Dardias Kurniadi, Yogyakarta in Decentralized Indonesia: Integrating Traditional Institution in Democratic Transitions, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* Vol.13, No.2, 2009, hal. 193.

Namun demikian, Pangeran Mangkubumi justru bergabung dengan kelompok RM Said karena Susuhunan Paku Buwono II mengingkari janjinya. Akhirnya, Pangeran Mangkubumi dan RM Said melakukan pemberontakan kepada Susuhunan pada tahun 1746. Pada saat itu, Susuhunan kembali meminta bantuan VOC untuk meredam pemberontakan yang dilakukan saudaranya. Posisi kerajaan Mataram semakin lemah di hadapan VOC ketika pada tanggal 16 Desember 1749, Susuhunan Paku Buwono II membuat sebuah perjanjian dengan VOC.[3] Sejak saat itu, VOC memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk mengintervensi kerajaan Mataram melalui pembuatan kontrak politik baru dengan setiap raja yang baru diangkat.[4]

Peran VOC yang cenderung mengintervensi tersebut kembali muncul terutama ketika terjadi pertikaian antara Pangeran Mangkubumi dengan Sri Susuhunan Paku Buwono III. Akhirnya, untuk menyelesaikan perselisihan itu, pada

---

3 Susuhunan Paku Buwono II tampak menyerahkan Mataram kepada VOC dengan syarat bahwa hanya keturunannya yang boleh menjadi raja selanjutnya (Paku Buwono III). Keputusan fatal itu diambil ketika Susuhunan Paku Buwono II mengalami sakit yang serius pada tahun 1949. Lihat Purwadi, *Sejarah Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX,* Hanan Pustaka, Yogyakarta, 2006, hal. 49.

4 Pada awal kedatangan VOC di Jawa, perjanjian yang dibuat dengan kerajaan Mataram hanya mengatur urusan ekonomi atau perdagangan semata. Melihat peluang yang besar untuk menguasai Kerajaan Mataram, maka VOC selanjutnya merambah ke ranah politik dalam setiap perjanjian yang dibuat dengan Kerajaan Mataram. Selain itu, VOC selalu mengurangi kekuasaan kerajaan Mataram dengan cara memperbaharui kontrak politik dengan raja yang baru.

tahun 1755 dibuatlah perjanjian Giyanti yang isinya membagi Mataram menjadi dua wilayah yaitu Surakarta yang dipimpin oleh Sri Susuhunan Paku Buwono III dan Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi. Sejak saat itu, Pangeran Mangkubumi menyandang gelar *Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Kaping I*. Sebagai seorang yang ahli di bidang arsitektur, Sri Sultan Hamengku Buwono I membuka Hutan Beringan sebagai ibu kota Keraton Yogyakarta, serta membuat arsitektur bangunan keraton yang masih berdiri megah hingga saat ini.[5]

Dalam Babad Tanah Jawi, Pujangga Besar Kyai Yasadipura I melukiskan Sri Sultan Hamengku Buwono I sebagai pribadi yang cerdas, cekatan, berwibawa, dan gigih dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Meskipun demikian, kekuasaan Keraton Yogyakarta semakin hari semakin melemah karena situasi politik yang cenderung tidak kondusif di kalangan internal keraton. Pada tahun 1813, semenjak ditinggal Sri Sultan HB I, internal Keraton Yogyakarta menjadi keruh hingga pada akhirnya muncul pemerintahan baru dengan nama Kadipaten Pakualaman dengan pemimpinnya yang bergelar *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I* dan notabene adalah putra Sri Sultan Hamengku Buwono I.

---

5 Tercatat bahwa kerajaan yang dibangun oleh Sri Sultan HB I menjadi makmur, sandang dan pangan berlimpah serta murahnya harga-harga barang. Hal tersebut berkat tekad Sri Sultan HB I untuk memperkuat kerajaannya demi kemakmuran rakyatnya. Selengkapnya lihat Ki Sabdacarakatama, *Sejarah Kraton Yogyakarta,* NARASI, Yogyakarta, 2009, hal. 30.

Sebelumnya, Keraton Surakarta juga mengalami perpecahan pada tahun 1757 dengan dikukuhkanya Raden Mas Said menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro I dengan kerajaannya yang bernama Mangkunegaran.

Dari cerita singkat di atas, dapat dikatakan bahwa Keraton Yogyakarta merupakan salah satu pewaris Kerajaan Mataram yang pada zamannya pernah berjaya di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Munculnya Keraton Yogyakarta juga merupakan bentuk nyata dari kegigihan Sri Sultan Hamengku Buwono I dalam upayanya menyelamatkan wibawa Kerajaan Mataram supaya tidak dikuasai oleh pihak penjajah. Kedua tokoh itulah (Sultan Agung dan Sri Sultan HB I) yang nantinya menjadi inspirasi bagi Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengembalikan kejayaan Keraton Yogyakarta di zaman perjuangan.[6] Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa Keraton Yogyakarta adalah bagian dari *Voorstenlanden* yang diperintah oleh Belanda secara tidak langsung. Kondisi tersebut menegaskan bahwa Keraton Yogyakarta bukanlah sebuah daerah yang benar-benar mandiri, tetapi menjadi bagian dari jajahan Belanda. Bahkan, nantinya Sultan HB IX juga menjadi bagian dari angkatan perang Ratu Belanda dengan pangkat letnan jendral.

---

6 Keinginan keras Pangeran Mangkubumi (Sri Sultan HB I) untuk menentang Belanda secara tidak langsung telah diwariskan kepada keturunannya, termasuk salah satunya adalah Sri Sultan HB IX. Selengkapnya lihat Raharja dkk., Pengaruh Sri Sultan Hamengku Buwono I pada Seni Karawitan Kraton Yogyakarta, *Jurnal Resital,* Vol.15, No.1, 2014, hal. 48.

### *Kemunculan Sosok Dorodjatun*

Pada Sabtu Paing tanggal 12 April 1912, lahirlah seorang putra dari Gusti Pangeran Haryo Puruboyo dan RA Kustilah di Kampung Sompilan (kini dikenal dengan daerah Pakuningratan) yang nantinya diberi nama Dorodjatun.[7] Adapun nama Dorodjatun dipilih dengan tujuan supaya seorang putra yang baru lahir tersebut memiliki derajat yang tinggi, bisa mengemban tanggung jawab dan selalu memiliki budi baik meskipun telah memiliki jabatan tinggi kelak.[8] Ayahanda Dorojadtun, GPH Puruboyo, adalah kelak yang menjadi putra mahkota dan selanjutnya dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Di sisi lain, RA Kustilah adalah *garwa padmi* (istri utama) dari GPH Puruboyo yang nantinya menyandang gelar Kanjeng Raden Ayu (KRA) Adipati Anom yang merupakan putri Pangeran Mangkubumi.

Ketika Dorodjatun sudah berusia tiga tahun, ayahandanya dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Meskipun demikian, tanpa alasan yang jelas, Sri Sultan Hamengku Buwono VIII memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan istri utamanya sehingga KRA Adipati Anom memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya yaitu KGPA Mangkubumi. Ketika ayahnya meninggal, KRA Adipati Anom kemudian tinggal bersama dengan kakaknya yaitu KRT Ronodiningrat. Adapun Dorodjatun, yang nantinya akan dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sejak kecil sudah terpisah dari orang tuanya karena ketika berusia

---

7 Lihat Atmakusumah (ed.), *op.cit.,* hal. 7.

8 *Ibid.,* hal. 8.

empat tahun, ia sudah dititipkan kepada keluarga Belanda. Kondisi itu membuat Dorodjatun berbeda dengan golongan bangsawan lainnya.

## Misi Khusus Sri Sultan Hamengku Buwono VIII

Dalam rangka menghadapi berbagai kepentingan politik pemerintah kolonial Belanda, Sri Sultan Hamengku Buwono VIII memiliki sebuah misi khusus. Misi tersebut adalah mendidik anak-anaknya untuk menyelami dan memahami karakteristik orang Belanda. Langkah yang dilakukan adalah dengan menitipkan anak-anaknya di keluarga Belanda hingga memberikan fasilitas pendidikan tinggi ke Negeri Belanda. Tepat pada saat itu, ketika anak-anak Sultan Hamengku Buwono VII mulai menempuh pendidikan, arus demokratisasi mulai terjadi di beberapa negara Eropa dan Asia. Misalnya, saat anak-anaknya berada di bangku pendidikan dasar, arus demokrasi telah merambah Thailand. Kemudian disusul Eropa ketika mereka melanjutkan studi di Negeri Belanda. Terakhir mulai menyebar ke Malaysia ketika anak-anaknya memegang peranan penting di keraton. Tidak mengherankan apabila nantinya akan ada perubahan di era kepemimpinan sultan yang baru (Sultan HB IX) salah satunya karena adanya dorongan perubahan pada konteks global.

## *In de Kost: Menyelami Karakter Orang Belanda*

Semenjak berusia empat tahun, Dorodjatun mendapatkan lingkungan yang berbeda apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Semenjak putra-putranya masih kecil, Sri Sultan Hamengku Buwono VIII memutuskan untuk

menitipkan putra-putranya ke keluarga Belanda dengan sistem pondokan atau *in de kost.*[9] Pada saat itu, Dorodjatun dititipkan di keluarga Belanda bernama Mulder yang merupakan kepala sekolah *Neutrale Hollands Javaanse Jongens School* (NHJJS).[10] Salah satu tujuannya yaitu supaya ia tidak diistimewakan karena status sosialnya yang tinggi, serta supaya dirinya terdidik hidup sederhana dan penuh dengan kedisiplinan sebagaimana cara hidup orang Belanda.[11]

Pendidikannya di sekolah dasar ditempuh di *Eerste Europese Lagere School B* atau Een B di Kampementstraat atau sekarang dikenal dengan nama Jalan Panembahan Senopati. Sebelumnya, Dorodjatun diberi nama panggilan "Henkie" oleh keluarga Mulder yang berarti 'Henk yang kecil'. Belum selesai pendidikannya di sekolah tersebut, Henkie kemudian pindah sekolah ke *Neutrale Europese Lagere School* di Pakemweg yang sekarang dikenal dengan nama daerah Pakem. Di masa pendidikan di sekolah dasar tersebut, Henkie telah mulai menemukan hobinya yaitu dengan bergabung ke dalam klub kepanduan (pramuka) yang bernama *Ned. Indische Padvinders Club* atau NIPV. Henkie juga sempat pindah pondokan dari keluarga Mulder ke keluarga Cock.

---

9 Strategi politik Sri Sultan HB VIII tidak hanya dilakukan dengan cara menitipkan anak-anaknya di kalangan keluarga Belanda, tetapi juga memasukkan mereka ke sekolah dalang (pewayangan) Habiranda yang didirkannya sendiri. Selengkapnya lihat Sindung Haryanto, *Edelweiss Van Jogja: Pengabdian Abdidalem Kraton Yogyakarta dalam Perspektif Sosio-fenomenologi,* Kepel Press, Yogyakarta, 2014, hal. 68-69.

10 Lihat Atmakusumah (ed.), *op.cit.,* hal. 9.

11 *Ibid.,* hal. 10-11.

Setelah menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta, Henkie kemudian melanjutkan pendidikannya di HBS Semarang dan dititipkan kepada keluarga Belanda bernama Voskuil. Karena alasan kesehatan dan cuaca yang tidak sesuai dengan fisiknya maka Henkie kemudian pindah sekolah ke HBS Bandung yang udaranya lebih sejuk. Memasuki masa remaja tersebut, Henkie lebih berani untuk hidup mandiri dan jauh dari keluarga karena ia menuntut ilmu di Semarang dan Bandung yang jaraknya cukup jauh dari Yogyakarta. Selama masa pendidikannya, Henkie terus menempa dan membiasakan diri untuk hidup sederhana dan disiplin seperti orang Belanda. Bahkan setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya, ayahandanya meminta ia untuk melanjutkan pendidikan di Belanda bersama dengan beberapa saudaranya.

### *Calon Sultan Mengasah Intelektualitas*

Atas dasar kehendak ayahandanya, pada 1930, Dorodjatun meninggalkan Keraton untuk melanjutkan studinya di Belanda bersama dengan saudaranya, Pangeran Prabuningrat. Dorodjatun melanjutkan studinya di sekolah Gymnasium (Haarlem) dan bertempat tinggal di salah satu rumah keluarga Belanda bernama Mourik Broekman yang merupakan direktur dari sekolah tersebut. Pada tahun 1934, ia berhasil menyelesaikan studinya di sekolah Gymnasium dan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang dipilih olehnya pada waktu itu adalah Rijksuniversiteit. Adapun jurusan yang diambil adalah Indologi yang merupakan gabungan dari ilmu hukum dan

ekonomi. Selama menjalani masa perkuliahan, Dorodjatun benar-benar membuka cakrawala barunya, termasuk bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa Belanda yang terkenal cerdas dan kritis.

Waktu itu Dorodjatun menjadi anggota dari sebuah organisasi yang bernama *Leidse Studentencorps*, kemudian juga masuk dalam perkumpulan mahasiswa *Verenigde Faculteiten*, serta organisasi yang bernama Minerva (anggotanya terdiri dari elite bangsawan), dan aktif dalam berbagai diskusi di lingkungan universitas.[12] Melalui berbagai organisasi dan diskusi itulah Dorodjatun mengasah intelektualitasnya, termasuk mengasah kemampuan organisasi karena dirinya selalu mendapatkan jabatan penting di dalamnya. Pada tahun 1937, Dorodjatun berhasil menyelesaikan studinya dalam *candidaats-examen* dan meraih ijazah *candidaat* sehingga dirinya boleh melanjutkan studinya pada tingkat doktoral. Baru dua tahun studi doktoralnya berjalan sejak tahun 1937, ia harus dipanggil pulang ke Indonesia karena kondisi dunia yang sedang memanas karena Perang Dunia II. Selain itu, Sri Sultan HB VIII ingin segera bertemu langsung dengan Dorojadtun karena penyakit diabetesnya yang semakin parah. Oleh karena itu, pada tahun 1939, ia pulang ke Indonesia terlebih dahulu sebelum saudara-saudaranya yang lain.

Dengan menggunakan kapal Dempo (kapal barang), Dorodjatun pulang ke Indonesia. Dalam perjalanannya, kapal tersebut menempuh rute yang jauh karena rute yang biasanya dilalui (Laut Tengah dan Terusan Suez) menjadi

---

12 *Ibid.*, hal. 18-19.

area Perang Dunia II. Pada tanggal 18 Oktober 1939, kapal yang ditumpangi oleh Dorodjatun telah merapat di pelabuhan Tanjung Priok. Ketika Dorodjatun turun dari kapal, dirinya melihat saudara-saudaranya memberi hormat (bahkan menyembah) dan memberikan teguran sopan dengan menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil atas perintah Sri Sultan Hamengku Buwono VIII.

### Mimpi Buruk Calon Sultan : Menyebarnya Ide-ide Demokrasi

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada masa itu, Dorodjatun sedang mengalami fase perkenalan dan penyerapan ide demokrasi lantaran kondisi sosial, ekonomi dan politik sangat mendukung dan mengondisikan terjadinya proses itu. Ketika Dorodjatun melanjutkan studinya di Belanda pada tahun 1930-an, sistem pemerintahan di berbagai negara berubah dari monarki ke arah demokrasi, termasuk di Eropa dan Asia. Menariknya, monarki-monarki yang mapan masih mempertahankan model lama dengan mendasarkan pada otoritas suci bahwa raja adalah kepanjangan tangan tuhan/dewa.[13] Namun, tidak ada satu pun monarki yang tidak mengikuti perubahan sebagaimana yang berlangsung di dunia Barat pada abad ke-19. Meskipun perkembangan demokrasi di Eropa sempat mengalami kemunduran pasca kemenangan partai Nazi di pemilihan umum Jerman, ide-ide demokrasi pada dasarnya tetap berkembang. Hal tersebut bisa dilihat dari

13 Lihat John Markoff, *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal. 100.

diterapkannya prinsip-prinsip demokrasi prosedural seperti diterapkannya mekanisme pemilihan umum.

Tidak hanya berhenti di Eropa, beberapa akademisi yang belajar di Eropa pun kemudian membawa nilai-nilai demokrasi ke negaranya masing-masing, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Salah satu contoh negara yang mengalami perubahan sistem tersebut adalah Thailand. Pada tahun 1932, perwira-perwira Thai yang merupakan lulusan luar negeri berhasil menggeser monarki absolut menjadi monarki konstitusional melalui kudeta.[14] Ketika kudeta tersebut berlangsung, raja Thailand yang saat itu sedang memerintah adalah Prajadhipok atau Rama VII yang merupakan putra dari Chulalongkorn. Raja yang mulai bertahta pada tahun 1925 ini tercatat sebagai raja terakhir di era monarki absolut Thailand. Dengan kata lain, Prajadhipok turun tahta setelah monarki konstitusional didirikan pada tahun 1932.[15]

Sebelum terjadinya revolusi 1932, pada tahun 1931 terjadi perdebatan tentang masalah ekonomi di kalangan elite politik Thailand yang membawa dampak pada krisis politik dalam negeri. Hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap raja atau pemerintah semakin menurun. Masuknya

---

14 Lihat Jim Glassman dalam artikel Manap Soham, *Proses Demokrasi yang Berliku di Negeri Gajah Putih (Studi Kasus Negara Thailand*), diakses melalui http://www.academia.edu/8032774/PROSES_DEMOKRASI_YANG_BERLIKU_DI_NEGERI_GAJAH_PUTIH_STUDI_KASUS_NEGARA_THAILAND_ pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 pukul 21.59 WIB.

15 Lihat website tourism Thailand, *Tentang Thailand: Politik,* diakses melalui http://id.tourism-thailand.org/Thailand/politics pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 pukul 22.19 WIB.

nilai-nilai demokrasi yang dibawa oleh kaum intelektual mendorong terlaksananya revolusi di tahun 1932 secara lebih cepat. Pada saat itu, kaum intelektual dipimpin oleh Pridi Banomnyong dan kelompok militer dipimpin oleh Phibun Songgram. Kudeta yang dilakukan untuk meruntuhkan monarki absolut tersebut membawa dampak perubahan sistem pemerintahan ke arah yang lebih demokratis. Semenjak itu, pemerintahan disusun meliputi raja, kabinet, dan parlemen. Akibatnya raja waktu itu (Bhumibol) menjalankan kekuasaan tanpa memiliki kekuasaan politik.[16]

Selain itu, Malaysia yang berbentuk monarki pun juga telah mengadopsi ide-ide demokrasi pada tahun 1950-an. Sebelumnya, pemerintah kolonial Inggris yang menguasai Malaysia ingin membuat sebuah Kesatuan Malaya (*Malaya Union*) yang diyakini sebagai cara Inggris untuk menggugat kedaulatan raja-raja Melayu.[17] Kebijakan yang ditentang oleh orang-orang Melayu tersebut terjadi pada tahun 1946. Ide-ide demokrasi prosedural mulai berkembang dan terlihat nyata ketika Malaysia menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Sampai dengan saat ini, Malaysia terus menjalankan ide-ide demokrasi dengan tetap mempertahankan sisi monarkinya yaitu dengan adanya gelar

---

16 Tutur Paul M.Handley, penulis buku biografi Bhumibol, *Monarki Thailand Halangi Demokrasi,* diakses melalui http://www.dw.com/id/monarki-thailand-halangi-demokrasi/a-16558400 pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 pukul 22.35 WIB.

17 Lihat website Jurnal Malaysia, *Sejarah Sistem Demokrasi Berpalimen Malaysia,* diakses melalui http://www.jurnalmalaysia.com/?p=1624 pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 pukul 12.14 WIB.

*Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong* yang melekat pada kepala negara.

Maraknya ide-ide demokrasi yang mulai merambah ke berbagai belahan dunia tersebut pada dasarnya bisa menjadi mimpi buruk bagi sang calon sultan, yakni Dorodjatun. Tidak hanya di Eropa, gelombang tentang ide-ide demokrasi pun berkembang ke kawasan Asia Tenggara yang ditandai dengan melemahnya kekuasaan-kekuasaan yang didasarkan pada sistem monarki. Fenomena tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Dorodjatun yang tidak lama lagi akan dinobatkan sebagai seorang raja di sebuah kerajaan yang masih menganut sistem monarki. Apabila calon sultan tersebut tidak memiliki siasat, sistem monarki yang dipakai dalam kerajaannya bisa jadi tergerus oleh ide-ide demokrasi seperti yang terjadi di beberapa negara di dunia.

## Sang Sultan Merancang Strategi Menjinakkan Demokrasi

Dalam tradisi Keraton Yogyakarta, salah satu simbol bahwa kekuasaan raja akan dialihkan ke keturunannya adalah penyerahan *Keris Kyai Jaka Piturun* kepada orang yang dikehendaki menjadi raja. Penyerahan keris itu pun dilakukan oleh Sri Sultan HB VIII kepada Dorodjatun di Jakarta. Namun, penyerahan keris tersebut dalam pandangan pemerintah kolonial tidak cukup. Maka, pemerintah kolonial melalui kebijakan Gubernur Adam membentuk panitia yang terdiri dari putra-putra Sri Sultan HB VII dan Sri Sultan HB VIII untuk menentukan sultan yang baru. Dalam forum tersebut, Dorodjatun ditunjuk sebagai ketua untuk memimpin musyawarah keluarga tersebut. Sikap demokratis Dorodjatun

muncul ketika dirinya menanyakan kepada forum terkait adakah di antara mereka yang ingin menjadi Sri Sultan HB IX.[18] Dengan kompak, forum menyatakan bahwa mereka sepakat menunjuk Dorodjatun sebagai Sri Sultan HB IX seperti keinginan Sri Sultan HB VIII ketika *Keris Kyai Jaka Piturun* diberikan kepada Dorodjatun.

Sebelum dinobatkan sebagai raja, ada satu tahapan yang harus dilalui oleh Dorodjatun yaitu membuat kontrak politik dengan pihak Belanda yang diwakili oleh Gubernur Adam seperti yang telah dilakukan sejak zaman Kerajaan Mataram. Penyusunan kontrak politik tersebut pada dasarnya merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk terus mengurangi kekuatan politik Keraton Yogyakarta yang dianggap membahayakan kelangsungan pemerintahan kolonial. Penyusunan kontrak politik tersebut telah menghabiskan waktu berbulan-bulan karena tidak menemui kesepakatan bersama terkait beberapa hal. Hal tersebut yaitu soal jabatan Pepatih Dalem, Dewan Penasihat, dan Prajurit Keraton yang dianggap merugikan pihak Keraton Yogyakarta. Tidak hanya itu, urusan honor untuk pihak kesultanan juga menjadi salah satu isu penting yang membuat proses negosiasi tersebut berjalan alot.

Pertama, Dorodjatun menginginkan bahwa seorang Pepatih Dalem hanya memiliki monoloyalitas di bawah keraton dan dipilih oleh pihak sultan yang sedang berkuasa. Di sisi lain, pihak pemerintah kolonial Belanda menginginkan Pepatih Dalem berada di antara dua pihak yaitu Belanda dan

---

18 Lihat Atmakusumah (ed), *op.cit.*, hal. 31.

Keraton.[19] Kedua, Dorodjatun menginginkan supaya Dewan Penasihat memiliki kebebasan berbicara untuk bisa mewakili kepentingan rakyat.[20] Usul tersebut kemudian ditolak oleh pihak Belanda. Ketiga, Dorodjatun juga menginginkan supaya prajurit Keraton Yogyakarta tidak menjadi bagian dari *Koninklijk Nederlands Indisch Leger* (KNIL) atau tentara kerajaan Belanda, terlebih lagi keraton harus menggaji dan merekrut mereka. Di sisi lain, Belanda menginginkan supaya prajurit Keraton menjadi bagian dari KNIL.

Kemudian, isu lain yang menyebabkan negosiasi berjalan alot antara pihak Keraton dengan Belandan menurut Monfries (2015) yaitu terkait dengan pengurangan jumlah anggaran atau honor yang dibayarkan kepada sultan. Tercatat bahwa honor untuk sultan sejatinya seperempat dari total keseluruhan anggaran kesultanan. Dorodjatun sebenarnya tidak ingin apabila honor untuk kesultanan dikurangi. Bahkan berdasarkan rencana Dorodjatun, dirinya juga ingin melakukan penataan di lingkungan Keraton dengan mengurangi jumlah pegawai dan pasukan, tetapi juga menaikkan gaji mereka yang diambilkan dari anggaran pemerintah kolonial. Gubernur

---

19 Pepatih Dalem (seperti jabatan perdana menteri) merupakan salah satu jabatan yang berfungsi sebagai penghubung antara pihak Belanda dengan Keraton Yogyakarta yang harus mengabdi kepada kedua belah pihak. Pada kenyataannya, Pepatih Dalem justru menjadi alat Belanda untuk mengatur kekuasaan sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Keraton.

20 Dewan Penasihat merupakan sebuah lembaga legislatif atau perwakilan yang anggotanya dipilih oleh sultan dan Belanda. Pada kenyataannya, sultan harus mendapatkan persetujuan Belanda terlebih dahulu dalam menunjuk anggota dewan tersebut.

Jenderal dan pihak Batavia akhirnya menyetujui anggaran yang besar tersebut karena menganggap bahwa kebutuhan ekonomi tersebut memang dibutuhkan. Meskipun demikian, selama beberapa tahun pihak pemerintah kolonial tidak mengetahui secara pasti anggaran tersebut digunakan untuk apa oleh kesultanan, khususnya oleh oleh sultan.

Sungguhpun demikian, salah satu penyebab tidak ditemukannya kata sepakat dalam penyusunan kontrak politik tersebut adalah harapan Dorodjatun yang tidak ingin kekuatan Keraton Yogyakarta diperlemah oleh Belanda. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa gagasan ala Barat Dorodjatun mulai diimplementasikan. Terkait dengan urusan anggaran, Dorodjatun berhasil meyakinkan pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial melakukan pembayaran kepada sultan senilai 1.230.000 gulden pada tahun 1940 dan 1941, dan kemudian dikurangi secara perlahan hingga tahun 1960. Meskipun demikian, pihak pemerintah kolonial hanya melakukan kontrol atau memantau terhadap penggunaan anggaran tersebut selama lebih dari dua tahun saja.[21] Akhir dari penyusunan kontrak politik tersebut terjadi ketika

---

21 Dari kondisi tersebut, terlihat bahwa Dorodjatun dan kesultanan cukup bergantung pada anggaran pemerintah kolonial sebagai daerah jajahan. Bahkan Dorodjatun mencoba untuk memanfaatkan anggaran yang diterima dari pemerintah kolonial untuk membiayai segala aktivitas yang ada di kesultanan, termasuk gaji untuk dirinya sebagai seorang sultan. Tidak sedikit penguasa atau bangsawan yang mendapatkan gaji besar dari pemerintah kolonial. Selengkapnya lihat John Monfries, *A Prince in a Republic: The Life of Sultan Hamengku Buwono IX of Yogyakarta,* Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2015, hal. 73-79.

Dorodjatun mendapatkan *wisik* atau bisikan gaib yang dipercaya berasal dari nenek moyangnya. Bisikan tersebut berbunyi "*Tole, tekena wae, Landa bakal lunga saka bumi kene*" atau "Nak, tanda tangani saja, Belanda akan pergi dari tanah ini".

Tanggal 18 Maret 1940 adalah hari bersejarah bagi Keraton Yogyakarta. Ada dua peristiwa penting yang terjadi saat itu di Keraton Yogyakarta yaitu pengangkatan Dorodjatun sebagai putra mahkota dan penobatan dirinya sebagai Sri Sultan HB IX. Gubernur Adam sebagai pihak perwakilan Belanda pada saat itu mengangkat Dorodjatun sebagai putra mahkota dengan gelar *Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putra Narendra Mataram*. Lima menit kemudian, sang putra mahkota dinobatkan sebagai raja dengan gelar *Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah Kaping IX*. Dengan demikian, Dorodjatun kini telah resmi menjadi Sri Sultan HB IX yang kelak membawa perubahan, baik di dalam maupun di luar Keraton.

Salah satu bagian penting dari rangkaian kegiatan penobatan seorang raja adalah pidatonya. Setiap raja yang dinobatkan setidaknya memberikan sedikit pidato terkait pandangannya ke depan selama menjabat sebagai seorang raja. Pidato inilah yang menjadi salah satu acuan Sri Sultan HB IX dalam membuat sebuah keputusan dan kemudian diimplementasikan ke dalam tindakan nyata. Hal tersebut sesuai dengan istilah *Sabda Pandhita Ratu tan keno wola-wali*, yang berarti bahwa perkataan raja tidak bisa dicabut kembali

dan harus dilaksanakan sesuai dengan perkataannya tersebut. Adapun pidato Sri Sultan HB IX sebagai berikut:

> *"Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, tetapi pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Maka selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat utama dalam Kraton yang kaya akan tradisi ini. Izinkan saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya."*[22]

Dari pidato tersebut ada dua hal utama yang ingin disampaikan oleh Sri Sultan HB IX. Pertama, sebagai seorang tokoh yang telah hidup dan mengenyam pendidikan di Eropa khususnya Belanda, ia ingin mempertemukan "jiwa Barat" (ide-ide demokrasi) dan "Timur" tersebut supaya dapat berjalan berdampingan. Inilah yang kemudian mempengaruhi tindakan Sri Sultan HB IX untuk melakukan pembaharuan. Kedua, Sri Sultan HB IX adalah sosok republiken yang ingin terbebas dari belenggu penjajahan. Oleh karena itu, dia ingin mengabdikan dirinya untuk kepentingan nusa dan bangsa, khususnya wilayah kekuasaannya (Jawa).

---

22 Lihat Atmakusumah (ed), *op.cit.*, hal. 47

Pada tahun 1942, Jepang mulai memasuki Indonesia dan kemudian berhasil menduduki Yogyakarta. Salah satu strategi politik yang dilakukan Belanda untuk tetap memiliki pengaruh di Indonesia yaitu dengan mengajak Sri Sultan HB IX untuk mengungsi ke Australia. Tawaran tersebut ternyata justru ditolak Sri Sultan HB IX. Malahan, kedatangan Jepang justru dimanfaatkan Sultan untuk mengambil alih tugas Pepatih Dalem dengan tujuan mengembalikan kekuasaannya.[23] Selain itu, Sultan juga memecah jabatan Pepatih Dalem menjadi enam jawatan (semacam kementerian) pada 1944 dan kemudian menjadi tujuh jawatan pada 1945. Pengambilalihan peran Pepatih Dalem itu menjadi kunci Sultan untuk bisa hadir di hadapan publik secara langsung dan mendapatkan apresiasi besar dari publik.[24]

Selain itu, pada 1944, Sri Sultan HB IX juga membuat terobosan baru di lingkungan birokrasi Yogyakarta. Sri Sultan HB IX memutuskan bahwa orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan di dalam birokrasi tidak ditentukan dari keturunan, tetapi ditentukan melalui ujian saringan.

---

23 Inisiatif Sultan HB IX tersebut disetujui pihak Jepang secara langsung karena Jepang tidak terlalu paham tentang peran Pepatih Dalem. Selengkapnya lihat Benedict Anderson, *Java in a time of revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946,* Cornell University Press, Ithaca N.Y., 1972.

24 Selama masih ada jabatan Pepatih Dalem yang dipegang orang lain, kehadiran Sultan di hadapan publik terbatas di kegiatan-kegiatan tertentu seperti *Gerebeg.* Ketika jabatan itu dihapus, Sultan HB IX dengan leluasa bisa bertemu langsung dengan rakyatnya. Kondisi itu berdampak serius pada persepsi masyarakat. Mereka mengapresiasi langkah sultan tersebut dengan loyalitasnya kepada Sultan. Lihat Bayu Dardias Kurniadi, *op.cit.*, hal. 194-195.

Selain itu, penentuan *Paniradya* (semacam menteri) juga tidak ditentukan berdasarkan keningratan, tetapi dipilih berdasarkan keahliannya. Selanjutnya, salah satu bentuk keputusan Sri Sultan HB IX yang terkenal pada zaman Jepang adalah tawaran untuk membangun saluran irigasi dikenal dengan nama Selokan Mataram.[25] Langkah tersebut dilakukan Sri Sultan HB IX dengan cara memalsukan statistik penduduk (termasuk pertanian) supaya Jepang memberikan bantuan ke Yogyakarta.[26]

## Langkah Politik di Era Kemerdekaan

### *Menjadikan Yogyakarta Sebagai Bagian dari Republik*

Pada zaman penjajahan Belanda, Yogyakarta dan Surakarta adalah wilayah *Voorstenlanden*. Hal ini berarti, Yogyakarta dan Surakarta merupakan daerah istimewa karena tetap menjadi bagian dari wilayah jajahan pemerintah kolonial Belanda dengan skema jajahan tidak langsung.[27] Dengan kata lain, Yogyakarta pada saat itu bukan merupakan bagian dari Republik Indonesia yang kemerdekaannya diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Pun demikian, Yogyakarta yang saat itu dipimpin oleh Sri Sultan HB IX telah mengetahui bahwa Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa inilah

---

25 Selengkapnya lihat Moedjanto, *Sukarno, Hatta, dan Hamengkubuwono IX,* Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2014, hal. 92.

26 Lihat Atmakusumah (ed), *op.cit.,* hal. 57.

27 Lihat Parni Hadi dan Nasyith Majidi (ed), *Hamengku Buwono IX: Inspiring Prophetic Leader,* IRSI, Jakarta, 2013, hal. 98.

yang ditunggu dan diprediksi sebelumnya oleh Sri Sultan HB IX bahwa Jepang hanya akan berada di Indonesia dalam jangka waktu 3,5 tahun.

Setelah penantian terhadap kemerdekaan Indonesia tercapai, langkah selanjutnya yang dilakukan Sultan adalah mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia yang dikirim melalui kawat pada tanggal 18 Agustus 1945. Dua hari kemudian, tanggal 20 Agustus 1945, Sri Sultan HB IX mengirim telegram kembali kepada Presiden RI yang berisi bahwa Sri Sultan HB IX sanggup berdiri di belakang pimpinan yakni Presiden dan Wakil Presiden RI. Pernyataan tersebut kemudian diikuti oleh Paku Alam VIII dengan isi yang sama.[28] Soekarno kemudian memberikan piagam penetapan kepada Kasunanan, Mangkunegaran, Kasultanan, dan Pakualaman yang menjelaskan bahwa keempat wilayah tersebut akan mencurahkan usahanya kepada republik.

Pada tanggal 1 September 1945, penguasa Kasunanan dan Mangkunegaran memproklamasikan bahwa daerah kekuasaannya menjadi bagian dari republik. Selanjutnya, langkah yang sama juga diambil oleh Kasultanan dan Pakualaman. Salah satu bukti nyata bahwa Yogyakarta kemudian menjadi bagian dari republik adalah munculnya

---

28 Paku Alam VIII yang lahir dengan nama BRMH Soerjo Soelarso Koento Soeratno tersebut nantinya juga mendapatkan piagam kedudukan dari presiden Republik Indonesia pada 6 September 1945. Selengkapnya lihat Djoko Dwiyanto, *Puro Pakualaman: Sejarah, Kontribusi, dan Nilai Kejuangannya,* Paradigma Indonesia, Yogyakarta, 2009, hal. 87-89.

Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII. Ada tiga hal penting yang terdapat di dalam amanat tersebut. Pertama, Yogyakarta berbentuk kerajaan yang merupakan bagian dari RI dan bersifat istimewa. Kedua, segala urusan pemerintahan dan kekuasaan dalam negeri berada di tangan Sri Sultan HB IX. Ketiga, hubungan antara Yogyakarta dan RI bersifat langsung dan Sri Sultan HB IX juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia (RI).

Perlu digarisbawahi bahwa langkah yang diambil Sultan HB IX tidak lain adalah untuk mempertahakan wilayah kekuasaannya sendiri. Amanat tersebut dikeluarkan tepat setelah pemerintah pusat mendirikan delapan provinsi dan menunjuk gubernur dari masing-masing provinsi tersebut.[29] Pada saat itu, Yogyakarta menjadi bagian dari provinsi Jawa Tengah. Supaya kekuasaan kesultanan tidak berkurang sedikit pun di bawah kekuasaan pemerintah pusat melalui Gubernur Jawa Tengah, maka Sultan HB IX mengambil langkah nyata untuk memproklamasikan dirinya sebagai penguasa Yogyakarta dan akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Perlu juga dicatat bahwa hanya Yogyakarta yang menjadi bagian dari RI ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) didirikan.

---

29 Selengkapnya lihat Bibit Suprapto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia,* PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 19.

### *Membuat Politik Balas Budi kepada Republik*

Pada 1946, Belanda kembali melakukan agresi ke Indonesia dengan menduduki Jakarta yang pada saat itu telah menjadi ibu kota republik. Keadaan darurat itu yang kemudian membuat Sri Sultan HB IX menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota sementara ketika Belanda menduduki Jakarta. Soekarno, Hatta, dan beberapa pemimpin negara lainnya kemudian mengungsi ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api secara diam-diam pada awal bulan Januari 1946. Semenjak itulah kemudian Ibu Kota RI berpindah ke Yogyakarta. Sesampainya di Yogyakarta, kedua pemimpin RI tersebut kemudian disambut oleh Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII sebagai pemimpin Yogyakarta yang sah pada waktu itu. Bahkan, tempat tinggal para pemimpin republik tersebut telah dijamin oleh Sri Sultan HB IX.

Ada beberapa alasan yang membuat Yogyakarta disetujui untuk menjadi tempat ibu kota republik untuk sementara waktu. Pertama, Yogyakarta terletak di Jawa bagian tengah sehingga cukup jauh untuk dijangkau musuh. Kedua, transportasi dari Yogyakarta ke berbagai daerah bisa dijangkau melalui jalur darat dan udara. Ketiga, mudahnya akses sarana komunikasi seperti radio dan telegram. Keempat, adanya markas besar tentara di Yogyakarta di bawah komando Panglima Besar Jendral Sudirman. Selain itu, di Yogyakarta juga terdapat Tentara Rakyat Mataram yang dibentuk oleh Sri Sultan HB IX. Keempat, suasana di Yogyakarta cukup revolusioner untuk menghadapi segala bentuk penjajahan.[30]

---

30 Selengkapnya lihat Moedjanto, *op.cit.,* hal. 95.

Ketika Belanda memasuki Yogyakarta, beberapa pemimpin negara seperti Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim, Sutan Sjahrir, dan lain sebagainya diasingkan oleh Belanda. Selama berada di tempat pengasingan, Belanda juga memberlakukan tahanan rumah bagi Sri Sultan HB IX yang geraknya dibatasi oleh Belanda (hanya boleh beraktivitas di dalam wilayah Keraton Yogyakarta). Dengan kondisi seperti itu, maka kemudian Sri Sultan HB IX membuat sebuah strategi politik dengan tujuan untuk mengelabui pihak Belanda. Strategi yang digunakan pada saat itu yaitu dengan menyebarkan isu bahwa Sri Sultan HB IX mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala daerah sehingga yang bertanggung jawab atas daerah Yogyakarta adalah pihak Belanda (apabila terjadi kekacauan).

Selanjutnya, komitmen Sri Sultan HB IX terhadap RI juga dibuktikan dengan membiayai para pegawai republik yang bekerja di Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan supaya pegawai republik tidak berpindah ke pihak Belanda dan tetap berada di pihak RI. Selain itu, Sri Sultan HB IX juga memberikan bantuan kepada keluarga para pemimpin republik seperti istri Hatta dan istri Soekarno. Adapun uang yang diberikan kepada para pihak republik berasal dari kekayaan Keraton Yogyakarta demi keberlangsungan republik. Hal tersebut sejatinya bisa dilihat sebagai cara Sultan HB IX untuk merancang sebuah politik balas budi yang nantinya akan berguna bagi keberlanjutan Yogyakarta sebagai sebuah daerah yang istimewa di bawah sistem republik.

***Sultan Merancang Serangan Umum 1 Maret 1949***

Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah salah satu serangan yang dilancarkan oleh pasukan republik terhadap Belanda di Yogyakarta yang memiliki makna penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Salah satu hal yang mencuat untuk diperbincangkan dalam peristiwa itu adalah aktor intelektual atau inisiator dari serangan tersebut. Perdebatan tersebut kemudian memunculkan beberapa versi terkait hal tersebut. Tiga versi yang dimaksud adalah versi Sri Sultan HB IX, Soeharto, dan Bambang Soegeng. Di era Orde Baru, Soeharto dengan bangga menyebut dirinya sebagai inisiator dari serangan itu hingga ia membuat film yang merupakan reka ulang Serangan Umum 1 Maret 1949 dengan judul Janur Kuning.

Setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap dokumen-dokumen terkait serangan tersebut, sampailah pada kesimpulan bahwa Sri Sultan HB IX adalah inisiator dari serangan itu. Inisiatif serangan tersebut muncul ketika Sri Sultan HB IX mendengarkan radio luar negeri (BBC) bahwa pada akhir Februari 1949 akan dilaksanakan pembicaraan antara Indonesia dan Belanda di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh karena itu, Sri Sultan HB IX kemudian menemukan cara untuk membuktikan kepada dunia luar bahwa republik dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih ada, sekaligus membangkitkan semangat rakyat yang kian melemah. Akhirnya, pada tanggal 13 Februari 1949, Sri Sultan HB IX melakukan pertemuan tertutup dengan Letkol Soeharto untuk mempersiapkan sebuah serangan umum.

Dalam kesaksian GBPH Prabuningrat (kakak Sri Sultan HB IX), pada tanggal 13 Februari 1949 tersebut, Soeharto diantarkan oleh GBPH Prabuningrat ke tempat tinggalnya di Keraton dengan menggunakan pakaian abdi dalem.[31] Hal tersebut dilakukan supaya tidak dicurigai oleh Belanda bahwa ada seorang petinggi militer masuk ke dalam lingkungan Keraton. Saksi lain yang mempersiapkan pertemuan empat mata tersebut selain GBPH Prabuningrat adalah Hendro Budjono (abdi dalem penanggung jawab bagian dapur) dan Lettu Marsoedi (perwira intel).[32] Bahkan, dalam rekaman radio BBC, Sri Sultan HB IX menjelaskan secara rinci kronologi tercetusnya Serangan Umum 1 Maret 1949. Dalam rekaman tersebut dijelaskan bahwa sebelum mengundang Soeharto ke Keraton, Sri Sultan HB IX terlebih dahulu meminta izin kepada Jendral Sudirman untuk diadakan sebuah serangan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah jelas bahwa Sri Sultan HB IX merupakan inisiator dari Serangan Umum 1 Maret 1949, meskipun Soeharto juga memiliki peran penting sebagai pemimpin serangan tersebut. Hal lain yang menguatkan bahwa Sri Sultan HB IX terlibat dalam serangan tersebut yaitu karena ia adalah pemimpin Yogyakarta yang disegani baik oleh rakyat, maupun oleh pihak Belanda. Oleh karena itu, tidak mungkin sebuah serangan yang dilakukan di daerahnya (Yogyakarta) tidak diketahuinya. Dengan adanya serangan tersebut, maka Belanda memutuskan untuk keluar dari Yogyakarta pada Juni 1949 sesuai isi Konferensi

31 Lihat Atmakusumah (ed.), *op.cit.,* hal. 186.

32 Lihat Julius Pour dan Nur Adji (ed.), *op.cit.,* hal. 78.

Meja Bundar (KMB). Pada saat penyerahan kedaulatan dari Belanda, Sri Sultan HB IX menjadi perwakilan Indonesia dalam penandatanganan penyerahan kedaulatan tersebut. Dengan berakhirnya kekuasaan Belanda tersebut, maka Ibu Kota Indonesia dikembalikan ke Jakarta.

**Karir Politik Sri Sultan HB IX**

Pada tahun 1946, ketika Ibu Kota Republik Indonesia dipindah ke Yogyakarta, seluruh elite pemerintahan republik juga meninggalkan Jakarta dan berbondong-bondong menuju Yogyakarta. Karir politik pertama yang didapatkan oleh Sri Sultan HB IX adalah sebagai Menteri Negara pada Kabinet Sjahrir III. Sebelumnya, ketika Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menyatakan bahwa kedua kerajaan tersebut menjadi bagian dari RI, Sri Sultan HB IX secara otomatis menjadi pemimpin daerah Yogyakarta bersama dengan Paku Alam VIII sebagai wakilnya. Hadirnya Sultan HB IX sebagai penguasa tersebut sebenarnya atas kehendaknya sendiri, bukan karena amanat atau piagam penetapan dari pihak lain.

Pada tahun 1947, Kabinet Sjahrir III digantikan oleh Kabinet Amir Sjarifuddin I. Di dalam kabinet tersebut, Sri Sultan HB IX kembali dipercaya sebagai Menteri Negara. Jabatan tersebut juga tetap disandang oleh Sri Sultan HB IX pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin II hingga pada tahun 1948. Selanjutnya, karir politik Sri Sultan HB IX sebagai Menteri Negara yang terakhir yaitu ketika Sri Sultan HB IX berada di dalam Kabinet Hatta I pada tahun 1948 sampai dengan tahun 1949. Pasca Serangan Umum 1 Maret 1949, Sri Sultan HB IX dipercaya sebagai Menteri Pertahanan atau

Koordinator Bidang Keamanan Dalam Negeri dalam Kabinet Hatta II. Pada saat itulah Sri Sultan HB IX memiliki peran penting dalam mengembalikan keamanan di Yogyakarta sebagai ibu kota sementara.

Sebagai menteri pertahanan, Sri Sultan HB IX pada saat itu diberi kekuasaan penuh oleh Soekarno untuk menerima kembali kekuasaan dari tangan Belanda, baik secara sipil maupun militer.[33] Salah satu hal yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX adalah memastikan bahwa penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta pada bulan Juni 1949 berjalan secara lancar. Setelah para pemimpin republik kembali ke Yogyakarta, Soekarno dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada saat itu, Sri Sultan HB IX kembali dipercaya sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Hatta pada era RIS. Peran penting Sri Sultan HB IX kembali terlihat ketika Sri Sultan HB IX bersama dengan Nasution mengunjungi beberapa negara bagian untuk melakukan koordinasi dan penetapan pimpinan keamanan di masing-masing daerah.

Selanjutnya, pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1951, Sri Sultan HB IX diangkat sebagai wakil perdana menteri dalam Kabinet Natsir. Setahun kemudian, pada tahun 1952, Sri Sultan HB IX kembali dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Wilopo hingga tahun 1953. Pada rentang 1954 sampai 1962, Sri Sultan HB IX tidak menjabat sebagai menteri. Namun, dirinya kembali

---

33 Lihat Aan Ratmanto, *Mengawal Transisi Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Pemerintahan Transisi Republik Indonesia di Yogyakarta 1949,* Atap Buku dan Mata Padi Presindo, Yogyakarta, 2012, hal. 34.

mendapatkan jabatan terakhir di era Soekarno sebagai ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 1963-1964 karena sosoknya yang terkenal bersih dan tegas.

Pada masa Orde Baru, Sri Sultan HB IX dianggap memiliki peran yang cukup penting dalam mengembalikan perekonomian Indonesia. Semenjak Soekarno digantikan oleh Soeharto, Indonesia mengalami hiperinflasi hingga ratusan persen. Perekonomian Indonesia lesu dan hubungan dengan negara-negara lain juga tidak rekat, termasuk keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam upaya mengembalikan perekonomian dan citra Indonesia di mata dunia, peran Sri Sultan HB IX tidak dapat diabaikan. Sri Sultan HB IX bersama dua tokoh nasional lainnya yaitu Soeharto dan Adam Malik yang kemudian disebut sebagai tiga serangkai (*triumvirat*) menjadi kelompok vital bagi Orde Baru untuk mengembalikan perekonomian Indonesia.

Tugas yang dilakukan Sri Sultan HB IX sebagai Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) adalah mengembalikan perekonomian Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Salah satu cara yang dilakukan Sri Sultan HB IX adalah melakukan promosi ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Belanda dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, Sri Sultan HB IX juga berperan penting dalam negoisasi ulang terhadap pembayaran hutang-hutang yang dimiliki oleh Indonesia kepada negara lain, termasuk hutang-hutang yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Semua hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan

sumber pendapatan akibat krisis yang melanda pada tahun 1966.

Sebagai hasil dari usahanya tersebut, beberapa negara yang dikunjungi oleh Sri Sultan HB IX telah sepakat untuk melakukan penjadwalan ulang terhadap hutang luar negeri Indonesia pada forum Paris Club dan kemudian membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan forum *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI) pada tahun 1967.[34] Dengan terbentuknya forum tersebut, Indonesia mendapatkan bantuan dana dari beberapa negara yang tergabung di dalam forum tersebut. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Indonesia mengeluarkan paket kebijakan ekonomi dengan membuat undang-undang tentang penanaman modal asing, koperasi, dan penanaman modal dalam negeri.

Perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX pada tahun 1966-1968 mulai terlihat ketika bantuan luar negeri mengalir dalam bentuk bantuan kredit devisa, bantuan pangan, bantuan proyek dan teknik, serta ketika pembangunan di Indonesia secara lebih merata.[35] Hal tersebut ditandai dengan banyaknya pemohon atau investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Belanda. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan bantuan dana dari beberapa negara maju dan *International Monetary*

---

34 Lihat Parni Hadi dan Nasyith Majidi (ed), *op.cit.*, hal. 95-96.

35 Selengkapnya lihat Tino, *Hamengkubuwono IX: Dari Serangan Umum 1 Maret sampai Melawan Soeharto, Benarkah Hamengkubuwono IX Anggota CIA?,* Navila Idea, Yogyakarta, 2010, hal. 136.

*Fund* (IMF) yang dinamakan sebagai IGGI. Adapun bantuan dana yang didapatkan Indonesia terus naik angkanya yaitu sebesar $363,3 juta pada tahun 1968, sebesar $601,9 juta tahun 1970, dan sebesar $856,1 juta tahun 1973.[36]

Salah satu jabatan tertinggi yang pernah dimiliki oleh Sri Sultan HB IX adalah menjadi wakil presiden Indonesia pada tahun 1973 hingga tahun 1978. Salah satu alasan Soeharto memilih Sri Sultan HB IX yaitu meskipun Sri Sultan HB IX adalah seorang bangsawan dalam budaya Jawa, tetapi sultan pro terhadap rakyat. Secara politis, dipilihnya Sri Sultan HB IX sebagai pendamping Soeharto tentu saja untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki oleh Orde Baru. Sosok yang memiliki kepercayaan dan wibawa yang besar di masyarakat tentu menjadi pilihan Soeharto. Sebagai wakil presiden, Sri Sultan HB IX juga memiliki peran yang sama dalam memimpin pembangunan Indonesia selama lima tahun.

Adapun kabinet yang dipimpin oleh Soeharto dan Sri Sultan HB IX yaitu Kabinet Pembangunan II yang terdiri dari 17 menteri yang memimpin departemen dan 5 menteri negara. Fokus pembangunan yang kemudian dikemas dalam Program Pembangunan Lima Tahunan (PELITA) tersebut membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Ketika Sri Sultan HB IX menjabat sebagai wakil presiden, dirinya juga menjalankan dua kali program PELITA yaitu PELITA I pada tahun 1969-1974 dan PELITA II pada tahun 1974-1975. Dampak dari program PELITA I bisa dilihat dari adanya

36 *Ibid.*, hal. 137.

pertumbuhan di sektor pertanian (40,1%), pertambangan (9,6%), industri (9,8%), proyek pembangunan (3,8%), dan perhubungan (4,1%).[37] Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi juga terus berlangsung pada program PELITA yang kedua.

Pada tahun 1978, Sri Sultan HB IX memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai wakil presiden mendampingi Soeharto. Salah satu alasan yang dikemukakan Sri Sultan HB IX pada waktu itu karena kondisi kesehatannya (mata) yang tidak memungkinkan dirinya untuk menjabat sebagai wakil presiden kembali. Di sisi lain, banyak pengamat yang menilai bahwa keengganan Sri Sultan HB IX untuk menjabat sebagai wakil presiden kembali yaitu karena politik yang dilakukan Soeharto cenderung mengarah kepada kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Hal itu dilakukan supaya sultan tidak terkena imbas dari perilaku Soeharto yang dinilai bertentangan dengan norma masyarakat. Oleh karena itu, Adam Malik kemudian tampil sebagai pengganti Sri Sultan HB IX mendampingi Soeharto pada tahun 1978.

## Sultan Tutup Usia

Selepas tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden Indonesia, Sri Sultan HB IX tetap setia untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Hal tersebut bisa dilihat dari aktifnya Sri Sultan HB IX di bidang kepanduan dan olahraga. Dalam bidang kepanduan, Sri Sultan HB IX pernah mendapatkan penghargaan tertinggi berupa *The Bronze Wolf*. Bahkan Sri Sultan HB IX juga disebut sebagai Bapak Pramuka Indonesia

37 Lihat Tino, *op.cit.,* hal. 159.

oleh beberapa kalangan. Penghargaan di bidang olahraga juga didapatkan oleh Sri Sultan HB IX karena jasanya yang telah mengangkat prestasi olahraga di kancah dunia ketika menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Perjalanan hidup Sri Sultan HB IX ditutup ketika dirinya sedang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Oktober 1988, Sri Sultan HB IX menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit George Washington University. Pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 1988, Sri Sultan HB IX dimakamkan di Pemakaman Imogiri (bagian Astana Saptarengga) yaitu tempat peristirahatan terakhir raja-raja keturunan Mataram, khususnya raja dari Surakarta dan Yogyakarta. Adapun kereta yang digunakan untuk mengantar jenazah Sri Sultan HB IX ke tempat peristirahatan terakhir adalah Kereta Kyai Rata Pralaya yang merupakan kereta peninggalan Sri Sultan Hamenku Buwono VIII.

## Catatan Akhir: Menjadi Demokratis Adalah Sebuah Tuntutan Zaman

Realitas sosial dan historis yang dialami oleh Sri Sultan HB IX saat itu adalah suasana kolonialisme, baik di Indonesia ataupun Eropa. Masa kecil dan remajanya ia lewatkan bersama beberapa keluarga Belanda. Ia juga telah merasakan atmosfer atau kondisi sosial di Negeri Belanda selama tujuh tahun. Selama berada di Belanda, Sri Sultan HB IX yang belajar di Jurusan Indologi tersebut memahami secara perlahan tentang sistem pemerintahan di Belanda. Saat itu, Belanda memberikan contoh yang baik tentang lembaga perwakilan

ataupun koalisi pemerintahan supaya bisa mengakomodasi berbagai sudut pandang, kebebasan untuk berbicara dan berkumpul, monarki konstitusional untuk keluarga kerajaan, juga masyarakat berdasarkan hukum.[38]

Tidak hanya berkaca pada sistem pemerintahan di Eropa khususnya di Belanda, Dorodjatun juga menyadari bahwa arus demokratisasi akan merambah ke negara-negara di wilayah Asia Tenggara, termasuk Yogyakarta yang pada saat itu berada di kawasan Indonesia yang dahulu dikenal sebagai Hindia Belanda. Selanjutnya, meskipun Sri Sultan HB IX tidak terlalu dekat dengan tokoh-tokoh nasional yang juga menuntut ilmu di Belanda, ia mengetahui bahwa mereka (para tokoh nasional) sedang menyiapkan sebuah pergerakan nasional untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda. Oleh karena itu, ia mencoba untuk menunjukkan rasa nasionalismenya dengan memasang bendera merah putih kecil di depan mobilnya ketika berada di Belanda.

Secara spesifik, realitas sosial dan historis yang dialami oleh Sri Sultan HB IX tersebut bisa dibaca dalam tiga hal yang berbeda tetapi saling mempengaruhi, yaitu kognisi, interaksi, dan kebutuhan untuk aksi. Ketiga hal inilah, yang menuntun kita untuk bisa mengetahui bagaimana preferensi dan pembuatan keputusan yang diambil oleh Sri Sultan HB IX sangat mungkin terjadi. Ketiganya menjadi jembatan untuk melihat bagaimana pembuatan keputusan Sri Sultan HB IX dari sudut pandang politik.

---

38 Lihat John Monfries, *op.cit.*, hal. 48.

Kognisi adalah sebuah proses untuk mendapatkan pengetahuan, termasuk membangun kesadaran dan perasaan. Dalam konteks itu, semenjak dititipkan di keluarga Belanda, baik di Yogyakarta, Semarang, maupun Bandung, hingga di Belanda, Sri Sultan HB IX mendapatkan banyak pengetahuan baru terkait karakter dan cara hidup orang Belanda. Adapun karakter yang dimiliki orang Belanda pada saat itu adalah rasional, bebas, mandiri, progresif, dan demokratis.[39] Setelah kembali ke Yogyakarta dan dinobatkan menjadi raja, banyak pengetahuan baru yang didapatkan, salah satunya terkait ajaran kepemimpinan Jawa. Ajaran yang lebih besar juga didapatkan oleh Sri Sultan HB IX yaitu terkait ajaran dewa yang disebut dengan Asthabrata.[40] Dengan adanya pengetahuan sejarah Mataram yang dimilikinya, ia menjadikan Sultan Agung sebagai sumber inspirasi dalam mengambil keputusan politik.[41]

Sementara itu, interaksi dimaknai sebagai hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dalam konteks itu, interaksi dialami oleh Sri Sultan HB IX, baik dengan

---

39 Lihat Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *op.cit.,* hal. 110.

40 Ajaran Asthabrata yaitu ajaran para dewa yang terdiri dari suka mengajar (Dewa Endra), benci kepada kejahatan (Dewa Yama Wicaksuh), hemat (Dewa Surya), pandai olah asmara (Dewa Candra), rajin (Dewa Bayu), mendekatkan diri pada Tuhan (Dewa Wisnu), keras terhadap musuh (Dewa Brahma), kesatria (Dewa Baruna). Selengkapnya lihat Julius Pour dan Nur Adji (ed), *op.cit.,* hal. 163-164.

41 Lihat Sunardian Wirodono, *Sri Sultan Hamengku Buwono IX: Penjaga Demokrasi Indonesia,* Yayasan Wiwara, Yogyakarta, 1989, hal. 18.

keluarga Keraton, orang Belanda, maupun tokoh pergerakan nasional. Interaksi yang dilakukan dengan keluarga Keraton pada awalnya hanya didapatkan oleh Sri Sultan HB IX sebelum dirinya dititipkan kepada keluarga Belanda. Dengan adanya interaksi tersebut, Sri Sultan HB IX mengetahui secara lebih banyak tentang kehidupan orang Jawa, khususnya adat istiadat yang ada di Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, interaksi Dorodjatun dengan orang Belanda, dibangun baik selama di Indonesia ataupun di Belanda. Munculnya interaksi antara Sri Sultan HB IX dan orang Belanda merupakan strategi Sri Sultan HB VIII agar anaknya mendapatkan banyak manfaat dari pendidikan modern, termasuk untuk menyelami karakter orang Belanda.[42]

Selain interaksi dengan lingkungan Keraton dan orang Belanda, Sri Sultan HB IX juga melakukan interaksi dengan beberapa tokoh pergerakan nasional. Menurut Harry Tjan, afiliasi politik Sri Sultan HB IX lebih dekat dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Sutan Sjahrir, Amir Sjarifuddin, dan Hatta karena mereka berpendidikan Barat.[43] Selama berada di Belanda, Sri Sultan HB IX memang jarang berinteraksi dengan tokoh pergerakan nasional, dan baru melakukan interaksi secara intensif setelah ia dinobatkan menjadi raja, khususnya pada masa ibu kota republik dipindahkan ke Yogyakarta.

---

42 Lihat Modjanto, *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman: Tinjauan Historis Dua Praja Kejawen Antara 1755-1992,* Kanisius, Yogyakarta, 1994, hal. 21.

43 Lihat Parni Hadi dan Nasyith Majidi (ed), *op.cit.,* hal. 232.

Ketiga, kebutuhan untuk aksi tersebut diperlihatkan oleh Sri Sultan HB IX ketika dirinya menuntut ilmu di Belanda.[44] Saat itu Sri Sultan HB IX pada dasarnya telah menyusun rencana demokratisasi yang akan diterapkan di Yogyakarta ketika dirinya masih menuntut ilmu di Belanda. Gagasan Sri Sultan HB IX yang visioner menjadi salah satu faktor dibuatnya rancangan demokratisasi di Yogyakarta. Gagasan untuk melakukan demokratisasi tersebut pada dasarnya juga merupakan strategi Sultan untuk mempertahankan kekuasaan monarki Keraton Yogyakarta. Selain itu, kebutuhan aksi untuk mempertahankan eksistensi Keraton tersebut juga dipengaruhi oleh pengamatannya terhadap negara-negara lain dengan sistem monarki yang pada akhirnya eksistensinya harus hilang ketika diterpa oleh gelombang demokratisasi.

Dari beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, bisa disimpulkan bahwa pendidikan Barat yang didapatkan oleh Sri Sultan HB IX membuat pemikirannya lebih progresif, demokratis, terbuka terhadap hal baru, dan memiliki gagasan pembaharuan. Hal tersebut tidak lain adalah strategi Sri Sultan HB VIII dalam rangka menghadapi Belanda yang ketika itu merupakan pemerintah kolonial di Yogyakarta. Faktor sosial historis yang terdiri dari aspek kognisi, interaksi, dan kebutuhan untuk aksi tersebut menjadi hal penting yang dapat mempengaruhi pemikiran Sri Sultan HB IX dalam melakukan demokratisasi di Yogyakarta. Perpaduan antara budaya Barat

---

44 Lihat Presentasi Majalah Tempo, *Sri Sultan, hari-hari Hamengku Buwono IX: Sebuah Presentasi Majalah Tempo,* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1988, hal. 75.

dan Jawa yang melekat di dalam diri Sri Sultan HB IX tersebut kemudian diejawantahkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang bercorak demokratis, khususnya dalam kapasitasnya sebagai seorang sultan dan seorang kepala daerah.

Setelah memperoleh faktor-faktor sosial historis yang mempengaruhi tindakan demokratis Sri Sultan HB IX tersebut, maka menjadi penting untuk melacak tapak politik sang Sultan. Sepak terjang sultan tersebut nantinya dibahas berdasarkan kapasitasnya sebagai seorang raja, kepala daerah, dan politisi untuk melihat konsistensi tindakan Sri Sultan HB IX yang mencerminkan dimensi-dimensi demokrasi, yaitu partisipasi, kompetisi, dan kebebasan untuk berekspresi. Pemaparan tapak politik sang sultan tersebut tidak lain adalah untuk menjabarkan sepak terjang Sultan untuk mewujudkan kepentingannya yaitu melakukan demokratisasi demi menjaga eksistensi kekuasaannya.

# BAB 2

# TIGA TAPAK, TIGA JATI DIRI: SEPAK TERJANG SANG SULTAN

**Merancang Strategi Demokratisasi**

Sri Sultan HB IX sebagai salah satu tokoh nasional tidak bisa dilepaskan dari kehidupan unik yang dialaminya. Sultan dikenal sebagai sosok yang hidup di dua dunia. Artinya, di satu sisi ia sebagai seorang raja yang hidup di dalam adat istiadat Keraton Jawa dan di sisi lain sebagai manusia biasa yang memiliki banyak peran di berbagai bidang, baik di bidang pemerintahan maupun di luar bidang pemerintahan termasuk politik formal. Sebagai seorang raja, Sri Sultan HB IX dikenal sebagai sosok feodal yang mendapatkan kekuasaan secara turun-temurun disertai dengan gelar ningrat dan memiliki kekuasaan absolut terhadap wilayah kekuasaannya. Di sisi lain, ia dikenal sebagai sosok yang demokratis dan seorang republiken.

Kehidupan Sri Sultan HB IX yang hidup di dua dunia tersebut sejatinya sudah bisa dilihat ketika ia mulai dititipkan kepada keluarga Belanda atas inisiatif ayahnya, Sri Sultan HB VIII. Dari proses hidup tersebut, telah terlihat jelas bahwa Sri Sultan HB IX sudah dibiasakan untuk hidup di luar tembok Keraton dan jauh dari adat istiadat Keraton. Pada sisi yang lain, banyaknya waktu yang dihabiskan oleh Dorodjatun (nama kecil Sri Sultan HB IX) di luar tembok Keraton bukan berarti menghilangkan sisi keningratannya. Dalam sela-sela waktu yang dimilikinya, ia tetap berkunjung ke lingkungan aslinya yaitu lingkungan Keraton. Bahkan ia juga tidak melupakan adat istiadat yang hidup di dalam lingkungan Keraton.

Pada kondisi demikian, titik penting dalam hidup Sri Sultan HB IX yang erat kaitannya dengan rencana demokratisasi adalah fase ketika ia berada di Belanda untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Menurut Robert Ulich, pendidikan dapat berlangsung di mana saja, dan dalam bentuk apa saja termasuk segala pemandangan dan arsitektur yang dilihatnya, masyarakat yang ditemuinya, perlakuan yang diberikan, pekerjaan dan waktu luang, ideologi, propaganda, dan nilai-nilai ideal di tempat seseorang itu hidup.[45] Pendidikan yang didapatkan oleh Sri Sultan HB IX selama di Belanda itulah yang kemudian mempengaruhi tindakannya tentang segala sesuatu yang didapatkannya, khususnya terkait dengan konsep demokrasi.

Sebagai sosok yang visioner, ia yang pada saat itu masih berstatus mahasiswa di Leiden, telah merumuskan

45 Lihat Rukiyati dalam Heru Wahyukismoyo, o*p.cit.*, hal. 97.

sebuah rencana atau rancangan demokratisasi yang akan dilakukannya di Yogyakarta. Menghapus Pengadilan Darah Dalem dan memberikan otonomi di kabupaten di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir zaman pendudukan militer Jepang merupakan beberapa contoh demokratisasi yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX sesuai dengan rencana demokratisasi yang telah dibuatnya di Belanda. Sayangnya, aksi militer Belanda untuk mengobrak-abrik bangsal Kepatihan pada tanggal 22 Februari 1949 telah berhasil mengangkut dokumen-dokumen penting milik Sri Sultan HB IX berupa surat penting, naskah skripsi yang disusun ketika berada di Belanda, serta rencana lengkap dari demokratisasi desa sebagaimana telah diterapkannya pada akhir pendudukan Jepang di Yogyakarta.

Rencana demokratisasi yang digagas oleh Sri Sultan HB IX pada dasarnya juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi dunia terutama setelah Perang Dunia II. Sesudah Perang Dunia II berakhir, banyak perubahan besar yang terjadi, salah satunya adalah perubahan pada tatanan bangsa-bangsa maupun sistem-sistem politik yang dianut oleh negara-negara di dunia. Pada dasawarsa 1950-an hingga 1970-an, telah terjadi sejumlah perubahan radikal (beberapa disertai dengan kekerasan) di dalam sistem monarki dunia. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kemudian pandangan jauh Sri Sultan HB IX berbuah pada rancangan demokratisasi yang ingin dilakukannya di Yogyakarta yang notabene menerapkan sistem monarki.

Berangkat dari hal tersebut, menjadi menarik untuk menelisik kebijakan-kebijakan demokratis yang justru

muncul dari sosok yang dikenal masyarakat luas sebagai sosok feodal dan masih memegang nilai-nilai kekuasaan absolut. Meskipun Sri Sultan HB IX hidup di dalam dua dunia yang berbeda, kebijakan-kebijakan demokratis yang dilakukannya justru tidak memandang tempat dirinya berada. Dengan kata lain, Sri Sultan HB IX tetap menjalankan kebijakan-kebijakan demokratis dalam kapasitasnya sebagai seorang raja (melakukan demokratisasi di dalam keraton), seorang kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, dan politisi. Oleh karena itu, misi dari bab ini adalah melacak tapak politik dengan melihat kebijakan-kebijakan demokratis yang telah dikeluarkan oleh Sri Sultan HB IX dengan menggunakan dimensi-dimensi dari demokrasi, yaitu partisipasi, kompetisi, dan kebebasan untuk berekspresi.

**Tapak Pertama: *'Ngencengke Oyot'***

Ibarat sebuah tanaman, akar adalah bagian yang paling penting dalam proses pertumbuhan tanaman. Apabila akar dari sebuah tanaman tidak kuat, maka bisa jadi batang dan daun dari tanaman tersebut tidak akan tumbuh yang akibatnya tanaman menjadi mati. Ilustrasi ini sebenarnya bisa menggambarkan strategi Sultan dalam membentuk citra yang demokratis di mata publik. Tapak atau langkah pertama yang dilakukan sultan adalah *ngencengke oyot* (menguatkan/memperkokoh akar tanaman tersebut). Dengan kata lain, Sultan melakukan demokratisasi di lingkungan atau lingkaran yang paling vital yaitu Keraton sebagai tempat tinggalnya, termasuk di beberapa wilayah kekuasaannya. Caranya adalah

dengan mengeluarkan berbagai kebijakan demokratis dalam kapasitasnya sebagai seorang raja.

Untuk membuka dimensi partisipasi, Sultan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pembentukan panitia pembantu pamong praja tingkat *kapenawon*, memberikan pelatihan bahasa Melayu, dan memberikan fasilitas pendidikan. Pada dimensi kompetisi, sultan melakukan terobosan dengan mengadopsi *merit system* untuk jabatan birokrasi dan mekanisme pengisian dewan agung yang dilakukan melalui pemilihan. Terakhir, dimensi kebebasan untuk berpendapat dilakukan sultan dengan cara memberikan otonomi kepada seluruh kabupaten dan kota di lingkup Yogyakarta, melembagakan desa, dan mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan keluh kesahnya ke Keraton.

### *Pembentukan Panitia Pembantu Pamong Praja Tingkat Kapenawon*

Salah satu kebijakan demokratis yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah dibentuknya Panitia Pembantu Pamong Praja di tingkat *kapenawon* (kecamatan) pada tahun 1944. Pada tahun-tahun tersebut, ia mencoba untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat luas untuk turut serta dalam proses pemerintahan di semua tingkatan, termasuk tingkat kecamatan. Panitia Pembantu Pamong Praja merupakan semacam badan pertimbangan tingkat kecamatan yang anggota-anggotanya berasal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat.[46] Badan pertimbangan tersebut

46 Lihat Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *op.cit.*, hal. 222.

pada dasarnya memiliki fungsi untuk memberikan masukan-masukan secara demokratis terhadap proses pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dengan adanya badan pertimbangan tersebut, jalannya proses pemerintahan di tingkat kecamatan tidak lagi dipegang oleh satu atau beberapa orang saja, tetapi juga melibatkan peran masyarakat setempat. Hadirnya badan pertimbangan tersebut pada dasarnya juga memperkuat konsep gotong royong dan musyawarah yang sebenarnya sudah melekat lama pada diri masyarakat Yogyakarta, khususnya di daerah pedesaan. Selain itu, dibentuknya Panitia Pembantu Pamong Praja tersebut juga secara tidak langsung memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan hak-hak yang dimilikinya, khususnya hak sipil dan politik. Dengan demikian, badan tersebut secara tidak langsung juga menjadi sarana masyarakat untuk turut serta menentukan jalannya proses pemerintahan di tingkat kecamatan.

### *Memberikan Pelatihan Bahasa Melayu*

Dibesarkan di era pendudukan Belanda membuat Sri Sultan HB IX dan saudara-saudaranya tidak dapat berbahasa Melayu secara fasih. Hal itu wajar mengingat kaum bangsawan (keluarga Keraton) pada saat itu menempuh pendidikan di sekolah-sekolah milik pemerintah kolonial Belanda yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar pelajaran. Selain itu, beberapa putra Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (termasuk Dorodjatun) juga sudah dititipkan kepada keluarga Belanda sejak kecil sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Belanda, meskipun

mereka juga tidak melupakan bahasa Jawa. Sejatinya, penggunaan bahasa Belanda pada saat itu cukup vital sebagai sarana komunikasi dengan pihak Belanda supaya pihak Keraton tidak selalu dirugikan oleh pihak Belanda.

Berangkat dari hal tersebut, semenjak Belanda meninggalkan Indonesia (terutama Yogyakarta), Sri Sultan HB IX membuat kebijakan untuk membuat sebuah pelatihan bahasa Melayu bagi saudara-saudaranya. Pelatihan bahasa tersebut menjadi vital karena bahasa Melayu yang diajarkan tersebut kelak menjadi bahasa nasional yang saat ini dikenal dengan sebutan bahasa Indonesia. Adapun cara yang ditempuh oleh Sri Sultan HB IX adalah mendatangkan seorang guru privat ke Keraton.[47] Hal itu dilakukan supaya saudara-saudara Sri Sultan HB IX dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aktivitas bernegara karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu.

Pelatihan bahasa yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX pada dasarnya juga sejalan dengan perubahan yang dilakukan pada awal revolusi, yaitu mulai dipakainya bahasa Indonesia di berbagai kegiatan[48]. Lebih jauh lagi, Sri Sultan HB IX juga menggunakan bahasa Indonesia ketika sedang mengadakan sebuah rapat, baik di tingkat provinsi maupun desa. Hal ini dilakukan untuk menghormati orang-orang yang pada dasarnya tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, tetapi bisa menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, di luar acara

---

47 Lihat Julius Pour dan Nur Adji (ed.), *op.cit.,* hal. 156.

48 Lihat Moedjanto, *op.cit.,* hal. 109.

formal, Sri Sultan HB IX juga masih menggunakan bahasa Jawa apabila lawan bicaranya juga menggunakan bahasa Jawa.

### *Memberikan Fasilitas Pendidikan Bagi Semua Kalangan*

Untuk mendapatkan pengetahuan yang luas, pendidikan dibutuhkan oleh semua kalangan di Yogyakarta. Meskipun demikian, sejak zaman penjajahan, pendidikan juga menjadi salah satu alat untuk membeda-bedakan golongan lantaran dibedakannya tiap-tiap orang yang bersekolah berdasarkan status sosialnya dalam masyarakat. Misalnya, ada sekolah-sekolah tertentu yang hanya bisa dinikmati oleh golongan orang Belanda dan anak-anak ningrat atau keturunan bangsawan. Di sisi lain, ada sekolah-sekolah dengan kualitas rendah yang bisa diakses oleh golongan masyarakat biasa. Seringkali golongan masyarakat yang paling rendah tidak mendapatkan akses untuk menikmati pendidikan. Pelayanan yang diberikan setiap sekolah juga berbeda-beda, tergantung golongan kelas yang dimiliki oleh masyarakat.

Sri Sultan HB IX adalah salah satu orang yang sempat menikmati pendidikan dengan kualitas baik karena dirinya merupakan putra raja sehingga berasal dari keturunan bangsawan. Hal itu tentu berbeda dengan anak biasa yang bukan merupakan keturunan atau kerabat Keraton. Berangkat dari hal tersebut, Sri Sultan HB IX mengambil keputusan untuk mengubah kebijakan bahwa sekolah *keputran* milik kesultanan yang dulunya khusus hanya untuk anak-anak abdi dalem dibuka untuk umum.[49] Dengan demikian, seluruh anak

---

49 Lihat Julius Pour dan Nur Adji (ed), *op.cit.*, hal. 156.

dari golongan masyarakat mana pun memiliki kesempatan atau kebebasan untuk mengakses sekolah tersebut. Kebijakan tersebut secara tidak langsung telah menghapus sedikit demi sedikit segmentasi golongan di dalam masyarakat dalam mengakses pendidikan.

Salah satu kebijakan vital lainya di bidang pendidikan adalah menyediakan ruang di Keraton Yogyakarta untuk digunakan sebagai tempat kuliah bagi mahasiswa perguruan tinggi. Area Keraton yang digunakan untuk tempat kuliah yaitu kompleks Pagelaran atau Siti Hinggil, kompleks Mangkubumen atau Ngasem, dan kompleks Wijilan.[50] Selain itu, beberapa saudara Sri Sultan HB IX juga menyediakan teras rumahnya untuk dijadikan tempat kuliah mahasiswa. Perguruan tinggi yang dimaksud adalah perguruan tinggi swasta yang kemudian pada tahun 1949 diresmikan sebagai perguruan tinggi negeri dengan nama Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada titik ini, bisa dikatakan bahwa eksistensi UGM bisa jadi tidak terwujud tanpa adanya peran dari penguasa Yogyakarta saat itu, yaitu Sri Sultan HB IX[51].

Keputusan Sri Sultan HB IX untuk menyediakan kompleks Keraton sebagai tempat kuliah menjadi bukti nyata bahwa Sri Sultan HB IX peduli terhadap dunia pendidikan. Bahkan dengan pemikiran visionernya, Sultan mengetahui bahwa

---

50 *Ibid.*, hal. 22.

51 Lihat Ismu Gunadi Widodo, Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol.11, No.2, 2011, hal. 324.

bangsa Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk bersaing dengan masyarakat dunia lainnya dalam rangka menghadapi modernisasi dan globalisasi.[52] Kepeduliannya tersebut kemudian berujung pada pemberian sebidang tanah milik Keraton yang selanjutnya digunakan untuk membangun UGM. Adapun tanah yang digunakan tersebut merupakan *Sultan Ground* (SG) yang merupakan hak milik Keraton. Sampai dengan saat ini, Yogyakarta berhasil mendapatkan sebutan sebagai miniatur Indonesia karena banyaknya orang yang datang dari berbagai wilayah untuk belajar di sana.

### ***Menerapkan Konsep*** Merit System

Sebelum Sri Sultan HB IX melakukan pembaharuan dalam bidang birokrasi di Yogyakarta, hanya kaum bangsawan atau keturunan ningrat yang bisa menduduki jabatan-jabatan tinggi di dalam birokrasi pemerintahan. Dengan kata lain, tinggi rendahnya jabatan yang dimiliki seseorang cukup bergantung pada status sosial yang dimilikinya. Oleh karena itu, tidak heran apabila banyak masyarakat biasa yang tidak bisa menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan di Yogyakarta. Di sisi lain, bisa mendapatkan jabatan di dalam birokrasi pada zaman itu menjadi kebanggaan tersendiri, khususnya untuk mengangkat status sosial yang dimilikinya di dalam masyarakat.

---

52 Lihat Laksmi Kusuma Wardani, Pengaruh Pandangan Sosio-Kultural Sultan Hamengkubuwana IX Terhadap Eksistensi Kraton Yogyakarta, *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik,* Vol.25, No.1, 2012, hal. 57.

Pada 1943, Sri Sultan HB IX menetapkan bahwa semua jabatan di dalam birokrasi Yogyakarta terbuka untuk semua tanpa terkecuali. Hanya saja, seseorang yang ingin masuk dalam birokrasi harus mampu melalui ujian saringan.[53] Bahkan, untuk jabatan setingkat *Paniradya* (semacam menteri dalam pemerintahan) juga tidak ditentukan dari keningratan seseorang, tetapi berdasarkan pada keahlian yang dimilikinya. Artinya, tidak hanya kaum bangsawan semata yang bisa menempati jabatan-jabatan penting dalam birokrasi pemerintahan di Yogyakarta, tetapi juga bisa ditempati oleh orang-orang dari berbagai kelas sesuai dengan keahliannya masing-masing. Perubahan tersebut secara tidak langsung juga telah membuka ruang kompetisi bagi siapa saja yang ingin berkiprah di dalam birokrasi pemerintahan di Yogyakarta tanpa memandang status sosial yang disandangnya.

Guna mencapai hasil maksimal dari birokrasi yang ada di Yogyakarta, maka Sri Sultan HB IX membuat kebijakan pembaharuan dalam hal birokrasi. Menurut Suwarno, perubahan itu bisa terjadi di dalam birokrasi karena Sri Sultan HB IX memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang birokrasi pemerintahan modern dan tradisional.[54] Pengetahuan tentang pemerintahan modern didapatkan Sri Sultan HB IX ketika ia menempuh pendidikan jurusan Indologi di Belanda. Di sisi lain, aspek birokrasi tradisional didapatkan oleh Sri Sultan HB IX karena ia berasal dari

---

53 *Lihat* Moedjanto, *op.cit.,* hal. 92.

54 Lihat Parni Hadi dan Nasyith Majidi (ed), *op.cit.,* hal. 142.

lingkungan Keraton yang terkenal dengan sistem birokrasinya yang khas.

Perubahan di dalam aspek birokrasi pemerintahan Keraton sudah dilakukan Sri Sultan HB IX ketika masih berada di dalam nuansa kolonialisme, khususnya di era pendudukan Jepang. Pada saat itu, restrukturisasi pemerintahan dilakukan supaya Sri Sultan HB IX yang berkuasa benar-benar bisa mengendalikan jalannya pemerintahan Keraton Yogyakarta, meskipun berada di bawah kekuasaan Jepang.[55] Hal tersebut menjadi penting mengingat selama masa kolonialisme, segala bentuk kekuasaan Sultan selalu diawasi oleh Pepatih Dalem yang memiliki dua loyalitas yang berbeda sekaligus yaitu kepada sultan dan pemerintah kolonial (Belanda). Pada era itu, orang-orang yang bekerja di dalam birokrasi juga harus bertanggung jawab kepada Pepatih Dalem dan tidak bertanggung jawab langsung kepada Sultan.

Selanjutnya, Sri Sultan HB IX juga mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembagian kerja secara jelas dalam birokrasi kesultanan. Dengan mengadopsi prinsip birokrasi modern, setiap bagian pemerintahan harus diberikan atau diserahi tugas khusus sehingga bagian-bagian dari birokrasi tersebut dapat bekerja secara efektif sesuai dengan porsinya masing-masing.[56] Dengan kata lain, Sri Sultan HB IX menerapkan prinsip spesialisasi di dalam birokrasi Keraton. Apabila pembagian tugas yang dilakukan tersebut bisa dijalankan secara maksimal oleh bagian-bagian

---

55 Lihat Julius Pour dan Nur Adji (ed), *op.cit.,* hal. 156.

56 *Ibid.,* hal. 166.

dari birokrasi, maka jalannya roda pemerintahan di bawah komando Sri Sultan HB IX akan cenderung stabil.

### *Pengisian Dewan Agung (Penasihat) Dilakukan melalui Pemilihan*[57]

Sebelum dinobatkan menjadi seorang raja, Sri Sultan HB IX memiliki kewajiban untuk menyusun kontrak politik dengan pihak Belanda yang saat itu diwakili oleh Gubernur L. Adam. Salah satu poin dari kontrak politik tersebut ternyata tidak disetujui oleh Sri Sultan HB IX terutama terkait dengan pembentukan Dewan Agung. Kehadiran dewan tersebut ditolak oleh Sri Sultan HB IX karena separuh keanggotaannya dipilih oleh Sri Sultan HB IX dan separuhnya lagi oleh pihak Belanda. Selain itu, orang-orang yang telah dipilih oleh Sri Sultan HB IX juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak Belanda sehingga seolah-olah dewan tersebut hanya menjadi alat politik Belanda untuk melancarkan kepentingannya untuk mengawasi Sri Sultan HB IX.

Kebijakan demokratis terkait Dewan Agung tersebut muncul ketika Sri Sultan HB IX mengusulkan kepada pihak Belanda bahwa dewan tersebut seharusnya dipilih langsung oleh masyarakat melalui surat rahasia karena terdiri dari

---

57 Dewan Penasihat merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran untuk menjadi perwakilan masyarakat dalam proses pemerintahan di dalam Keraton. Permasalahan terkait dengan Dewan Penasihat ini sebenarnya merupakan salah satu poin dari kontrak politik antara Sri Sultan HB IX (sebelum dinobatkan menjadi raja) dan pihak Belanda yang tidak ditemukan jalan keluarnya karena kedua belah pihak memiliki cara pandang yang berbeda terkait dengan mekanisme pengisian Dewan Penasihat tersebut.

perwakilan masyarakat yang nantinya menjadi penasihat sultan.[58] Berangkat dari hal tersebut, Sri Sultan HB IX telah memutuskan untuk melibatkan masyarakat ke dalam urusan tata kelola pemerintahan, khususnya di Keraton karena dewan tersebut berhubungan dengan kegiatan Sri Sultan HB IX sebagai seorang raja dan penguasa Yogyakarta. Sayangnya, usulan tersebut secara tegas ditolak oleh pihak Belanda karena dinilai merugikan pihak Belanda.

### *Pemberian Otonomi untuk Seluruh Kabupaten dan Kota di Yogyakarta*

Salah satu kebijakan Sri Sultan HB IX yang menjadi titik awal dari pembaharuan di bidang pemerintahan adalah pemberian otonomi kepada kabupaten-kabupaten yang ada di Yogyakarta yaitu Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, dan Adikarto. Kabupaten Adikarto merupakan salah satu kabupaten yang merupakan bagian dari Puro Pakualaman yang kemudian dijadikan satu dengan Kulonprogo dengan nama Kabupaten Kulonprogo. Pemberian otonomi kepada beberapa kabupaten tersebut menjadi tanda bahwa Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII sebagai penguasa Yogyakarta memberikan kewenangan kepada kabupaten-kabupaten tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri secara mandiri dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh kedua penguasa tersebut.

Pemberian otonomi tersebut secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk

---

58 Lihat Julius Pour dan Nur Adji (ed), *op.cit.*, hal. 197.

berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya dalam tata kelola pemerintahan lokal. Bahkan, tata kelola pemerintahan yang berada di tingkat kabupaten bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya sehingga pemerintahan yang dijalankan dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, melalui otonomi yang diberikan tersebut, pemerintah kabupaten memiliki kebebasan untuk menentukan jalannya pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Pemberian otonomi tersebut dilakukan oleh Sri Sultan HB IX dengan cara pembagian tugas secara vertikal ke beberapa daerah administratif yang terdiri dari Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Kotamadya Yogyakarta membawahi kawedanan Kota, Sleman, dan Kalasan. Adapun Kabupaten Bantul membawahi kawedanan Bantul, Kotagede, Godean, dan Pandak. Selanjutnya, Kabupaten Gunungkidul membawahi kawedanan Wonosari, Playen, dan Semanu. Sedangkan Kabupaten Kulonprogo memiliki dua kawedanan yaitu kawedanan Nanggulan dan Sentolo.[59]

### *Melembagakan Desa*

Salah satu kebijakan demokratis Sri Sultan HB IX lainnya adalah mendorong proses demokratisasi hingga pada level desa melalui beberapa maklumat yang dikeluarkan olehnya.

---

59 P.J Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis,* Kanisius, Yogyakarta, 1994, hal. 108-109.

Salah satunya adalah Maklumat Nomor 7 Tanggal 6 Desember 1945 yang menghendaki supaya kelurahan memiliki DPR kelurahan atau dewan kelurahan. Adapun fungsi dari dewan tersebut adalah mewakili seluruh rakyat di dalam daerah perwakilannya untuk membicarakan permasalahan rumah tangga dan membuat aturan-aturan di dalam daerah perwakilan tersebut.[60] Maklumat tersebut secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengungkapkan pendapatnya terkait pembangunan desa ke depan. Selain itu, masyarakat yang berada di daerah tersebut juga memiliki perwakilan dalam membuat sebuah kebijakan.

Keanggotaan dari dewan desa dipilih oleh rakyat desa dengan perbandingan seratus orang diwakili oleh satu orang dan dengan anggota paling sedikit 10 orang atau paling banyak 30 orang dalam sebuah dewan desa. Dewan desa tersebut memiliki tugas untuk membuat peraturan desa yang harus dilaksanakan oleh pamong desa beserta stafnya. Bahkan, dewan desa memiliki peran untuk mengawasi kinerja pamong desa. Apabila pamong desa dianggap menyimpang, dewan desa dapat menyampaikan mosi tidak percaya dan apabila mosi tersebut didukung oleh mayoritas anggota dewan desa, maka pamong desa tersebut bisa diberhentikan.[61] Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dewan desa merupakan lembaga legislatif, sedangkan pamong desa merupakan lembaga eksekutif desa.

---

60 Lihat Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *op.cit.,* hal. 132.

61 Lihat Julius Pour dan Nur Adji (ed.), *op.cit.,* hal. 45.

Kemudian melalui Maklumat Nomor 14 Tanggal 11 April 1946, Sri Sultan HB IX juga mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Desa. Majelis ini beranggotakan semua kepala keluarga desa, termasuk di dalamnya ketua dewan desa dan pamong desa. Pada pasal 6 dalam maklumat tersebut dijelaskan beberapa kewajiban majelis desa yaitu mendorong dewan kelurahan ke arah perwakilan yang sempurna, mengamati peraturan yang dibuat oleh dewan kelurahan agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum desa, mengabsahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja yang dibuat oleh dewan kelurahan, mengabsahkan peraturan atau sengketa tentang hak tanah yang dibuat oleh dewan kelurahan.[62] Bahkan, majelis tersebut juga bisa menyelesaikan perselisihan antara dewan desa dengan pamong desa.

### *Masyarakat Berhak Menyampaikan Aspirasi ke Keraton*

Keraton Yogyakarta sebagai pusat kekuasaan pada dasarnya memiliki peran yang cukup penting dalam sistem pemerintahan di Yogyakarta. Hubungan yang dibangun antara raja dan rakyat sebenarnya cukup jauh karena kedua pihak tersebut memiliki status sosial yang berkebalikan. Meskipun demikian, Keraton melalui sultan yang bertahta tetap bisa melakukan dialog dengan masyarakatnya secara langsung. Bahkan masyarakat biasa bisa mengadu kepada sang Sultan terkait permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Pengaduan tersebut dilakukan sesuai tradisi yang dikenal dengan nama *laku pepe*. Tradisi itu mengharuskan perwakilan

62 Lihat Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *op.cit.*, hal. 132-133.

dari masyarakat berjemur di alun-alun atau duduk di Pagelaran Keraton dengan mengenakan busana putih-putih sampai sultan menerima dan membolehkan untuk menghadap.

Mulai sekitar tahun 1930-an, banyak Keraton-Keraton Jawa yang mulai membuka dirinya untuk terjun ke tengah masyarakat serta membentuk organisasi-organisasi massa bersifat sosial budaya.[63] Salah satu organisasi massa yang terkenal yaitu Pakempalan Kawoela Ngayogyakarta yang pernah memiliki anggota sebanyak 250.000 orang. Hal tersebut menandakan bahwa Keraton sebagai sebuah lembaga yang tertutup dan eksklusif mulai membuka diri di tengah sistem monarki yang semakin lama semakin ditinggalkan oleh masyarakat dunia. Dengan kata lain, demokratisasi telah merambah ke berbagai belahan dunia yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan sistem politik termasuk di Keraton Yogyakarta.

Semasa kepemimpinan Sri Sultan HB IX, Keraton cenderung lebih terbuka terhadap masyarakat umum. Hal tersebut bisa dilihat dari kebijakan Sultan yang memperbolehkan Keraton untuk menerima kunjungan berbagai organisasi masyarakat yang saat itu masih diperbolehkan berdiri oleh Jepang seperti perkumpulan pedagang batik bumiputera, perkumpulan wanita, dan perkumpulan olahraga. Mereka yang tergabung di dalam perkumpulan tersebut bisa secara langsung bertemu dengan Sultan dan memberikan keluhan yang sedang dihadapi.[64] Kebijakan Sultan untuk lebih

---

63 Lihat Julius Pour dan Nur Adji (ed), *op.cit.,* hal. 284.

64 *Ibid.,* hal. 157.

membuka Keraton bagi kalangan masyarakat biasa tentu menjadi bukti bahwa masyarakat diberikan kebebasan untuk mengekspresikan keluh kesahnya kepada sang pemimpin.

**Tapak Kedua: *'Ngencengke Pang'***

Setelah berhasil membangun citra pertama sebagai seorang raja, Sultan kembali memuluskan strateginya untuk membangun citra dirinya sebagai seorang kepala daerah yang demokratis. Artinya, Sultan tidak hanya berhenti untuk mendemokratisasikan lingkaran pertamanya (lingkaran Keraton), tetapi juga berkepentingan untuk mendemokratisasikan daerah Yogyakarta sebagai lingkaran kedua yang lebih heterogen komposisi masyarakatnya. Selanjutnya, tapak politik yang kedua juga akan mengantarkan Sultan sebagai seorang kepala daerah yang demokratis. Citra itu membantu Sultan untuk menampakkan eksistensi Keraton sebagai institusi dan dirinya sebagai raja supaya bisa terintegrasi ke dalam kerangka ide-ide demokrasi.

Fenomena tersebut bisa diilustrasikan sebagai strategi Sultan untuk '*ngencengke pang*' atau menguatkan bagian tanaman yaitu batang, setelah akar yang dimaksud sebelumnya telah kuat. Dengan '*ngencengke pang*', citra Sultan sebagai seorang kepala daerah yang demokratis semakin kuat posisinya sehingga nantinya mendapatkan perhatian yang besar dari publik. Apabila akar dan batang tersebut semakin kuat, maka yang menjadi penantian terakhir dari strategi Sultan adalah seberapa menarik daun dan bunga yang akan tumbuh pada tanaman tersebut. Bagian terakhir tersebut

nantinya juga menjadi bagian ujung dari tapak politik Sultan dalam membentuk citra jati dirinya yang demokratis.

Dalam rangka melihat proses '*ngencengke pang*', seperti juga telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya, bagian ini akan menggunakan tiga dimensi dalam mengukur strategi demokrasi yang dilakukan oleh Sultan yakni, partisipasi, kompetisi dan kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi. Cara Sultan untuk membuka dimensi partisipasi adalah dengan menggerakan semangat gotong royong masyarakatnya, memisahkan lembaga legislatif dan eksekutif, menetapkan kebijakan penggabungan desa dan mekanisme subsidi silang di desa, serta menghapus jabatan wedana. Selanjutnya, dimensi kompetisi dibuka dengan cara menetapkan kebijakan bahwa setiap pejabat yang ada di daerah dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan. Terakhir, dimensi kebebasan untuk berpendapat dan berkekspresi dilakukan dengan cara membentuk staf khusus penampung aspirasi masyarakat dan membentuk asrama daerah bagi mahasiswa yang menuntut ilmu di Yogyakarta.

### *Menggerakkan Semangat Gotong Royong*

Sri Sultan HB IX sebagai kepala daerah istimewa pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menjalankan sistem pemerintahan dari level provinsi hingga ke level yang paling bawah, yaitu desa. Salah satu tindakan yang dilakukan Sri Sultan HB IX untuk memaksimalkan jalannya roda pemerintahan adalah dengan digunakannya pendekatan yang lebih demokratis terhadap susunan pemerintahan daerah dan melaksanakan prinsip gotong royong di setiap

tingkat pemerintahan.[65] Dengan demikian, ia tidak sebatas memerintahkan bawahannya untuk melakukan sesuatu secara sendiri-sendiri, tetapi juga menekankan pentingnya gotong royong dalam melaksanakan program pemerintahan.

Demokratisasi yang dilakukan Sri Sultan HB IX hingga ke tingkat pemerintahan desa diharapkan tidak menggeser budaya asli masyarakat desa sebagai modal sosial, yaitu gotong royong dan rasa kekeluargaan.[66] Dengan kata lain, demokrasi yang digunakan tersebut tidak boleh memicu tumbuhnya suasana persaingan yang saling menjatuhkan dan ingin menang sendiri. Meskipun dimensi kompetisi dapat dilihat cukup kuat, modal sosial yang hidup di masyarakat Yogyakarta masih tetap terjaga. Dengan demikian, siapa pun yang menjadi pemimpin daerah diharapkan tidak menghambat proses pembangunan yang didasari oleh semangat gotong royong dan rasa kekeluargaan seperti yang telah dicontohkan oleh Sri Sultan HB IX.

### *Memisahkan Lembaga Ekskutif dan Legislatif*

Apabila melihat sistem monarki, maka raja adalah satu-satunya pemegang kekuasaan yang bisa melakukan apa pun sesuai kehendaknya. Berkebalikan dengan sistem monarki, sistem demokrasi menghendaki adanya pembagian tugas

---

65 Gotong royong merupakan mentalitas bahwa masyarakat tidak sendiri dan bergantung dengan masyarakat lain, tidak seperti masyarakat Barat yang hanya berhubungan karena kontrak. Selengkapnya lihat Niels Mulder, *Di Jawa: Petualangan Seorang Antropolog,* Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal. 158.

66 Selengkapnya lihat Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *op.cit.,* hal. 133.

(*check and balances*) untuk memecah kekuasaan supaya tidak mendominasi dan rawan disalahgunakan. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya konsep trias politika yang membagi lembaga pemerintahan menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki fungsinya masing-masing. Selain itu, pembagian tersebut pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah sebagai lembaga eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Dengan mengadopsi pola pemerintahan Barat tersebut, Sri Sultan HB IX menerapkan kebijakan serupa di berbagai tingkat pemerintahan di Yogyakarta. George McT. Kahin dalam tulisannya menyatakan bahwa Sri Sultan HB IX telah berperan besar dalam melakukan pemisahan badan-badan legislatif dan eksekutif di tingkat desa. Apabila ditilik ke belakang, sebelumnya desa hanya memiliki lembaga eksekutif yang disebut dengan pamong desa. Dengan adanya kebijakan tersebut, desa memiliki lembaga legislatif yang anggotanya berasal dari masyarakat dengan fungsi membuat aturan-aturan desa. Tidak hanya di desa, Sri Sultan HB IX juga mengadopsi pola tersebut untuk diterapkan di tingkat provinsi dengan munculnya DPR Daerah.

Setelah Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menyatakan bahwa daerahnya menjadi bagian dari Republik Indonesia, maka dengan segera pemerintah membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) baik di pusat maupun di daerah. Di Yogyakarta, KNI dibentuk untuk seluruh daerah Kesultanan dan Pakualaman. Dengan demikian, Yogyakarta hanya memiliki satu lembaga KNI yang disebut KNI Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun di dalam daerah tersebut terdapat

dua kerajaan yang berbeda. Lembaga KNI pada dasarnya memiliki fungsi untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah-daerah yang menjadi bagian dari republik, tetapi lebih menekankan pada fungsi legislatif. Adapun anggota dari KNI sendiri adalah masyarakat biasa yang memiliki kemampuan mumpuni.[67]

Pada tanggal 30 Oktober 1945, Sri Sultan HB IX mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa Badan Pekerja (BP) yang dibentuk oleh KNI DIY adalah wakil rakyat yang diberi kekuasaan sebagai badan legislatif dan memiliki hak untuk menentukan haluan pemerintahan di Kesultanan dan Pakualaman. Selanjutnya, setelah BP KNI DIY membuat peraturan untuk mengatur Kesultanan dan Pakualaman, maka peraturan tersebut selalu ditandatangani atau disetujui oleh Sri Sultan HB IX, Paku Alam VIII, dan ketua KNI DIY.[68] Dengan demikian, muncul sebuah kesinambungan bersama dalam tata kelola pemerintahan di Yogyakarta yang mana seorang sultan tidak lagi berkuasa secara mutlak karena munculnya lembaga legislatif baru.

Selain menetapkan BP KNI DIY sebagai lembaga legislatif di tingkat provinsi, Sri Sultan HB IX juga membentuk lembaga legislatif di tingkat kota dan kabupaten, serta di tingkat

---

67 Pada awal pembentukan KNI, anggota KNI Yogyakarta dipilih untuk mewakili kaum nasionalis-sosialis, kelompok-kelompok keagamaan, kaum tani, kaum buruh, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Pengangkatan anggota tersebut dilakukan melalui penunjukkan.

68 Peraturan yang dibuat bersama oleh Sri Sultan HB IX, Paku Alam VIII, dan ketua KNI DIY tersebut kemudian sering dikenal dengan nama ‘maklumat’.

kelurahan.[69] Selain itu, di setiap level pemerintahan dibentuk Dewan Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di sisi lain, Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII sebagai Kepala dan Wakil Daerah Istitimewa Yogyakarta bertanggungjawab langsung kepada presiden. Dari hal tersebut, maka tata kelola pemerintahan di Yogyakarta mulai bersifat demokratis karena mencoba membuka keran partisipasi dari masyarakat untuk terlibat di dalam proses pemerintahan, khususnya melalui lembaga legislatif di masing-masing level pemerintahan. Selain itu, sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif mulai terjalin dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.

Proses pembagian kekuasaan itu didukung oleh salah satu amanat yang dikeluarkan oleh pemerintah DIY yaitu Maklumat Nomor 18 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari Kasultanan dan Pakualaman yang memiliki sebuah badan legislatif independen yang disebut DPRD. Maklumat yang ditandatangani bersama oleh Sri Sultan HB IX, Paku Alam VIII, dan ketua KNI DIY tersebut juga menjelaskan bahwa anggota DPRD DIY dipilih oleh rakyat. Selanjutnya, lima dari anggota DPRD DIY tersebut duduk di dalam Dewan Pemerintah DIY bersama dengan Sri

69 Lembaga legislatif yang berada di tingkat kelurahan pada akhirnya dihapus oleh Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pemerintah daerah. Selengkapnya lihat Moedjanto, *op.cit.,* hal. 110.

Sultan HB IX dan Paku Alam VIII untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari.[70]

Selain itu, Sri Sultan HB IX juga mengeluarkan kebijakan secara demokratis terkait pengaturan pembantu Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Untuk membuat aturan tersebut, Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII melibatkan ketua KNI DIY yaitu Muh. Saleh untuk menyepakati isi maklumat yang akan dikeluarkannya terkait dengan pembantu TKR. Menariknya, mereka bertiga juga menyepakati bahwa sistem pemilihan pemimpin barisan dilakukan secara demokratis.[71] Peraturan tersebut kemudian disebut dengan Maklumat Nomor 5 Tahun 1945. Dengan demikian, Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII sebagai kepala dan wakil kepala daerah selalu melibatkan tokoh lain atau masyarakat dalam menentukan sebuah kebijakan.

---

70 Adapun anggota dari dewan legislatif tersebut terdiri dari 30 orang. Lima orang anggota DPRD yang masuk ke dalam Dewan Pemerintah DIY tersebut berasal dan dipilih dari anggota DPRD. Dewan Pemerintah DIY tersebut berfungsi sebagai eksekutif yang memiliki fungsi untuk menjalankan roda pemerintahan DIY. Lihat Purwadi, *op.cit.,* hal. 124-125.

71 Pada poin ketiga dari maklumat tersebut dijelaskan bahwa pemimpin barisan dipilih oleh dan dari anggota-anggota laskar rakyat. Pemilihan tersebut harus merdeka tanpa adanya intervensi dari pangreh praja, KNI, lurah desa, dan pegawai-pegawai lainnya. Selengkapnya lihat Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *op.cit.,* hal. 119-120.

### *Menetapkan Kebijakan Penggabungan Desa dan Subsidi Silang*

Pemerataan ekonomi adalah salah satu aspek penting dalam kegiatan pembangunan di suatu daerah. Melalui pemerataan, tingkat kesejahteraan masyarakat juga cenderung meningkat dan hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat yang stabil. Salah satu kebijakan Sri Sultan HB IX yang diambil untuk melakukan pemerataan tersebut yaitu memungut pajak 10% dari pendapatan desa-desa kaya untuk membantu desa-desa yang miskin. Adapun 20% dari dana yang terkumpul tersebut akan digunakan untuk memberikan tunjangan biaya administrasi desa-desa miskin dan 80% sisanya digunakan untuk program pemberian pinjaman kepada desa-desa miskin dengan bunga sebesar 2% setahun dalam rangka membangun industri yang dimiliki desa.[72] Dengan demikian, masyarakat dari desa kaya bisa berpartisipasi aktif untuk membantu proses pembangunan di desa-desa yang masih tergolong miskin.

Sebagai level pemerintahan yang paling bawah, desa memiliki fungsi yang cukup vital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa yaitu dengan menggabungkan desa-desa yang berdekatan ke dalam sebuah federasi sehingga pelayanan bersama terkait dengan fasilitas pendidikan dan irigasi menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan juga akan semakin sedikit. Di sisi lain,

---

72 Lihat Atmakusumah (ed), *op.cit.*, hal. 189.

penggabungan desa-desa tersebut secara tidak langsung akan menarik partisipasi masyarakat untuk melakukan pembangunan desa secara bersama-sama.

### *Menghapus Jabatan Wedana*

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi pemerintahan dari tingkat yang paling atas sampai yang paling bawah, Sri Sultan HB IX memutuskan untuk menghapus jabatan wedana atau pimpinan dari sebuah tingkat pemerintahan yang disebut dengan kawedanan. Kawedanan merupakan tingkat pemerintahan yang menjadi penghubung antara bupati dengan *kapenawon* (tingkat kecamatan). Sebelum masa pendudukan Jepang, komunikasi vertikal dalam pamong praja berasal dari bupati ke bawah melalui wedana hingga panewu. Adapun tugas dari wedana lebih bersifat pengawasan atau koordinasi, sedangkan kerja lapangan yang sesungguhnya lebih menjadi tanggung jawab *panewu* (pemimpin *kepenawonan*).[73] Dengan demikian, dihapuskannya jabatan wedana membuat komunikasi antara bupati dan panewu bersifat langsung dan lebih efisien.

Berangkat dari hal tersebut, Sri Sultan HB IX kemudian juga membuat sebuah terobosan dengan menghapus jabatan dukuh. Padukuhan sendiri berperan sebagai penghubung antara lurah dengan para penduduk desa sehingga informasi yang dikirim ataupun diterima oleh lurah kepada masyarakat dilakukan melalui dukuh. Melalui Maklumat Nomor 18

---

73 Lihat Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta,* Komunitas Bambu, Yogyakarta, 2009, hal. 108.

Tahun 1946, jabatan kepala dukuh dihapuskan dan para pembantu lurah ditarik ke tingkat pemerintahan desa. Para pembantu lurah yang ditarik ke tingkat pemerintahan desa tersebut dibagi ke dalam beberapa bagian yang memiliki fungsi kerjanya masing-masing. Meskipun penghapusan dukuh ditujukan untuk mencapai efisiensi kerja, hasil dari kebijakan tersebut ternyata tidak membawa dampak positif bagi masyarakat sehingga pada akhirnya tingkat padukuhan dikembalikan seperti semula.

### *Memilih Pejabat Secara Langsung Melalui Pemilihan*

Semenjak Sri Sultan HB IX menjabat gubernur DIY, salah satu terobosan yang dilakukan yaitu dengan menerapkan sistem pemilihan langsung di desa-desa. Melalui Maklumat Nomor 15 Tahun 1946, pemerintah DIY telah mengatur masalah pemilihan langsung di desa. Desa-desa di Yogyakarta telah menerapkan sistem pemilihan langsung dengan menggunakan *bumbung* (bambu) dan sebatang *biting* (lidi). Bambu digunakan sebagai tempat penampungan suara untuk calon-calon kepala desa. Apabila calon kepala desa ada tiga orang, maka bambu yang disediakan juga tiga buah dengan ciri yang berbeda-beda untuk membedakan tanda setiap calon. Selanjutnya, lidi digunakan sebagai surat suara yang digunakan oleh masyarakat. Apabila seseorang ingin memilih calon A, maka lidi tersebut dimasukkan ke dalam bambu A dan seterusnya.[74]

---

74 Karena masih banyaknya pemilih yang mengalami buta huruf, maka setiap bambu yang menjadi tempat penampungan suara setiap kandidat tidak

Pada maklumat tersebut dijelaskan bahwa yang berhak memilih kepala desa dan pamong desa adalah masyarakat desa, baik laki-laki maupun perempuan yang telah berumur 18 tahun ke atas, memiliki pikiran yang sehat, dan setidaknya telah menjadi penduduk di desa tersebut selama enam bulan. Selanjutnya, pemilihan kepala desa tersebut dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Perubahan yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX pada tahun 1946 itu berbeda dengan pemilihan langsung kepala desa yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta semasa pendudukan Belanda. Pada saat itu, hanya para pemilik tanah yang memiliki hak untuk memilih kepala desanya secara langsung, sedangkan masyarakat biasa yang tidak memiliki tanah tidak memiliki hak untuk memilih pemimpinnya sendiri.[75]

Kondisi itu sejalan dengan pengamatan Selo Soemardjan yang melihat perubahan sosial di Yogyakarta pada era Belanda dan pasca kemerdekaan Indonesia. Hanya penduduk yang memiliki tanah yang memiliki hak untuk memilih dan membicarakan permasalahan-permasalahan desa melalui dewan desa. Berangkat dari hal tersebut, kaum cendekiawan pada masa itu menganggap bahwa sudah seharusnyalah semua warga negara tanpa memandang kekayaan, kedudukan, pendidikan, dan kepemilikan tanah memiliki hak yang sama,

---

menggunakan huruf A, B, atau C (nama-nama kandidat). Bambu tersebut diberi simbol jagung untuk kandidat A, simbol padi untuk kandidat B, dan simbol pisang untuk kandidat C. Pemilihan secara demokratis tersebut dilaksanakan pada tahun 1946. Selengkapnya lihat Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *op.cit.,* hal. 134.

75 Lihat Atmakusumah (ed), *op.cit.,* hal. 189.

kecuali bayi dan anak kecil.[76] Berkaca dari hal tersebut, Sri Sultan HB IX kemudian melaksanakan proses demokratisasi sehingga semua orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Sri Sultan HB IX juga melakukan demokratisasi di tingkat provinsi yaitu dengan menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung pada tahun 1951. Sebelumnya, Sri Sultan HB IX juga telah melakukan terobosan pemilihan umum di tingkat desa yang semenjak 1946 hingga 1951. Bisa dikatakan terobosan itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diturunkan dari Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang kemudian diturunkan lagi ke dalam maklumat-maklumat yang dikeluarkan oleh Sri Sultan HB IX, Paku Alam VIII, berserta ketua BP KNI DIY. Setelah adanya pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda kepada Indonesia, Yogyakarta mempelopori penyelenggaraan pemilu DPRD yang dilaksanakan pada 16 Juli 1951.

Pada tahun 1951, pemilihan untuk memilih anggota DPRD tersebut dilakukan dalam rangka menggantikan dewan legislatif yang dibekukan pada tingkat provinsi maupun kabupaten. Pemberi suara harus memilih dengan cara memasukkan kartu suara secara rahasia untuk partai

---

76 Untuk pemilihan anggota badan legislatif dilakukan melalui pemilihan umum dengan aturan bahwa satu wakil mewakili masyarakat yang berjumlah 100 orang. Untuk badan legislatif desa sendiri minimal terdiri dari 10 wakil dan maksimal 30 wakil. Selengkapnya lihat Selo Soemardjan, *Perubahan op.cit.*, hal. 100-101.

yang dipilih. Dengan sistem tertutup yang pada waktu itu diberlakukan, maka partai-partai politik harus memilih atau menunjuk anggota-anggotanya sebagai wakil di dalam dewan-dewan legislatif. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk pertama kalinya di tingkat pusat. Selanjutnya, tahun 1957 diselenggarakan kembali pemilihan langsung anggota DPRD untuk tingkat provinsi dan kabupaten di Yogyakarta. Pemilihan tersebut tetap dilakukan dengan cara memilih partai politik peserta pemilihan.[77]

Diselenggarakannya pemilihan umum yang pertama di Yogyakarta tersebut menarik karena dilakukan dengan menggunakan sistem bertingkat. Secara teknis, sistem bertingkat yang dimaksud yaitu masyarakat pada awalnya melakukan pemilihan untuk memilih calon wakil-wakilnya yang akan menjadi peserta pemilihan umum guna menjadi anggota DPRD. Setelah calon wakil-wakil dari rakyat terpilih, mereka (masyarakat) kemudian melakukan pemilihan kembali untuk memilih wakil rakyat yang sebenarnya (memilih

---

77 Beberapa partai politik yang mengikuti pemilihan umum di Yogyakarta yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR), Partai Katolik, dan Parkindo. Selain itu, ada peserta pemilihan umum berupa organisasi sosial seperti Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI), Sarekat Sekerja Pamong Praja (SSPP), Aksi Memajukan Daerah Gunungkidul (AMDG), Panitia Kesatuan Aksi Buruh Tani (PKABT), Panitia Aksi Manunggil (PAMA), dan lain sebagainya. Menariknya, pemilihan umum tersebut juga diikuti oleh peserta perseorangan seperti Atmosoediro (dari Imogiri), Dasuki (Kalasan), Sudjak (Prambanan), Susilonarto (Pakem), M. Ridwan (Ngaglik), dan lain sebagainya.

anggota DPRD).[78] Dipergunakannya sistem tersebut karena masih tingginya angka buta huruf di kalangan masyarakat sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pemilihan umum secara langsung. Selain itu, sistem tersebut juga menjamin masyarakat yang mengalami buta huruf bisa berpartisipasi di dalam pemilihan itu dengan cara yang telah ditentukan.

### *Membentuk Staf Khusus Penampung Aspirasi Masyarakat*

Semenjak Indonesia mendapatkan kemerdekaan, pemerintah pusat mulai membenahi diri supaya dalam proses pemerintahan mampu memberikan pelayanan dan pembangunan maksimal kepada masyarakat. Dalam hal itu, Sri Sultan HB IX menjadi salah satu aktor penting yang memiliki peran dalam pemerintahan pusat. Dengan jabtannya sebagai menteri hingga wakil presiden, dia terpaksa menghabiskan waktunya lebih banyak di Jakarta daripada di Yogyakarta. Konsekuensinya, yaitu jabatan Sri Sultan HB IX sebagai Gubernur DIY harus dijalankan oleh wakilnya yaitu Sri Paku Alam VIII. Meskipun sering berada di Jakarta, Sri Sultan HB IX bersedia untuk pulang ke Yogyakarta minimal dua bulan sekali guna menangani berbagai permasalahan yang muncul di daerahnya.

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX supaya tidak terputus komunikasinya dengan masyarakat Yogyakarta ialah dengan membentuk staf khusus pembantu Sultan. Staf tersebut memiliki kewajiban untuk mencatat

---

78 Lihat Tri Yuniyanto, *Daulat Raja Menuju Daulat Rakyat: Demokratisasi Pemerintahan di Yogyakarta,* CakraBooks, Solo, 2010, hal. 43.

segala permasalahan mendesak dan mengajukannya kepada Sultan apabila dipandang penting dan segera. Adapun dua hal penting yang memerlukan keputusan Sri Sultan HB IX ialah terkait dengan pertanahan atau agraria dan perluasan kota Yogyakarta. Di sisi lain, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi atau permasalahan yang dihadapinya kepada Sri Sultan HB IX sebagai pemimpin daerah melalui staf pembantunya.

Selanjutnya, Sri Sultan HB IX juga meminta kepada masyarakat untuk bisa mengambil inisiatif ketika menghadapi sebuah permasalahan. Apabila permasalahan muncul di desa, maka masalah tersebut harus diselesaikan di tingkat desa melalui rapat desa. Ketika masalah tersebut belum tuntas, maka bisa dibawa ke tingkat kecamatan, kabupaten, hingga nantinya dipecahkan oleh kepala daerah apabila permasalahannya selalu tidak mendapatkan pemecahan. Sri Sultan HB IX juga menginginkan supaya bawahan tidak rikuh kepada atasan apabila ada beberapa hal penting yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya. Dengan demikian, masyarakat diberikan arahan untuk bisa mengambil inisiatif dan tidak ragu-ragu untuk melakukan sesuatu yang benar.

### *Membentuk Asrama Mahasiswa Daerah*

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Sri Sultan HB IX merupakan sosok yang turut berjasa dalam membentuk perguruan tinggi yang kemudian dikenal dengan nama Universitas Gadjah Mada (UGM). Salah satu hal yang diharapkan oleh Sri Sultan HB IX dengan adanya UGM ialah, Yogyakarta bisa menjadi tempat belajar bagi anak-anak muda dari berbagai wilayah yang berbeda-beda di seluruh Indonesia.

Dengan seiring bertambahnya jumlah perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak pemuda/pemudi dari berbagai daerah yang datang ke kota ini untuk belajar. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Sri Sultan HB IX adalah membentuk asrama-asrama mahasiswa sebagai tempat tinggal mahasiswa yang berasal dari luar Yogyakarta.

Konsep asrama mahasiswa daerah yang diprakarsai oleh Sri Sultan HB IX tersebut tidak hanya berdasarkan nama-nama provinsi, tetapi juga kota dan kabupaten. Sungguhpun demikian, waktu itu juga telah banyak berkembang rumah tinggal yang dibangun untuk *in de kost* atau 'kos' bagi mahasiswa yang datang untuk belajar di kota itu. Dengan adanya asrama mahasiswa tersebut, secara tidak langsung mahasiswa yang menuntut ilmu di Yogyakarta diberikan kesempatan untuk memilih tempat tinggal. Pun demikian, para mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat atau opininya terkait sebuah hal. Tidak hanya masyarakat Yogyakarta asli yang memiliki hak berpendapat, tetapi mahasiswa yang sebagian besar pendatang juga bisa memberikan pendapatnya demi pembangunan Yogyakarta yang lebih baik. Berkaca dari hal tersebut, Sri Sultan HB IX memiliki pandangan visioner untuk mengharmonisasikan berbagai latar belakang yang berbeda di Yogyakarta.

**Tapak Ketiga:** *'Njagani Godhong lan Kembang'*

Setelah berhasil menguatkan akar dan batang sebuah tanaman, maka langkah selanjutnya adalah dengan merawat daun dan bunga atau *njagani godhong lan kembang* supaya tumbuh secara sempurna. Apabila daun dan bunga yang

dimaksud bisa tumbuh secara sempurna, maka tanaman tersebut akan menampilkan keindahan yang luar biasa. Begitu juga dengan sosok Sri Sultan HB IX, ketika citra yang dibangun di lingkaran pertama dan kedua berhasil dilaksanakan, tugas terakhir Sultan adalah membangun citra demokratis yang lebih luas lagi sehingga sosoknya akan tampil sebagai orang yang demokratis. Dengan kata lain, Sultan juga berkepentingan untuk membangun citra demokratis di kalangan nasional, bahkan internasional.

Strategi Sultan yang terakhir dilakukan dengan cara menampilkan jati dirinya sebagai sosok yang *low profile* sehingga pada akhirnya nanti dianggap sebagai sosok yang demokratis di kalangan publik. Langkah terakhir Sultan ini sejatinya juga menguatkan citra dirinya sebagai sosok yang pro demokrasi sehingga keadaan tersebut membuat posisi Sultan sebagai sosok raja yang absolut semakin tertutupi dengan klaim barunya sebagai raja yang demokratis. Bahkan, konsistensi tapak politik sang Sultan tersebut mengokohkan eksistensi kekuasaan yang dimilikinya melalui Keraton Yogyakarta hingga sampai saat ini. Lebih jauh lagi, sepak terjang Sultan di lingkaran ketiga ini membuatnya mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional.

Sama dengan bab-bab sebelumnya (tapak pertama dan kedua), cara untuk melihat citra Sultan melalui tapak ketiga ini dilakukan dengan cara membuka tiga dimensi demokrasi yang telah dijelaskan sebelumnya yakni, partisipasi, kompetisi dan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pada aspek partisipasi, hal tersebut bisa dilihat dari cara Sultan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menduduki jabatannya

(wakil presiden), tidak menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi, dan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan umum. Untuk aspek kompetisi, Sultan mendukung penuh penyelenggaraan pemilihan umum, juga diterapkannya *merit system* meskipun sultan pada saat itu tidak menunjukkan dimensi tersebut secara langsung. Terakhir, aspek kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi ditunjukkan Sultan dengan cara memilih berdiam diri ketika publik memperdebatkan inisiator terkait dengan Serangan Umum 1 Maret 1949.

### *Memberikan Kesempatan Orang Lain Menduduki Jabatan Penting*

Pada era Orde Baru, Sri Sultan HB IX menjadi salah satu anggota *Triumvirat* bersama dengan Soeharto dan Adam Malik. Peran dan kontribusi Sri Sultan HB IX untuk mengembalikan citra Indonesia di dunia internasional dan membangkitkan kembali perekonomian Indonesia tidak dapat dimungkiri. Sri Sultan HB IX berhasil melaksanakan tugasnya tersebut, khususnya di bidang ekonomi. Pada tahun 1973, Sri Sultan HB IX dilantik sebagai wakil presiden mendampingi Soeharto hingga tahun 1978. Pemilihan Sri Sultan HB IX sebagai pendamping Soeharto dinilai tepat karena banyak masyarakat Indonesia yang memberikan rasa hormat dan legitimasinya kepada Sri Sultan HB IX.

Setelah tahun 1978, ketika Sultan diminta kembali untuk memegang jabatan wakil presiden, dia menolaknya. Tahun-tahun itu merupakan periode ketika rezim Orde Baru mencapai puncak keemasanya. Meski begitu, era Orde Baru

juga cenderung korup. Hal ini menjadi salah satu pertanda di mana Orde Baru tidak akan lama lagi bertahan di republik ini. Atas keyakinan itu, dan seolah sudah mengetahui hal tersebut, Sri Sultan HB IX telah mengambil keputusan bulat untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden dan tidak mau dicalonkan kembali dengan jabatan yang sama. Pada saat itu, Sri Sultan HB IX benar-benar melepaskan jabatan tersebut, meskipun berulang kali rekannya, Adam Malik, terus melakukan lobi kepada Sri Sultan HB IX untuk kembali menjadi wakil presiden. Jabatan wakil presiden akhirnya dipegang oleh Adam Malik.

Banyak masyarakat Indonesia yang mempertanyakan alasan Sri Sultan HB IX untuk tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Dari Sri Sultan HB IX sendiri, dirinya beralasan bahwa kesehatan matanya menjadi salah satu faktor utama yang menghambat dirinya untuk melanjutkan jabatannya sebagai wakil presiden. Di sisi lain, banyak akademisi dan ilmuan politik yang menduga bahwa mundurnya Sri Sultan HB IX dari jabatan wakil presiden karena ketidakcocokan Sri Sultan HB IX dengan Soeharto.[79] Berangkat dari hal tersebut,

---

79 Atmakusumah Astraatmadja (penyunting buku Tahta Untuk Rakyat) menceritakan bahwa setelah Sri Sultan HB IX menyampaikan alasannya untuk tidak ingin dijadikan wakil presiden kembali di Istana Negara, ada satu wartawan yang mengikuti mobil yang digunakan Sri Sultan HB IX. Ketika mobil tersebut diikuti, Sri Sultan HB IX-lah yang menyetir sendiri mobil tersebut. Peristiwa tersebut dianggap bertentangan dengan alasan Sri Sultan HB IX bahwa kesehatan matanya sedang tidak baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa ada alasan lain di balik ketidakinginan Sri Sultan HB IX untuk dicalonkan kembali menjadi wakil presiden. Keterangan tersebut diambil

Sri Sultan HB IX mengambil keputusan untuk mundur dari jabatan wakil presiden dan terjun ke dunia yang disukainya sejak kecil, yaitu kepanduan dan olahraga.[80]

***Tidak Menggunakan Kekuasaan Secara Berlebihan***

Semenjak masa kemerdekaan, Sri Sultan HB IX mendapatkan berbagai kepercayaan untuk memegang beberapa jabatan tertentu, mulai dari menteri hingga menjadi wakil presiden. Dengan jabatan yang dimilikinya, secara tidak langsung Sri Sultan HB IX memiliki kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu, baik untuk publik maupun untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian, Sri Sultan HB IX bersikap tidak egois dalam memutuskan sebuah hal, khususnya yang menyangkut tentang kepentingan dirinya sendiri. Hal tersebut dibuktikan olehnya ketika Sri Sultan HB IX diminta untuk menentukan gajinya sendiri sebagai pejabat negara.

Ketika Sri Sultan HB IX menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri, Frans Seda mengusulkan kepada Sri Sultan HB IX untuk menentukan gajinya sendiri

---

dari program televisi MEMOAR dengan judul Tahta Untuk Republik oleh Kompas TV yang disiarkan pada tanggal 12 Juli 2014.

80 Semenjak meninggalkan jabatan sebagai wakil presiden, Sri Sultan HB IX menyadari bahwa satu hal penting bahwa seorang pemimpin harus berani mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Sikap diam yang ditunjukkan oleh Sri Sultan HB IX ketika tidak lagi menjadi wakil presiden dipandangnya sebagai sikap yang salah karena terus membiarkan kesalahan orang lain yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Sri Sultan HB IX berpesan kepada putranya, Sri Sultan HB X, untuk lebih berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah.

karena sebagai menteri, Sultan memiliki wewenang untuk menentukan hal tersebut.[81] Tawaran tersebut akhirnya ditolak oleh Sri Sultan HB IX dengan alasan bahwa urusan tersebut merupakan urusan Menteri Dalam Negeri sehingga Sri Sultan HB IX tidak berhak untuk menentukan gajinya sendiri. Dengan keputusan yang diambilnya, bisa dikatakan bahwa Sri Sultan HB IX cenderung tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya.

### *Menggunakan Kekuasaan Untuk Kepentingan Umum*

Pada 1949 ketika Indonesia mengalami masa transisi, Sri Sultan HB IX memiliki jabatan penting sebagai pemegang kekuasaan militer sementara di Yogyakarta yang pada waktu itu berperan sebagai ibu kota republik. Selama memegang kekuasaan tersebut, Sri Sultan HB IX mengeluarkan sebuah pengumuman yang berisi jaminan keselamatan jiwa dan harta benda bagi penduduk di Yogyakarta selama masa transisi. Pengumuman tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 1949 dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Adapun isi dari pengumuman tersebut yaitu sesudah tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta, penduduk yang telah bekerja untuk pemerintah federal sementara akan dijamin keamanannya tanpa dibedakan agama dan latar belakang.

---

81 Frans Seda pernah dikirimi *civiele lijst* dari Keraton Yogyakarta (daftar para pejabat yang dibiayai oleh negara). Beliau melihat besaran gaji Sri Sultan HB IX sebesar Rp 7.000,-. Selengkapnya lihat Atmakusumah (ed.), *op.cit.,* hal. 266.

Pengumuman dan instruksi Sri Sultan HB IX selaku Menteri Negara RI Koordinator Keamanan tersebut, mampu meyakinkan jaminan keamanan bagi seluruh penduduk yang ada di Yogyakarta, termasuk bagi para pedagang Tionghoa. Pada era transisi itu, pemerintah Belanda memberikan saran kepada para pedagang Tionghoa untuk membentuk sebuah tentara khusus yang bertugas untuk menjaga barang-barang dagangan golongan tersebut. Niat itu pun kemudian kandas ketika salah satu perwakilan golongan Tionghoa, Sin Ki Ai, meminta kepada penduduk yang beretnis Tionghoa untuk tidak membentuk tentara khusus.[82] Hal tersebut dilakukan supaya mereka tidak dianggap bermusuhan dengan orang-orang pribumi. Prakarsa tersebut pada awalnya merupakan usulan Sri Sultan HB IX kepada Sin Ki Ai.

### *Memilih Diam Daripada Turut Memperdebatkan*

Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dilaksanakan di Yogyakarta menjadi salah satu peristiwa berharga bagi sejarah bangsa Indonesia. Dengan adanya serangan tersebut, Indonesia membuktikan bahwa kekuatan militer masih ada dan republik yang dijajah Belanda tersebut masih tetap hidup. Semenjak Soeharto berhasil menjadi pucuk pimpinan pemerintahan Orde Baru, dirinya dengan bangga mengaku sebagai inisiator dari Serangan Umum 1 Maret

---

82 Sin Ki Ai adalah seorang dokter yang pernah mengobati Sri Sultan HB IX di Keraton Yogyakarta. Dengan tidak dibentuknya tentara khusus tersebut, Sri Sultan HB IX kemudian menjamin keamanan bagi pedagang Tionghoa yang akan mengikuti sebuah konvoi ke Semarang. Selengkapnya lihat Tino, *op.cit.*, hal. 118.

1949. Seolah ingin menjadikan serangan tersebut sebagai bahan legitimasinya, Soeharto membuat sebuah film yang menggambarkan tentang serangan tersebut, serta menuliskan kisah serangan tersebut ke dalam sebuah buku.[83] Namun, banyak tulisan dan saksi sejarah yang menyatakan bahwa Sri Sultan HB IX adalah inisiator dari serangan tersebut dan Soeharto hanya sebatas menjadi koordinator lapangan atau pimpinan pasukan dalam peritiwa itu.

Dengan adanya versi sejarah yang berbeda-beda tersebut, banyak ilmuwan dan wartawan yang ingin menemukan kepastian terkait dengan inisiator dari serangan itu. Di salah satu pihak, Soeharto dengan bangga menyatakan bahwa dirinyalah yang menjadi inisiator dari serangan tersebut. Bahkan Soeharto membuat pernyataan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Sri Sultan HB IX di Keraton Yogyakarta sebelum serangan tersebut dilaksanakan. Di satu pihak, Sri Sultan HB IX cenderung diam menanggapi hal tersebut, meskipun banyak saksi yang menyatakan bahwa dirinyalah yang menjadi inisiator. Sikap diam Sri Sultan HB IX tersebut tentu menjadi salah satu strategi supaya tidak timbul sebuah gesekan atau kegoncangan di kalangan masyarakat.

---

83 Adapun nama judul film yang menceritakan tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah *Janur Kuning* yang disutradarai oleh Alam Rengga Surawidjaja dan dirilis pada tahun 1979. Selain itu, Serangan Umum 1 Maret 1949 versi Soeharto juga bisa dilihat dalam buku biografinya yang ditulis sendiri dengan judul *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya* yang diterbitkan oleh Citra Kharisma Bunda pada tahun 1989.

**Catatan Akhir: Satu Misi Dalam Tiga Jati Diri**

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Yogyakarta, baik sebagai sultan maupun sebagai kepala daerah, Sri Sultan HB IX telah berani melakukan perubahan-perubahan sosial secara drastis menuju ke arah demokratisasi. Revolusi sosial yang dilakukan di Yogyakarta pada dasarnya berbeda dengan revolusi di Perancis, yang mana masyarakat Prancis pada waktu itu berusaha mendobrak pintu-pintu istana. Sedangkan di Yogyakarta, masyarakat tidak perlu mendobrak pintu-pintu istana karena pintu Keraton dengan sendirinya sudah terbuka lebar. Menurut Indonesianis dari Monash University, M.C. Ricklefs, revolusi sosial di Yogyakarta dimulai dari atas ke bawah.[84]

Revolusi sosial yang demikian itu bisa terjadi, salah satunya karena dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemimpinnya pada masa itu yaitu, di era kepemimpinan Sri Sultan HB IX. Kebijakan Sri Sultan HB IX tidak dapat dilepaskan dari pemikirannya yang visioner lantaran ita melihat adanya kecenderungan dunia untuk menganut asas demokrasi. Di sisi lain, Sri Sultan HB IX sebagai seorang raja masih dituntut untuk mempertahankan sistem monarki yang pada saat itu masih hidup di Yogyakarta. Selain itu, demokratisasi yang dilakukan di Yogyakarta tidak lain juga merupakan strategi untuk mempertahankan eksistensi Keraton sebagai bagian

---

84 Lihat Parni Hadi dan Nasyith Majidi (ed.), *op.cit.*, hal. 13.

dari Republik Indonesia yang ke depan juga akan menganut sistem demokrasi.[85]

Berangkat dari hal tersebut, perubahan secara mendasar yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX sebagai seorang raja adalah mengubah bentuk pemerintahan dari monarki absolut menuju ke aristokrasi demokrasi. Hal itu brarti bahwa raja tidak bisa bertindak secara absolut karena sistem pemerintahan yang dibangunnya tunduk pada konstitusi. Selain itu, di dalam sebuah negara, raja hanya berkedudukan sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang dipilih dan dikontrol oleh wakil rakyat di parlemen. Kondisi tersebut sebelumnya pernah dilihat oleh Sri Sultan HB IX ketika dirinya menuntut ilmu di Belanda yang mana sistem pemerintahan di sana menganut sistem parlementer dan menempatkan seorang ratu Belanda sebagai kepala negara serta perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Apabila dikaitkan dengan kondisi di Yogyakarta, maka demokratisasi yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX, secara tidak langsung telah menempatkan posisi raja atau sultan akan tunduk pada konstitusi negara. Hal tersebut bisa dilihat ketika Yogyakarta (melalui pernyataan Sri Sultan HB IX dan

---

85 Kecenderungan dunia pada saat itu beralih kepada sistem demokrasi. Banyak negara yang menganut sistem monarki pada akhirnya mengubah sistem politiknya menjadi sistem demokrasi, meskipun beberapa kerajaan di dunia masih eksis sampai dengan saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh penulis buku *A Prince in a Republic*, Dr.John Monfries, pada tanggal 13 April 2015 di Universitas Sanata Dharma dalam rangka diskusi dan peluncuran buku tersebut.

Paku Alam VIII) menyatakan dirinya menjadi bagian dari Republik Indonesia yang saat itu baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian, Yogyakarta sebagai bagian dari republik tentu akan menjalankan konstitusi yang dianut oleh Indonesia yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Tambahan pula, dengan begitu kekuasaan Sultan juga dibatasi sehingga kebijakan yang dibuat harus berdasarkan persetujuan badan legislatif di tingkat provinsi.

Selain melakukan demokratisasi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, Sri Sultan HB IX juga menjadikan dirinya sebagai contoh bagi masyarakat untuk mulai terbiasa dengan nilai-nilai demokrasi. Hal tersebut disampaikan Sri Sultan HB IX sendiri bahwa perubahan sikap haruslah dilakukan secara sukarela. Sultan bahkan berpendapat bahwa memberikan contoh dengan dirinya sendiri lebih efektif daripada perintah.[86] Artinya, Sri Sultan HB IX tidak hanya memerintahkan masyarakatnya untuk mulai membiasakan dirinya bersikap demokratis, tetapi juga menggunakan dirinya sendiri sebagai *role model* bagi masyarakat yang dipimpinnya. Dengan kharisma dan kewibawaan yang dimilikinya, Sri Sultan HB IX pada dasarnya dengan mudah akan dicontoh oleh masyarakat yang dipimpinnya.

86 Padahal Sri Sultan HB IX memiliki kekuasaan tradisional yang bisa digunakan untuk memberikan tekanan lebih kepada kaum bangsawan dalam rangka demokratisasi. Selengkapnya lihat Selo Soemardjan, *Perubahan….op.cit.*, hal. 143.

Selanjutnya, demokratisasi yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX setidaknya telah membuka tiga dimensi utama demokrasi yaitu partisipasi, kompetisi, dan kebebasan mengemukakan pendapat atau berekspresi. Sebelum adanya kebijakan demokratis dari Sri Sultan HB IX itu, bisa jadi ketiga dimensi tersebut tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan itu cenderung tidak menimbulkan kegoncangan di dalam masyarakat mengingat sebagian golongan masyarakat di Yogyakarta yang berpendidikan waktu itu telah menerima gagasan mengenai demokrasi, kebebasan, dan persamaan.[87] Dengan demikian, perubahan struktur sosial masyarakat di Yogyakarta tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan Sri Sultan HB IX saja, tetapi juga oleh karena pendidikan yang diterima masyarakat tentang demokrasi.

Pada dimensi partisipasi, kebijakan yang dikeluarkan oleh Sri Sultan HB IX sebagai raja memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam berbagai kegiatan yang awalnya tertutup untuk mereka. Lambat laun, Sri Sultan HB IX mencoba untuk menghilangkan sekat-sekat golongan yang sudah dibawa sejak masa kolonial di Yogyakarta. Dalam jati dirinya sebagai seorang kepala daerah, Sri Sultan HB IX telah berhasil membentuk lembaga legislatif di berbagai tingkatan pemerintahan. Dengan adanya lembaga legislatif yang notabene merupakan perwakilan dari masyarakat tersebut,

---

87 Beberapa kaum priyayi Yogyakarta asli lebih berkiblat ke Yogyakarta dalam pandangan dan tingkah laku. Artinya, sikap mereka terhadap perubahan sosial dan kemajuan ditandai oleh unsur *ndherek kerso Dalem* atau *tunggu perintah Sultan* yang pada dasarnya sudah mendarah daging. Selengkapnya lihat *Ibid.*, hal. 41.

Sri Sultan HB IX mendorong masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam proses pemerintahan dengan bergabung ke dalam lembaga legislatif itu.

Pada dimensi kompetisi, Sri Sultan HB IX telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan sebuah jabatan tertentu dengan jalan berkompetisi secara adil dan terbuka. Sebagai seorang kepala daerah, Sri Sultan HB IX membuka kesempatan kepada masyarakat biasa untuk berkompetisi menjadi kepala desa atau pun representasi dari masyarakat di lembaga legislatif. Untuk lembaga legislatif, Yogyakarta mengadakan pemilihan anggota dewan pada tahun 1951 yang diikuti beberapa partai politik. Persaingan atau kompetisi tersebut dilakukan untuk mengisi jabatan di lembaga legislatif tingkat provinsi.

Sri Sultan HB IX juga melakukan terobosan dengan memberikan hak kepada seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta untuk mengemukakan pendapatnya. Dalam jati dirinya sebagai seorang raja, Sri Sultan HB IX membuka Keraton bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah. Pada era kepemimpinan Sri Sultan HB IX, masyarakat melalui paguyuban atau organisasi yang dimilikinya bisa bertemu secara langsung dengan Sultan. Di sisi lain, sebagai seorang kepala daerah, Sri Sultan HB IX juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Semenjak Sri Sultan HB IX bertugas di Jakarta, ia yang juga seorang kepala daerah membuat sebuah keputusan untuk membentuk staf khusus yang berfungsi untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.

Berangkat dari berbagai hal yang telah dipaparkan di atas, bisa disimpulkan bahwa kebijakan demokratis Sri Sultan HB IX tidak terbatas pada jati dirinya sebagai seorang raja, tetapi juga sebagai seorang kepala daerah dan pemegang jabatan lainnya. Selain itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX justru memunculkan kontradiksi yang menarik. Sri Sultan HB IX yang merupakan seorang raja kharismatik seharusnya bisa berperilaku seperti layaknya seorang pangeran Jawa. Namun, ia justru banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bercorak Barat, sehingga Sultan seolah-olah tidak dibedakan dari seorang politisi yang lahir di Eropa.[88]

Dengan demikian, Sultan sejatinya telah berhasil menjalankan misinya untuk membentuk citra seorang raja yang demokratis, baik di lingkungan Keraton, sebagai pemimpin daerah, bahkan dalam lingkup nasional sebagai wakil presiden dan menteri. Masyarakat sampai kini pun masih mengklaim Sultan sebagai sosok raja yang demokratis. Keberhasilan misi tersebut pada dasarnya juga tidak dapat dilepaskan dari strategi Sultan untuk membentuk dirinya ke dalam berbagai jati diri yaitu sebagai seorang raja, kepala daerah, dan politisi. Dengan konsistensi untuk bertindak demokratis melalui berbagai jatidiri yang dimilikinya, Sultan telah berhasil menciptakan sebuah citra positif sehingga dirinya dianggap sebagai tokoh yang pro-demokrasi.

Setelah pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, bab selanjutnya akan membahas tentang penafsiran terhadap tapak politik demokrasi Sri Sultan HB IX. Dengan kata lain,

88 Selengkapnya lihat John Monfries, *op.cit.*, hal. 5.

bab selanjutnya merupakan kristalisasi dari segala bentuk kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Sultan yang nantinya berupa prinsip dan karakter kepemimpinan yang merupakan manifestasi dari tapak politik demokrasinya.

# BAB 3

# LIMA JALAN MENAFSIRKAN TAPAK POLITIK

## Sultan Berhasil Menjadi Sosok Demokratis?

Sebagai seorang raja, Sri Sultan HB IX memiliki kewenangan penuh untuk mengatur daerahnya sendiri yaitu Yogyakarta. Semenjak bertahta pada 1940, ia banyak membuat kebijakan-kebijakan yang sebenarnya berada di luar nalar seorang penguasa Jawa. Ketidaknormalan tersebut tentu bukan tanpa alasan, tetapi merupakan akibat dari hal-hal yang didapatkannya semenjak kecil (pengetahuan terhadap nilai Barat) termasuk mengambil keputusan yang terkadang belum terpikirkan oleh masyarakat waktu itu, yakni demokratisasi. Karakternya yang visioner pada dasarnya mengungkap beberapa alasan di balik kebijakan-kebijakannya yang cenderung demokratis. Hal tersebut nantinya bisa dilihat

dari lima nilai demokrasi yang kemudian akan dihadapkan dengan sikap, karakter, dan kebijakan Sri Sultan HB IX.

Guna menilai seberapa jauh demokratisasi terjadi sekaligus menjadi titik tolak dalam menafsirkan tapak politik demokrasi Sri Sultan HB IX, digunakan lima nilai untuk mengukur proses itu.[89] Berangkat dari hal tersebut, diharapkan nantinya dapat ditarik sebuah benang merah tentang penafsiran tapak politik demokrasi Sri Sultan HB IX secara jelas. Dipakainya kelima nilai demokrasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek substansial demokrasi itu sendiri, yaitu hak asasi manusia, kesetaraan, keadilan, pluralisme, dan anti-intimidasi. Pada sisi yang lain, aspek prosedural juga menjadi alasan digunakannya kelima nilai demokrasi yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Misi dari bab ini adalah menafsirkan tapak politik Sri Sultan HB IX tentang demokrasi yang pada awalnya didasarkan pada setiap kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX. Dengan kata lain, bagian ini akan menafsirkan secara lebih rinci terkait dengan tiga tapak politik

---

89 Kelima nilai yang dimaksud yaitu menyelesaikan permasalahan secara damai, menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam sebuah masyarakat, adanya pergantian penguasa secara teratur dan damai melalui pemilihan umum, menjunjung tinggi nilai keanekaragaman, dan menegakkan keadilan sebagai inti moralitas politik. Lihat pendapat Henry B. Mayo dalam Misbahul Huda, *Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Demokrasi,* naskah Skripsi di Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009, hal.61. Diakses melalui http://library.walisongo.ac.id/digilib/files-/disk1/97/jtptiain-gdl-misbahulhu-4817-1-skripsi_-6.pdf pada Selasa, 10 Juni 2014 pukul 12.38 WIB.

yang telah dilakukan oleh Sultan, sekaligus pada saat yang bersamaan menilai proses demokrasi. Penafsiran tersebut juga merupakan bentuk penjabaran dari siasat-siasat yang dilakukan oleh Sultan untuk membentuk citra dirinya yang demokratis. Lima jalan dalam menafsirkan tapak politik Sultan ini kemudian akan membuktikan apakah ia pantas disebut sebagai sosok yang demokratis atau tidak berdasarkan tapak politik yang dilakukannya. Kepantasan itulah yang nantinya dilihat dari nilai-nilai demokrasi yang melekat pada dirinya.

### Jalan Pertama: Sultan Harus Mampu Menyelesaikan Permasalahan Secara Damai

Dalam konteks menafsirkan tindakan politik, menyelesaikan permasalahan secara damai dapat didefinisikan sebagai proses seseorang dapat menjadi aktor penengah yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Damai dalam hal ini berarti penyelesaian berbagai permasalahan tersebut jauh dari kekerasan dan tindakan-tindakan kriminal. Dengan kata lain, solusi yang ditawarkan tidak saling merugikan di antara pihak-pihak yang sedang bertikai atau bermasalah. Pada bagian ini, ada tiga hal penting yang menjadi landasan Sri Sultan HB IX dalam bertindak berdasarkan keputusan atau tindakan yang dilakukannya, baik dalam jati dirinya sebagai seorang raja, kepala daerah, atau pun politisi. Ketiga prinsip tersebut adalah bersikap diam dan mundur, membuka ruang dialog untuk mendapatkan solusi terbaik, dan ketegasannya dalam menentukan sikap. Ketiga

hal tersebut dapat dilihat sebagai latar belakang di dalam setiap keputusan atau kebijakan yang akan dikeluarkannya.

### *Diam dan Mundur: Strategi Sri Sultan HB IX Menyelesaikan Konflik*

> *"Sri Sultan HB IX adalah seorang demokrat dalam arti selalu menghargai pilihan pribadi dalam berpolitik," tulis wartawan Julius Pour.*[90]

Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan, Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII secara tegas menyatakan bahwa Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dalam rangka keamanan Yogyakarta, Sri Sultan HB IX membentuk sebuah organisasi semi militer yang kemudian dikenal dengan nama Laskar Rakyat Mataram. Pasukan tersebut pernah membantu pasukan republik melawan Inggris dalam pertempuran di Ambarawa. Menurut Prof. Drooglever, pada awal bulan November 1945, ketika pasukan Inggris dan Belanda mempersiapkan diri untuk menyerang republik, pemimpin dari berbagai organisasi militer berkumpul di Yogyakarta. Mereka menyusun organisasi militer serta memilih Sudirman sebagai panglima besar dan Sri Sultan HB IX sebagai menteri pertahanan.[91]

---

90 Lihat Julius Pour dan Nur Adji (ed.), *op.cit.,* hal. 289.

91 Nama Sri Sultan HB IX muncul karena dirinya juga memiliki peran vital dalam pembentukan organisasi semi militer di Yogyakarta yaitu Laskar Rakyat Mataram. Dengan demikian, Sri Sultan HB IX dinilai kompeten untuk membawahi bidang pertahanan. Selengkapnya lihat Julius Pour dan Nur Adji (ed.), *op.cit.*,hal. 287.

Ditetapkannya dua orang tersebut ternyata justru mengundang kecaman dari pemimpin politik di Jakarta, terlebih oleh Sutan Sjahrir yang baru saja diangkat sebagai perdana menteri sekaligus merangkap sebagai menteri luar dan dalam negeri. Dalam sikap politiknya, Sutan Sjahrir menyatakan bahwa seorang panglima dan menteri harus diangkat oleh pemerintah, bukan hasil dari kesepakatan anak buah mereka. Berangkat dari hal tersebut, Sutan Sjahrir kemudian memutuskan untuk membatalkan jabatan Sri Sultan HB IX dan menggantikannya dengan orang lain, yaitu Amir Syarifuddin yang merupakan sahabatnya sendiri.[92] Kedekatan Amir Sjarifuddin dan Sutan Sjahrir terbentuk karena mereka berada di dalam satu ideologi yang sama.[93]

Sebagai seorang komunis, Amir Sjarifuddin tentu tidak senang kepada Sri Sultan HB IX yang tidak lain adalah seorang raja yang identik dengan sosok feodal. Hal tersebut yang kemudian juga membuat Sutan Sjahrir menggeser posisi Sri Sultan HB IX sebagai menteri pertahanan. Pada

---

92 Sutan Sjahrir tidak mencopot Sudirman dari jabatannya sebagai panglima besar karena ditakutkan akan menimbulkan resistensi dari para pemimpin militer.

93 Kedekatan tersebut bisa dilihat ketika Amir Sjarifuddin mendirikan Partai Sosialis Indonesia (Parsi) dan Sutan Sjahrir mendirikan Partai Rakyat Sosialis (Paras). Dengan adanya kesamaan kebijakan politik yang anti-kapitalis dan anti-imperalis, maka kedua tokoh tersebut kemudian meleburkan Parsi dan Paras menjadi Partai Sosialis. Namun, kedekatan tersebut harus pecah ketika tahun 1948 para pengikut Sutan Sjahrir mendirikan partai baru dengan nama Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Amir Sjarifuddin tetap dengan nama lama yaitu Partai Sosialis. Ketika terjadi perpecahan, ternyata Amir Sjarifuddin berpaling kepada Muso yang tidak lain adalah tokoh komunis.

peristiwa tersebut, Sri Sultan HB IX cenderung diam dan tidak bereaksi ketika namanya dicopot dari jabatan awalnya sebagai menteri pertahanan, meskipun dirinya sendiri menampakkan pribadi seorang pemimpin yang demokratis. Strategi diam dan mundur tersebut tentu berdampak positif bagi posisi Sri Sultan HB IX karena perpecahan atau pun konflik yang bisa jadi akan terjadi apabila Sri Sultan HB IX tetap mempertahankan posisinya tersebut.

Prinsip diam dan mundur tersebut juga ditunjukkan Sri Sultan HB IX dalam perdebatan terkait dengan inisiator Serangan Umum 1 Maret 1949. Kesaksian Marsoedi yang menyatakan bahwa Sri Sultan HB IX-lah yang menjadi inisiator dari Serangan Umum 1 Maret 1949 mendapat bantahan dari Soeharto. Bahkan Soeharto mengaku bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Sri Sultan HB IX sebelum serangan besar tersebut dilakukan. Atas bantahan tersebut, Sri Sultan HB IX justru mengatakan kepada Marsoedi untuk bersikap tenang dan tidak perlu bereaksi berlebihan. Menurut keterangan Marsoedi, Sri Sultan HB IX pernah mengatakan bahwa tidak masalah apabila Seoharto memutarbalikkan fakta. Dari kejadian tersebut, Sri Sultan HB IX bisa mengambil kesimpulan bahwa orang berkuasa bisa memutarbalikan sejarah. Maka, Sri Sultan HB IX memutuskan untuk diam dan tidak bereaksi terhadap pernyataan Soeharto yang mengklaim bahwa dirinyalah yang menjadi inisiator serangan besar tersebut.

Prinsip Sri Sultan HB IX untuk diam tersebut pada dasarnya membawa dua dampak yang berlainan. Pada satu sisi, sikap diam Sri Sultan HB IX itu memang tidak menimbulkan

perpecahan di antara kedua pemimpin tersebut (presiden dan wakil presiden). Suhu perpolitikan nasional bisa saja menjadi naik ketika Sri Sultan HB IX juga mengklaim bahwa dirinyalah yang menjadi inisiator dari serangan tersebut. Di sisi lain, sikap diam Sri Sultan HB IX tersebut juga menimbulkan perdebatan terkait dengan inisiator dari serangan tersebut. Bahkan perdebatan itu masih berlanjut ketika Sri Sultan HB IX telah wafat. Dengan demikian, Sri Sultan HB IX secara politis dengan sikap diamnya berhasil menyelesaikan permasalahan secara damai (cenderung mengalah), meskipun dampaknya justru membawa perdebatan baru terkait peristiwa bersejarah tersebut.

Selanjutnya, prinsip diam dan mundur itu cukup terlihat ketika Sri Sultan HB IX memutuskan untuk mengakhiri jabatannya sebagai wakil presiden. Sebenarnya banyak pihak yang mendesak Sri Sultan HB IX untuk meneruskan jabatannya tersebut sebagai wakil presiden pada tahun 1978, termasuk salah satu rekannya yaitu Adam Malik. Adapun alasan yang dikemukakan Sri Sultan HB IX untuk mundur sebagai wakil presiden karena kesehatan matanya yang semakin memburuk dan tidak memungkinkan dirinya untuk menjabat sebagai wakil presiden. Di sisi lain, Sri Sultan HB IX juga menyatakan bahwa dirinya juga siap untuk mengabdi kepada bangsa dengan jalan yang lain yaitu melalui olahraga dan kepanduan. Dari pernyataan tersebut, Sri Sultan HB IX memang seolah-olah menghindar dari jabatan wakil presiden, meskipun dirinya juga berkomitmen untuk terus mengabdi kepada negara.

Berangkat dari hal itu, tidak ada yang mengetahui secara pasti alasan Sri Sultan HB IX memutuskan untuk tidak melanjutkan jabatannya sebagai wakil presiden. Banyak pengamat yang menyatakan bahwa mundurnya Sri Sultan HB IX dipicu karena ketidakcocokan dirinya dengan Soeharto yang mulai menampakkan karakter kepemimpinan yang cenderung korup. Hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari jabatan presiden yang telah melekat lebih dari 10 tahun di pundak Soeharto (1966-1978). Bahkan, banyak pengamat juga yang menyatakan bahwa keberadaan Sri Sultan HB IX di sisi Soeharto hanya dijadikan alat legitimasi Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya.

Sikap diam dan mundur dari Sri Sultan HB IX tersebut secara politis memang cenderung memberikan posisi aman bagi dirinya sendiri. Alasan kesehatan yang dinilai oleh sebagian pengamat bukan alasan utama mundurnya Sri Sultan HB IX tersebut setidaknya menjadi alat yang ampuh bagi Sri Sultan HB IX untuk meninggalkan jabatan wakil presiden. Sikap diam tentu bisa dilihat untuk menghindari perdebatan publik tentang alasan dirinya mundur dari jabatan wakil presiden. Bisa jadi akan bermasalah apabila Sri Sultan HB IX tetap melanjutkan jabatannya ketika Soeharto mulai menampakkan karakter pemerintahannya yang cenderung korup dan tidak demokratis secara lebih terbuka. Bagi Sri Sultan HB IX, melepaskan jabatan sebagai wakil presiden adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang bisa jadi ada di antara dirinya dengan Soeharto karena ketidakcocokan dalam menjalankan roda pemerintahan.

### *Membuka Ruang Dialog Sebagai Cara Terbaik Mendapatkan Jalan Keluar*

> *"Di suatu kerajaan seperti Yogya ini banyak hal yang dapat dan selama ini dihadapi dengan sikap terbuka sesuai dengan perkembangan zaman," ujar HB IX saat diwawancarai oleh Atmakusumah.*[94]

Untuk menghilangkan identitas dirinya sebagai seorang raja yang absolut, Sri Sultan HB IX menggunakan strategi membuka Keraton untuk masyarakat umum. Tidak hanya dibuka untuk tempat wisata, Keraton juga dibuka oleh Sri Sultan HB IX untuk seluruh golongan masyarakat yang ingin menyampaikan keluh kesahnya terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Strategi tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa Sri Sultan HB IX telah menghormati hak-hak masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasinya terkait berbagai hal yang cukup melekat dalam konsep demokrasi. Kehadiran Sultan untuk berada di tengah-tengah masyarakat membawa dampak pada citra bahwa Sultan adalah raja yang cukup demokratis karena berhasil memangkas jarak antara raja dan rakyat.

Sikap terbuka Sultan untuk berdialog sebenarnya sudah terlihat ketika Sri Sultan HB IX belum naik tahta. Sebelum Sri Sultan HB VIII wafat, dirinya telah memilih calon penerus tahta Keraton Yogyakarta yang bernama Dorodjatun. Pada era kolonialisme tersebut, Belanda mengambil alih kekuasaan Keraton sementara dengan cara membentuk sebuah panitia

94 Lihat Atmakusumah (ed.), *op.cit.*, hal. 109.

musyawarah keluarga yang diketuai oleh Dorodjatun. Menariknya, di dalam forum tersebut, Dorodjatun bukanlah orang tertua di antara saudara-saudaranya yang lain. Melalui musyawarah tersebut, Dorodjatun menanyakan kepada forum terkait siapakah yang ingin mengajukan diri sebagai Sri Sultan HB IX. Ternyata, tidak ada satu pun anggota forum yang ingin mengajukan dirinya sebagai Sri Sultan HB IX. Justru forum sepakat menunjuk Dorodjatun sebagai sosok yang menggantikan Sri Sultan HB VIII.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka bisa dilihat bahwa Dorodjatun telah menunjukkan sikap demokratisnya dengan mengajukan pertanyaan ke forum terkait dengan calon penerus tahta kerajaan, meskipun dirinyalah yang secara jelas telah ditunjuk oleh Sri Sultan HB VIII sebagai penggantinya. Cara yang digunakan oleh Dorodjatun dengan mengajukan pertanyaan tersebut, secara tidak langsung juga digunakan untuk melihat besaran legitimasi yang dimilikinya apabila dirinya menjadi penerus Sri Sultan HB VIII. Dengan adanya kesepakatan yang bulat dari forum, maka Dorodjatun bersedia menjadi penerus tahta kerajaan karena secara politis memiliki dukungan yang besar dari kerabat Keraton. Akhirnya, Dorodjatun dinobatkan sebagai putra mahkota dan raja pada tanggal 18 Maret 1940.

Ruang dialog tersebut juga pernah terjadi untuk menentukan penerus Sri Sultan HB IX yaitu dengan memanggil satu per satu putra-putranya.[95] Salah satu strategi yang

---

95 Lihat Susilo Harjono, *Kronik Suksesi Kraton Jawa 1755-1989,* PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2012, hal. 30.

digunakan oleh Sri Sultan HB IX untuk menentukan calon penerusnya yaitu dengan membuka ruang dialog terhadap keempat anak laki-lakinya. Selain lebih terlihat demokratis, alasan digunakannya strategi tersebut adalah untuk memilih calon penerus tahta secara lebih adil. Hal tersebut menjadi sesuai karena Sri Sultan HB IX tidak mengangkat permaisuri dari kelima istri yang dimilikinya sehingga akan sulit untuk menentukan calon pewaris tahta. Fenomena tersebut pada dasarnya belum pernah terjadi pada suksesi-suksesi raja sebelum Sri Sultan HB IX.

Tidak hanya ditujukan kepada masyarakat dan keluarganya, Sri Sultan HB IX juga selalu membuka ruang dialog dengan Belanda di era kolonialisme. Selain menghindari konflik bersenjata, prinsip tersebut juga digunakan untuk menguatkan posisi kekuasannya. Sebelum dinobatkan menjadi raja, salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Dorodjatun adalah menandatangani kontrak politik yang disusun dengan pihak Belanda. Tidak seperti raja-raja pendahulunya, Dorodjatun justru tidak ingin menandatangani isi kontrak politik tersebut sebelum dibacanya secara cermat. Setelah dicermati, Dorodjatun secara langsung membuka ruang dialog dengan pihak Belanda yang saat itu diwakili oleh Gubernur Adam. Melalui ruang dialog tersebut, Dorodjatun memperdebatkan beberapa hal terkait dengan pengaturan Pepatih Dalem, Dewan Agung, dan pasukan Keraton. Bahkan beberapa keinginan Dorodjatun untuk merevisi isi dari ketiga hal tersebut justru terlihat demokratis. Salah satu contohnya, Dorodjatun ingin anggota Dewan Agung dipilih langsung oleh rakyat dan bukan oleh Sultan ataupun pihak Belanda.

Urusan lain yang juga penting untuk diselesaikan oleh Sri Sultan HB IX yaitu dengan kemungkinan munculnya dualisme antara Keraton Yogyakarta dan Pakualaman. Pada era kepemimpinan Sri Sultan HB I, konflik internal Keraton membawa perpecahan sehingga Sri Sultan HB I harus memberikan kepada salah satu putranya kekuasaan atas tanah merdeka sebuah kerajaan yang sekarang bernama Pakualaman. Adapun letak ibukota dari kerajaan tersebut berada di dalam bagian Keraton Yogyakarta sehingga pola pemerintahannya mengalami perubahan. Pemisahan tersebut ditandai dengan didirikannya tembok keliling atau *ringmuur*. Dengan demikian, kekuasaan yang dimilikinya cenderung terpencar-pencar. Hal tersebut cukup efektif bagi pemerintah kolonial (VOC) untuk mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.

Berangkat dari kondisi dan sejarah tersebut, Sri Sultan HB IX berinisiatif untuk membuka dialog dengan Paku Alam VIII. Dialog tersebut dibangun dalam rangka menghindari benih-benih perpecahan yang sekiranya bisa terjadi karena wilayah kerajaannya saling tumpang tindih. Hal itu tidak dapat dilepaskan juga dari kemungkinan pihak pemerintah kolonial untuk memecah belah kekuasaan raja Jawa. Dengan demikian, segala bentuk pemisahan dihapus dan jawatan-jawatan pemerintahan kedua kerajaan tersebut digabung menjadi satu. Hasilnya, kedua pemimpin tersebut justru selalu kompak dalam menghadapi berbagai permasalahan, khususnya yang terkait dengan kondisi Yogyakarta itu sendiri. Banyak kebijakan yang dikeluarkan atas persetujuan bersama tanpa merugikan salah satu pihak.

Dari segi pemerintahan, Sri Sultan HB IX memiliki visi untuk memandirikan masyarakatnya. Hal tersebut ditunjukkan Sri Sultan HB IX dengan memberikan otonomi kepada daerah kabupaten dan kotamadya di awal masa kemerdekaan. Sri Sultan HB IX memiliki pemikiran bahwa sudah saatnya masyarakat mampu menyelenggarakan sistem pemerintahannya sendiri. Berangkat dari hal tersebut, Sri Sultan HB IX meminta kepada masyarakat untuk menggunakan sarana musyawarah sebagai bagian dari pengelolaan sistem pemerintahannya sendiri-sendiri, mulai dari lingkup yang paling kecil (desa) hingga ke lingkup yang paling besar (provinsi). Dengan demikian, apabila ada sebuah permasalahan di desa, maka masyarakat dalam lingkup desa tersebut harus menggunakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kemudian bisa dibawa ke tingkat kecamatan, kabupaten, hingga ditangani langsung oleh Sultan sebagai kepala daerah.

Keinginan Sri Sultan HB IX tersebut pada dasarnya juga menghindarkan masyarakat dari konflik yang bisa terjadi apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat. Oleh karenanya, Sri Sultan HB IX membuka peluang supaya permasalahan tersebut bisa dibawa ke tingkat yang lebih tinggi (kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi). Visi Sri Sultan HB IX itu secara tidak langsung juga mendewasakan masyarakat supaya tidak lagi bergantung kepada Sultan. Dengan kata lain, Sri Sultan HB IX ingin menggeser pola pikir masyarakat menuju ke arah yang demokratis karena adanya tuntutan zaman tanpa membuang

konsep lama demokrasi khas Indonesia yaitu musyawarah yang sampai saat ini masih dianggap cara demokratis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

### *Tegas dalam Menentukan Sikap*

> *"Saya mengajukan banyak protes atas perlakuan Jepang terhadap penduduk di daerah saya. Untuk itu saya sering diberi teguran di Jakarta, yaitu pada kesempatan para Raja Jawa Tengah dipanggil oleh pimpinan pemerintah militer Jepang," ujar Sri Sultan HB IX dalam wawancara dengan Atmakusumah.*[96]

Ketika Jepang berhasil mengambil alih sistem pemerintahan kolonial di Indonesia, termasuk di Yogyakarta, adalah kali pertama Sri Sultan HB IX mengenal Soekarno sebagai pemimpin republik. Taktik yang digunakan oleh Soekarno pada waktu zaman pendudukan Jepang adalah mengajak Jepang untuk bekerja sama dalam rangka memperoleh kemerdekaan. Meskipun demikian, republik harus membayar mahal karena Jepang mewajibkan para penduduk bekerja sebagai romusha dalam rangka membantu Jepang mempersiapkan perang Asia Timur Raya. Berbagai pembangunan fasilitas transportasi dan pertanian dikerjakan oleh para penduduk. Akibatnya banyak penduduk yang tewas karena pekerjaan berat tersebut tidak diimbangi dengan perhatian pemerintah kolonial Jepang untuk membiayai hidup mereka.

---

96 Lihat Atmakusumah (ed.), *op.cit.*, hal. 58.

Pekerjaan sebagai romusha tersebut juga berimbas pada masyarakat Yogyakarta yang pada waktu itu masih berbentuk kerajaan (belum bergabung dengan republik). Sri Sultan HB IX sebagai pemimpin daerah dianggap sebagai penguasa Yogyakarta oleh Jepang. Bahkan Jepang juga memberikan kewenangan kepada Sri Sultan HB IX untuk mengatur daerahnya sendiri, meskipun secara tidak langsung Sultan juga harus tunduk kepada pemerintah kolonial Jepang. Tidak ingin rakyatnya ditindas oleh pemerintah kolonial Jepang, Sri Sultan HB IX membuat siasat supaya permasalahan tersebut tidak berimbas kepada rakyatnya. Cara yang dilakukan Sri Sultan HB IX juga tidak melalui konfrontasi dengan pemerintah kolonial Jepang, tetapi dengan cara kompromi dan lobi politik supaya rakyatnya tidak menjadi korban.

Selain melalui cara-cara tanpa konfrontasi, Sultan juga menggunakan cara yang terkesan curang terutama untuk mengelabuhi pemerintah Jepang waktu itu. Misalnya, dengan cara memanipulasi data pertanian dan kesejahteraan penduduk, Sri Sultan HB IX meminta bantuan kepada Jepang untuk membuat saluran irigasi yang nantinya dikenal dengan sebutan Selokan Mataram. Keinginan Sultan pada waktu itu disetujui oleh pihak Jepang dan dengan segera sultan meminta para rakyatnya untuk membangun selokan tersebut. Cara Sri Sultan HB IX untuk menghindarkan rakyatnya dari kekejaman Jepang pun berhasil dilakukan dengan cara yang relatif damai melalui kompromi. Keberhasilan Sultan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian rakyat juga memunculkan Sultan sebagai pahlawan bagi penduduk Yogyakarta. Ketegasan sikapnya untuk melindungi rakyat Yogyakarta dari

berbagai bentuk kolonialisme telah dibuktikannya dengan menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan jauh dari kekerasan.

Kebijakan lain yang membuat Sri Sultan HB IX tegas adalah anjuran kepada masyarakat Yogyakarta untuk tidak keluar rumah ketika proses penarikan tentara Belanda dilaksanakan pada tahun 1949.[97] Sri Sultan HB IX yang pada waktu itu menjadi koordinator keamanan secara tegas menjamin tidak ada gesekan senjata antara tentara Belanda dengan pasukan republik. Bahkan Sri Sultan HB IX turun ke lapangan untuk mengawal jalannya prosesi penarikan tentara Belanda. Bersama dengan Paku Alam VIII, Sri Sultan HB IX mengawal pasukan Belanda untuk meninggalkan Yogyakarta, termasuk memberikan arahan kepada tentara republik untuk mengambil alih wilayah yang telah ditinggalkan oleh pasukan Belanda. Dengan perintah tersebut, maka Sri Sultan HB IX berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai. Lebih jauh, hal tersebut juga membuktikan bahwa Sultan masih memiliki wibawa yang besar dihadapan rakyatnya.

### Jalan Kedua: Sultan Harus Mampu Melakukan Perubahan Secara Damai

Salah satu nilai penting dari demokrasi adalah menjamin perubahan secara damai di dalam sebuah masyarakat. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan-perubahan yang ditujukan untuk meraih kesejahteraan masyarakat

97 Lihat R.Eddy Soekamto, *Yogyakarta Ibukota Perjuangan,* NARASI, Yogyakarta, 2009, hal. 77.

supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga segi sosial, budaya, dan sistem politik. Pada sisi yang lain, masyarakat cenderung memiliki karakter cair sehingga bisa berubah setiap waktu dan cenderung sulit untuk diprediksi. Dengan demikian, demokrasi setidaknya menjamin adanya perubahan sosial yang dilakukan oleh pemimpin dalam masyarakat secara damai dan jauh dari aspek-aspek kekerasan. Selain itu, perlu disadari pula bahwa dalam demokrasi, perubahan yang dilakukan tidak bisa dipaksakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, menjadi penting bagi seorang pemimpin supaya perubahan yang dilakukannya tidak dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah hal yang mengekang atau memaksa kebebasan.

Dalam konteks menafsirkan tapak politik Sri Sultan HB IX tentang demokrasi, ada dua prinsip penting yang dipegang teguh oleh Sri Sultan HB IX dalam melakukan perubahan di dalam masyarakat secara damai. Dua prinsip tersebut yaitu perubahan yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX mengikuti perkembangan dunia Barat (sebagai acuan) tanpa meninggalkan budaya Timur dan melakukan modernisasi sistem pemerintahan di Yogyakarta. Sebagai sosok yang memiliki kekuasaan di Yogyakarta, Sri Sultan HB IX pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan sebuah perubahan menuju ke arah yang lebih demokratis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mengikuti perkembangan zaman. Dua hal itulah yang kemudian akan dipaparkan di dalam bagian ini.

### *Mengikuti Kemajuan Barat Tanpa Meninggalkan Budaya Timur*

> *"Al heb ik een uitgesproken Westerse opvoeding gehad, toch ben en bliff ik in allereerste plaats Javaan – Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, tetapi pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa," ujar HB IX di dalam pidato penobatannya.*[98]

Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang memiliki nama kecil Dorodjatun memiliki keistimewaan latar belakang yang berbeda apabila dibandingkan dengan raja-raja Keraton Yogyakarta sebelumnya. Keistimewaan tersebut terletak pada kisah hidupnya sebelum dinobatkan sebagai seorang raja yang menghabiskan masa mudanya di luar tembok Keraton, bahkan menghabiskan waktu mudanya di Belanda. Dorodjatun yang telah terbiasa dengan cara hidup orang Belanda akhirnya harus kembali ke Keraton dan mengikuti aturan-aturan tradisional Keraton ketika dirinya dinobatkan sebagai seorang Sultan. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi pemikiran seorang Dorodjatun bahwa dirinya harus mempertahankan darah feodalnya yaitu menjadi seorang raja yang penobatannya dilakukan secara turun-temurun (kekuasaan didapatkan berdasarkan keturunan).

Bagi masyarakat Yogyakarta, Sultan adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan politik, militer, dan keagamaan yang absolut dan diakui secara tradisional.[99] Meskipun telah mengenyam pendidikan Barat, Sri Sultan HB IX masih

---

98 Lihat Atmakusumah (ed.), *op.cit.,* hal. 47.

99 Lihat Selo Soemardjan, *Perubahan....op.cit.,* hal. 24.

mempertahankan sebutan dirinya sebagai pemegang kekuasaan di bidang politik, militer, dan keagamaan. Istilah yang melekat tersebut pada dasarnya ditunjukkan Sultan pada masa kolonialisme Belanda, Jepang, hingga masa mempertahankan kemerdekaan. Kekuasaan tradisional yang masih melekat itulah yang kemudian disadari secara sempurna oleh Sri Sultan HB IX untuk melakukan sebuah perubahan menuju ke arah yang lebih demokratis dan modern. Dengan adanya legitimasi yang dimilikinya sebagai seorang raja, Sri Sultan HB IX menyadari bahwa pada saat itulah dirinya bisa melakukan perubahan di dalam masyarakat yang masih menganggapnya sebagai sosok yang pantas untuk ditaati.

Keinginan Sri Sultan HB IX untuk mempertahankan budaya aslinya tersebut tercermin dari pidato penobatan Sri Sultan HB IX yang menyatakan bahwa meskipun dirinya telah mengenyam pendidikan Barat, ia adalah tetap orang Jawa. Pernyataan yang penuh makna tersebut pada dasarnya memang diaplikasikan secara konsisten oleh Sultan. Meskipun budaya demokrasi tidak selaras dengan konsep feodalisme, sebagai orang Jawa (terutama sebagai seorang raja), Sultan tetap mempertahankan kekuasaannya dengan membuka peluang bagi keturunannya untuk meneruskan kekuasaannya di Keraton. Bagi Sultan, memberikan kekuasaan kepada keturunannya bukanlah hal yang salah di era demokratisasi. Hanya saja, Sri Sultan HB IX berpandangan bahwa hal tersebut patut untuk dipertahankan sebagai bagian dari demokrasi budaya, meskipun ke depan seorang sultan yang bertahta tidak memiliki kekuasaan yang besar atas daerahnya sendiri.

Pada sisi yang lain, Sri Sultan HB IX ingin memperkenalkan demokrasi kepada masyarakat secara perlahan-lahan. Sebagai seorang raja, Sri Sultan HB IX adalah sebuah contoh pribadi yang paripurna. Melalui pemikiran latar belakang yang dimilikinya, dirinya mampu mempertemukan Barat dan Timur yang telah diakrabinya. Hal itulah yang menyebabkan demokratisasi di Keraton berhasil dilakukan tanpa harus membuat Keraton kehilangan pamornya.[100] Justru hal yang muncul adalah Keraton mampu melintasi batasan waktu pada zaman revolusi kerajaan sehingga Keraton tetap eksis di tengah arus demokratisasi yang secara perlahan menggeser kekuasaan-kekuasaan monarki. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX cenderung damai.

Satu hal penting yang perlu disadari bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan Sri Sultan HB IX tidak serta merta mengubah seluruh tatanan sistem pemerintahan atau adat istiadat yang selama ini dilakukan secara turun-temurun. Dengan kata lain, meskipun Sri Sultan HB IX melakukan modernisasi di lingkungan Keraton ataupun masyarakat sesuai dengan budaya Barat, dirinya tetap mempertahankan adat istiadat yang masih hidup di dalam Keraton atau pun masyarakat. Sebagai salah satu contohnya, Sri Sultan HB IX tetap mempertahankan ritual tradisional. Hanya saja, ia menyederhanakan ritual tersebut tanpa menghilangkan esensi atau makna dari upacara tersebut. Langkah tersebut diambil supaya masyarakat juga tidak mengalami kegoncangan yang luar biasa akibat perubahan-perubahan yang ia lakukan.

---

100 Lihat Sunardian Wirodono, *op.cit.*, hal. 31.

Meskipun demikian, kebijakan yang dikeluarkan oleh Sri Sultan HB IX cenderung terlihat kontradiktif karena melakukan demokratisasi tanpa menghapus sistem monarki yang masih ada di lingkungan Keraton. Alasannya, Sri Sultan HB IX tidak dapat mengelak dari berbagai perubahan sistem pemerintahan. Seiring dengan adanya demokratisasi, sistem monarki secara perlahan-lahan digeser dan dihancurkan dengan sistem yang baru. Adanya fenomena tersebut membuat Sri Sultan HB IX sadar bahwa khasanah budaya masa lalu, terutama yang mengawetkan sistem feodalisme, tidak akan mampu mengakomodasikan efek konstruktif dari perubahan itu sendiri.[101] Dengan kata lain, seiring dengan perubahan tersebut, Sri Sultan HB IX menyadari bahwa sistem monarki juga akan digeser dengan sistem yang baru. Oleh karena itu, demokratisasi dilihat sebagai sebuah kebutuhan yang harus segera dilakukan.

Berangkat dari hal tersebut, maka Sri Sultan HB IX secara sadar perlu untuk melakukan perubahan dalam rangka mempertahankan kekuasaan monarki yang secara tidak langsung masih melekat dengan dirinya, termasuk Keraton. Keputusan yang diambil adalah dengan mengintegrasikan Yogyakarta ke dalam RI. Pengintegrasian tersebut tentu menjadi langkah maju bagi Yogyakarta karena republik diyakini mampu menampung arus perubahan yang disodorkan oleh proses modernisasi. Pada sisi yang lain, pengintegrasian tersebut secara tidak langsung juga menyembunyikan identitasnya sebagai sosok feodal dan Keraton sebagai

101 Lihat Parni Hadi dan Nasyith Majidi (ed.), *op.cit.*, hal. 182.

lingkungan hidupnya.[102] Secara perlahan, Sri Sultan HB IX memperkuat posisinya tersebut dengan melakukan perubahan melalui demokratisasi di Yogyakarta.

### *Modernisasi Sistem Pemerintahan*

> *"Memang jalan ke arah industrialisasi ini harus kita jalani dengan sangat berhati-hati. Tidak boleh terlalu cepat karena akan timbul vakum pada pikiran rakyat, ini sangat berbahaya, rakyat bisa bingung. Jadi harus dilaksanakan secara bertahap," ujar HB IX dalam tanya jawab dengan rakyat.*[103]

Salah satu gagasan yang dimiliki Sri Sultan HB IX adalah mengubah bentuk monarki yang identik dengan Keraton Yogyakarta dengan sistem aristokrasi demokrasi atau mengarah pada prinsip-prinsip demokrasi. Perubahan yang dilakukan di dalam Keraton tersebut nantinya juga berdampak pada sistem pemerintahan terutama dalam tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu corak khas dari sistem monarki adalah kekuasaan seorang penguasa (raja) yang absolut sehingga, seorang raja atau

---

102 Feodalisme tersebut bisa dilihat dari adanya pergantian kekuasaan di Keraton yang menggunakan sistem monarki pada umumnya yaitu bahwa kekuasaan akan beralih kepada orang lain berdasarkan keturunannya. Sampai saat itu, prinsip tersebut masih dipegang Keraton Yogyakarta sebagai salah satu lingkungan yang berbentuk kerajaan di tengah sistem demokrasi yang dianut Republik Indonesia. Pada sisi yang lain, Sri Sultan HB IX menyatakan bergabung dengan republik yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat melalui presiden, bukan seorang raja.

103 Lihat Julius Pour dan Nur Adji (ed.), *op.cit.*, hal. 205.

sultan sebagai penguasa dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dengan kata lain, Sultan bisa mengatur masyarakat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Pada sisi yang lain, demokrasi menekankan pada adanya persebaran kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan rakyat sehingga penguasa dapat dikontrol oleh rakyat dan tidak dapat berbuat sewenang-wenang kepada rakyat yang dipimpinnya.

***Tabel 1***

**Perubahan Bentuk Pemerintahan DIY**
**Di Bawah Sri Sultan HB IX[104]**

| Bentuk | Monarki | Demokrasi |
|---|---|---|
| **Sistem Pemerintahan** | Sri Sultan HB IX sebagai penguasa tunggal, komunikasi melalui bangsawan dan Patih | Dibuat lembaga penyerap aspirasi rakyat. Keberadaan Patih dihapus |
| **Agama** | Dalam sejarahnya, keberadaan sultan berpengaruh besar dalam perkembangan Islam | Masyarakat diberi kebebasan untuk memeluk dan mengekspresikan agamanya masing-masing |
| **Strategi Pembangunan** | Terfokus pada kebijakan sultan | Secara umum menggunakan pendekatan teori modernisasi |

104 Lihat Selo Soemardjan, *Perubahan.....op.cit.*, hal. 59.

| Bentuk | Monarki | Demokrasi |
|---|---|---|
| **Sistem Ekonomi** | Sesuai keinginan sultan, biasanya feodalisme | Memberi ruang pasar melalui peningkatan perdagangan |
| **Sumber Legitimasi Kekuasaan** | Oligarki, aristokrasi, atau pemberian kehormatan | Tahta untuk rakyat atau sesuai aspirasi rakyat |
| **Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat** | Masyarakat adalah pelaksana dari perintah sultan | Pemerintah berfungsi sebagai mediator dan fasilitator berbagai kepentingan rakyat |

Apabila berbicara mengenai perubahan yang terjadi, maka hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari pelopor perubahan yang merupakan orang atau kelompok yang meninggalkan masa lampau menuju zaman baru dengan menetapkan kaidah sistem sosial yang diperbaharui. Pada kasus di Yogyakarta, perubahan politik dan pemerintahan diprakarsai oleh Sri Sultan HB IX atau oleh pemerintah provinsi di bawah kepemimpinannya.[105] Perubahan yang dilakukan oleh Sultan merupakan salah satu hal yang menarik untuk dilihat karena perubahan tersebut dilakukan dari atas ke bawah melalui kekuasaan penuh yang dimilikinya. Secara perlahan, Sri Sultan

105 Sejak akhir masa kolonialisme Belanda, perubahan sosial yang terjadi di Yogyakarta bisa dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan yang disengaja dan perubahan yang tidak disengaja. Perubahan yang disengaja adalah perubahan yang direncanakan oleh pelopor perubahan, sedang perubahan yang tidak disengaja adalah perubahan yang sebelumnya tidak direncanakan atau diketahui oleh masyarakat. Selengkapnya *ibid.*, hal. 448.

HB IX berhasil meyakinkan masyarakat bahwa perubahan yang diprakarsainya merupakan salah satu bentuk kebaikan demi masa depan masyarakat Yogyakarta itu sendiri.

Dengan mengacu pada modernisasi yang dialaminya, maka Sri Sultan HB IX memiliki keinginan untuk menggeser sistem monarki absolut menuju aristokrasi demokrasi dengan melepaskan identitas Keraton Yogyakarta yang berkuasa penuh atas wilayah dan rakyatnya, serta melakukan mengintegrasikan ke wilayah RI.[106] Dilepaskannya identitas Keraton Yogyakarta yang berkuasa penuh terhadap rakyatnya berdampak pada pola-pola perubahan yang membagi kekuasaannya kepada rakyat. Secara perlahan masyarakat memiliki kekuasaan untuk turut serta berperan dalam sistem pemerintahan sehingga dimensi partisipasi masyarakat dapat terbuka lebar. Dengan demikian, Sri Sultan HB IX menginginkan supaya kekuasaan tidak lagi bertumpuk di pundaknya, tetapi secara perlahan disebar kepada masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk perubahan yang dilakukan dalam bidang pemerintahan, Sri Sultan HB IX mengubah sistem pemerintahan yang tersentralisasi dan otokratis menjadi pemerintahan yang terdesentralisasi dan demokratis.[107] Hal ini berarti bahwa Sri Sultan HB IX menginginkan supaya masyarakat terlibat langsung dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Tindakan Sri Sultan HB IX sejalan dengan prinsip yang dipegang dirinya untuk mengubah istilah *nderek*

---

106 Lihat Adhi Darmawan, *Jogja Bergolak Diskursus Keistimewaan DIY Dalam Ruang Publik,* Kepel Press, Yogyakarta, 2010, hal. 15.

107 Lihat Selo Soemardjan, *Perubahan.....op.cit.,* hal. 450.

*kerso dalem* menjadi prinsip *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.*[108] Istilah *nderek kerso dalem* mengandung arti bahwa masyarakat harus selalu tunduk dan patuh terhadap perintah Sultan di bidang apapun. Istilah yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara lebih memberikan kesempatan masyarakat untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya masing-masing.

Pemberian otonomi atau kewenangan kepada masyarakat untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya tidak dapat dilepaskan dalam pandangan Sri Sultan HB IX terhadap masa depan bangsa. Ada dua hal penting yang menjadi alasan mendasar dibukanya peluang untuk memberikan otonomi kepada masyarakat yaitu Sri Sultan HB IX memiliki keyakinan bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan pada sisi yang lain, Sri Sultan HB IX menghendaki supaya masyarakatnya menjadi komunitas-komunitas yang mandiri.[109] Berangkat dari kedua alasan tersebut, Sri Sultan HB IX memiliki pandangan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, masyarakatnya harus memiliki kemampuan dan kemandirian untuk menghadapi tuntutan zaman yang semakin modern

---

108 Istilah *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani* merupakan konsep yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara yang berarti bahwa seorang pemimpin di depan harus bisa memberikan contoh kepada rakyatnya, di tengah mengayomi atau mengembangkan prakarsa rakyatnya, dan di belakang memberikan dorongan atau semangat kepada rakyatnya. Lihat Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *op.cit.,* hal. 222.

109 Disampaikan oleh Aldino Deanasa, salah satu keturunan atau trah dari Sri Sultan Hamengku Buwono II. Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015.

dan demokratis. Oleh karena itu, Sri Sultan HB IX tidak khawatir ketika kekuasaan yang dimilikinya harus disebar karena hal tersebut justru menguntungkan Sultan supaya tidak lagi dinilai sebagai seorang penguasa yang absolut.

### Jalan Ketiga: Sultan Menginisiasi Pergantian Kekuasaan Secara Teratur

Pergantian kekuasaan secara teratur merupakan salah satu esensi penting dari demokrasi. Demokrasi juga menjamin bahwa kekuasaan yang dimiliki seseorang sudah selayaknya dibatasi melalui pemilihan penguasa secara rutin atau teratur. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Sri Sultan HB IX sebagai sosok yang dipercayai sebagai pencetus demokratisasi di Yogyakarta pada dasarnya telah menerapkan kebijakan terkait dengan pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum. Pada konteks tersebut, sisi kedemokratisan Sri Sultan HB IX dapat ditafsirkan melalui tiga hal yang setidaknya menjadi prinsip selama masa hidupnya. Ketiga itu adalah bahwa rakyat memiliki hak untuk mendapatkan kekuasaan secara bergantian, kekuasaan yang dimiliki harus dibatasi, dan menurut pernyataan Sri Sultan HB IX, seorang sultan tidak secara otomatis menjadi kepala daerah atau gubernur DIY.

Pada poin ketiga ini, ada kaitan yang menarik dari tindakan politik yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX. Meskipun nilai demokrasi ini tidak termasuk dalam demokrasi substansial, pembahasan terkait dengan pemilihan pemimpin secara teratur ini menjadi hal yang kontradiktif di Yogyakarta. Secara prosedural, Sri Sultan HB IX menghendaki supaya

masyarakat memiliki pemimpinnya sendiri dengan cara pemilihan umum yang mana rakyat memilih langsung pemimpinnya sendiri, baik di tingkat kota atau kabupaten hingga ke tingkat desa. Menariknya, nilai demokrasi prosedural ini justru tidak mampu menyentuh kekuasaan Sri Sultan HB IX sebagai seorang kepala daerah tingkat provinsi sekaligus sebagai pencetus demokrasi di Yogyakarta. Artinya, pada saat bersamaan ia menjabat sebagai Raja Keraton Yogyakarta sekaligus sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### *Rakyat Berhak Mendapatkan Kekuasaan*

> *"Bahwa pada tanggal 29-10-1945 oleh Komite Nasional Daerah Jogjakarta telah dibentuk suatu Badan Pekerja yang dipilih dari anggota-anggotanya atas kehendak rakyat dan panggilan masa," Cuplikan Amanat 30 Oktober 1945.*[110]

Sri Sultan HB IX sebagai penguasa Yogyakarta memiliki cara tersendiri untuk memperkenalkan konsep demokrasi kepada rakyatnya, khususnya dalam hal melakukan pergantian kekuasaan. Pada tahun 1951, Sri Sultan HB IX memelopori pemilihan umum sebagai usaha untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Dalam usahanya tersebut, Sri Sultan HB IX berhasil membangun citra bahwa raja Yogyakarta adalah sosok yang demokratis karena dengan cerdas mendistribusikan kekuasaannya secara

110 Lihat Soedarisman Poerwokoesoemo, *op.cit.*, hal. 19.

merata kepada berbagai elemen publik.[111] Pemikiran Sultan untuk menyentuhkan kekuasaannya kepada rakyat pada dasarnya bisa dilihat ketika Sri Sultan HB IX membentuk sebuah lembaga legislatif bernama DPRD yang sebelumnya merupakan lembaga KNID. Melalui lembaga legislatif tersebut, masyarakat umum diberi kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan dengan jalur pengangkatan sebelum diselenggarakannya pemilihan umum tahun 1951.

Pengalaman tersebut setidaknya memperlihatkan bahwa kekuasaan Keraton Yogyakarta yang ekslusif kemudian dibuka oleh Sri Sultan HB IX kepada rakyatnya dengan artian bahwa nalar demokrasi mulai diperkenalkan di dalam masyarakat.[112] Pada sisi yang lain, hal tersebut juga menjadi strategi politik Sri Sultan HB IX untuk melekatkan dirinya kepada rakyat sehingga nanti pada gilirannya memperoleh pengakuan dari rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk mendapatkan kekuasaan secara teratur dengan cara yang legal dan sesuai dengan konstitusi. Berangkat dari hal itu, tindakan Sri Sultan HB IX untuk membentuk sebuah sistem demokratis di dalam sebuah daerah monarki telah berhasil dilaksanakan secara sempurna dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat karena dirinya berperan sebagai pelopor untuk memperkenalkan kekuasaan kepada rakyat.

Selain itu, salah satu tujuan yang dimiliki Sri Sultan HB IX untuk membentuk lembaga legislatif adalah memberikan

---

111 Lihat M.Nazir Salim, *Membayangkan Demokrasi Menghadirkan Pesta: Pemilihan Umum Yogyakarta 1951,* Ombak, Yogyakarta, 2014, hal. 5.

112 *Ibid.,* hal. 10.

kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, meskipun Keraton sendiri sudah membuka pintu-pintunya kepada masyarakat untuk menyampaikan keluh kesahnya. Sejarawan P.J Suwarno dalam disertasinya, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, menyatakan bahwa secara lugas Sri Sultan HB IX mengemukakan pemikirannya tentang demokrasi yang memberikan keleluasaan kepada wakil rakyat untuk berbicara dan menyuarakan kepentingan rakyat yang diwakilinya.[113] Hal tersebut mengandung arti bahwa Sri Sultan HB IX ingin kekuasaan yang dijalankannya bersama dengan wakil rakyat diselenggarakan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Salah satu bentuk manifestasi dari pemikiran Sri Sultan HB IX terkait dengan kepentingan rakyat, yaitu ketika kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII harus juga mendapatkan persetujuan dari ketua BP KNID yang merupakan representasi dari rakyat. Makna yang ingin ditekankan Sri Sultan HB IX yaitu untuk menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasinya melalui wakil-wakilnya yang berada di lembaga legislatif supaya kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Menariknya, Sri Sultan HB IX memainkan kartu yang cukup penting ketika memutuskan untuk membentuk lembaga legislatif. Secara normatif, apabila DPRD dipilih

---

113 Lihat Aloysius Soni (ed.), *"Monarki Yogya" Inkonstitusional?*, Kompas, Jakarta, 2011, hal. 71.

secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, maka kepala daerah juga seharusnya juga diberlakukan hal yang sama yaitu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pada konteks itu, Sri Sultan HB IX mampu memainkan kartu tersebut sehingga dengan yakin rakyatnya tidak akan menyentuh kursi kekuasaan yang ada digenggamannya.[114] Apabila dicermati lebih mendalam, pada dasarnya kebijakan tersebut cenderung kontradiktif dengan demokrasi ala Barat yang mendorong bahwa lembaga legislatif ataupun eksekutif harus tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Dengan diberlakukannya pemilihan umum secara teratur, semua rakyat yang memiliki kemampuan dimungkinkan bisa mencalonkan diri menjadi penguasa atau wakil rakyat dan setelah terpilih tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat yang dipimpinnya. Hal ini karena melalui pemilihan umum, rakyat dapat secara langsung menentukan wakil rakyat atau pemimpinnya. Oleh karena itu, dapat ditarik benang merah bahwa pendistribusian kekuasaan dengan cara-cara pemilihan umum dianggap demokratis sekaligus memberikan kesan bahwa rakyat akan mudah memahami bahwa kekuasaan raja tetap mutlak di tangan Sri Sultan HB IX yang sekaligus menjadi kepala daerah. Lebih jauh lagi, Sri

---

114 Pada saat memperkenalkan sistem pemilu tersebut, Sri Sultan HB IX berhasil menggandeng Paku Alam VIII untuk mengerjakan proyek besar tersebut. Hal itu dilakukan karena dalam waktu yang bersamaan, Sri Sultan HB IX juga dipercaya sebagai menteri sehingga fokusnya terpecah. Meskipun perannya diganti oleh Paku Alam VIII, Sri Sultan HB IX tetap menjadi titik konsultannya yang juga tetap memantau setiap perkembangan pemilihan umum di Yogyakarta. Selengkapnya lihat M.Nazir Salim, *op.cit.,* hal. 128.

Sultan HB IX juga telah membuktikan komitmennya untuk selalu melibatkan masyarakat di dalam setiap kebijakan yang akan diterapkannya di Yogyakarta.

Berangkat dari hal tersebut, sebenarnya dapat dicermati bahwa keinginan Sri Sultan HB IX untuk tetap mempertahankan kekuasaan lamanya masih ada. Dengan kata lain, pemikiran Sri Sultan HB IX yang terpengaruh budaya Barat diimplementasikan melalui pembentukan lembaga legislatif yang memungkinkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Pada sisi yang lain, Sri Sultan HB IX tetap mempertahankan budaya lama dengan dirinya sebagai pemegang kekuasaan yang utama. Fenomena tersebut pada dasarnya sejalan dengan tindakan politik Sri Sultan HB IX bahwa kekuasaan yang dimilikinya pada dasarnya ingin disebarkan kepada rakyat tanpa dirinya kehilangan pamor atau kekuasaan secara keseluruhan.

Selanjutnya, sebagai salah satu sosok yang dipercayai sebagai pelopor demokratisasi di Yogyakarta, Sri Sultan HB IX pada dasarnya berkomitmen terhadap aspek tersebut. Komitmennya ditunjukkan ketika dirinya memaksakan diri untuk pulang ke Yogyakarta dalam rangka memantau situasi ketika pemilihan umum 1987 sedang dilaksanakan. Kedatangan Sri Sultan HB IX ke kampung halaman tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dirinya terhadap rakyatnya sendiri. Munculnya berbagai isu (untuk tidak memberikan hak suara) menjelang hari pemungutan suara pada tanggal 23 April 1987 waktu itu pada dasarnya membuat Sri Sultan HB IX prihatin. Oleh karena itu, Sri Sultan HB IX mengeluarkan pernyataan kepada rakyat untuk dengan

tenang melaksanakan tugas sebagai warga negara yang baik dengan cara membanjiri tempat pemungutan suara untuk mengikuti pemilihan. Pesan tersebut menjadi bukti bahwa dirinya ingin mendorong penuh demokrasi.

Sesuai dengan pesannya kepada rakyat, maka ketika hari pemungutan suara tiba, Sri Sultan HB IX bersama dengan keluarga menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor IX Rukun Kampung Suryoputran, Kelurahan Panembahan Yogyakarta, yang tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Setelah menjalankan kewajibannya, Sri Sultan HB IX kemudian berkeliling ke beberapa TPS di daerah Sleman, Kulonprogo, dan Wates. Hal tersebut juga dilakukan oleh wakilnya, Paku Alam VIII yang juga berkeliling ke berbagai TPS di daerah Yogyakarta dan Gunungkidul untuk memantau jalannya pemilihan umum. Sesuai dengan pesan Sri Sultan HB IX sebelumnya, maka pemilu di daerah Yogyakarta dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Dengan demikian, secara tidak langsung Sri Sultan HB IX telah memberikan contoh kepada rakyatnya untuk tetap menjalankan demokrasi sebaik-baiknya.

### *Kekuasaan Harus Dibatasi*

> *"Keputusan ini saya ambil di antara lain dengan menggunakan pertimbangan kesehatan saya dewasa ini. Pertimbangan lain setelah saya renungkan dalam-dalam ialah adanya rasa tanggung jawab di mana tumbuhlah suatu keinginan di dalam jiwa saya untuk memberikan bakti lebih besar dan lebih efektif kepada negara dan bangsa,"* pidato Sultan HB IX di depan sidang umum MPR

12 Maret 1978 untuk mengakhiri jabatannya sebagai wakil presiden.[115]

Ditolaknya tawaran untuk menjadi wakil presiden kembali pada tahun 1978 menjadi salah satu pesan tersirat dari Sri Sultan HB IX. Dengan menjadikan kesehatan sebagai alasan utamanya untuk mundur dari kursi tersebut, sempat menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat umum dan pengamat. Banyak pengamat yang meyakini bahwa mundurnya Sri Sultan HB IX adalah cara untuk menghindarkan diri dari sikap pemimpin Orde Baru yang mulai menampakkan pemerintahan yang korup. Hal tersebut menjadi wajar mengingat Orde Baru telah cukup lama menggenggam kekuasaan sejak tahun 1966 hingga tahun 1978 ketika Sri Sultan HB IX menolak untuk dicalonkan kembali menjadi wakil presiden. Menariknya, keputusan Sri Sultan HB IX untuk tidak lagi menjadi wakil presiden bisa dilihat menyiratkan pesan bahwa kekuasaan memang seharusnya dibatasi, meskipun sebagai seorang raja dirinya tidak akan pernah kehilangan kekuasaannya selama masih hidup.

Berangkat dari pidatonya tersebut, maka setidaknya dapat diambil catatan penting bahwa bagi dirinya, memimpin adalah mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara dengan penuh rasa tanggung jawab. Pada pidato tersebut juga disampaikan bahwa jabatan formal yang melekat di dalam dirinya justru akan menghambat usaha untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa memiliki jabatan lama menjadi presiden atau wakil

---

115 *Ibid.,* hal. 62.

presiden (menjadi penguasa) berpotensi tinggi menimbulkan sistem pemerintahan yang tidak sehat karena berpeluang membentuk sistem pemerintahan yang korup dan tidak efektif dalam mengemban tugas untuk melayani masyarakat. Dengan kata lain, terlalu lama terlibat di dalam sistem seringkali menjerat seorang pemimpin untuk menjadi rakus dan korup.[116] Keputusan tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa Sri Sultan HB IX adalah sosok yang cukup demokratis.

## ***Sultan Tidak Otomatis Menjadi Kepala Daerah?***

> *"Akan tetapi, apakah sultan itu sekaligus menjadi gubernur atau kepala daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam undang-undang tentang daerah istimewa, itu terserah nanti,"* ujar Sri Sultan HB IX kepada Atmakusumah.[117]

Salah satu hal menarik yang selalu dibahas sebelum Undang-Undang Keistimewaan ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu terkait dengan jabatan Sultan yang merangkap menjadi seorang gubernur atau kepala daerah. Untuk hal tersebut, Sri Sultan HB IX memiliki pendapat tersendiri apakah ia secara otomatis bisa menjadi gubernur atau tidak. Dalam hal ini Sri Sultan HB IX pernah mengatakan bahwa masa depan Keraton Yogyakarta akan sama halnya dengan Kesultanan Cirebon dan lain-lain dengan seorang sultan yang bertahta dan berfungsi sebagai kepala keluarga Keraton.

116 Lihat Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *op.cit.,* hal. 121.
117 Lihat Atmakusumah (ed.), *op.cit.,* hal. 131.

Terkait dengan jabatan Sultan sebagai seorang gubernur, menurut pandangannya, hal tersebut biasanya dibicarakan bersama dengan pemerintah pusat, termasuk apakah rakyat setempat menyetujuinya.

Sri Sultan HB IX pada dasarnya juga menyatakan bahwa yang akan menjadi pemimpin Yogyakarta kelak adalah orang yang dikehendaki masyarakat dengan istilah *the right man in the right place*.[118] Pernyataan Sri Sultan HB IX yang demikian tentu tidak dapat dilepaskan dari pandangannya ke depan bahwa Keraton pada akhirnya nanti hanya akan menjadi pusat kebudayaan di tengah modernisasi. Oleh karena itu, dirinya tidak memaksakan apabila nantinya seorang sultan tidak lagi secara otomatis menjadi seorang gubernur. Hal tersebut juga menjadi konsekuensi nyata bahwa Sri Sultan HB IX telah melakukan demokratisasi di wilayahnya sendiri, yaitu Yogyakarta. Bentuk nyata dari konsekuensi tersebut ialah adanya lembaga legislatif yang merupakan representasi dari masyarakat apakah mereka menghendaki sultan otomatis menjadi kepala daerah atau tidak. Meskipun demikian, Sultan mengaku bahwa tahta Keraton Yogyakarta akan terus turun-menurun dengan gelar Hamengku Buwono yang dimilikinya.

Sementara itu, pada posisi yang lain, Sri Sultan HB IX juga terlihat menampilkan kontradiktif terkait pengisian kepala daerah. Hal tersebut termaktub dalam Amanat 5 September 1945. Setidaknya ada tiga poin penting yang terkandung di dalam amanat tersebut, yaitu penegasan bahwa Yogyakarta

---

118 Lihat Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *Wasiat HB IX.....,op.cit.,* hal. 199.

adalah daerah istimewa, sultan berkuasa penuh atas wilayahnya sendiri, dan hubungannya dengan pemerintah pusat atau presiden bersifat langsung. Pada konteks tersebut, secara tidak langsung Sri Sultan HB IX berpandangan bahwa dirinya dan Paku Alam VIII memiliki kekuasaan penuh atas wilayahnya sendiri yang bersifat istimewa apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Dengan kata lain, kekuasaan penuh yang dimilikinya dapat ditafsirkan bahwa kedua pemimpin tersebut pada dasarnya menjadi kepala dan wakil kepala daerah yang menjalankan roda eksekutif.

Sadar bahwa dirinya tidak bisa mempertahankan sistem monarki di dalam sebuah republik yang baru merdeka, Sri Sultan HB IX memutuskan untuk melakukan demokratisasi pemerintahan dengan membentuk sebuah lembaga legislatif. Lembaga tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat supaya juga terlibat dalam menjalankan roda pemerintahan bersama dengan Sultan dan Paku Alam yang berkuasa. Dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat menjalankan pemerintahan di Yogyakarta, Sri Sultan HB IX secara sengaja juga menjaga kekuasaannya sebagai kepala daerah supaya tidak diambil alih oleh masyarakat dengan tujuan untuk menjaga eksistensi Keraton sebagai pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ada pesan lain bahwa sebenarnya Sri Sultan HB IX tetap ingin menjadi penguasa wilayah Yogyakarta dengan jabatannya sebagai kepala daerah.

**Jalan Keempat: Sultan Terbuka Terhadap Nilai-Nilai Keanekaragaman**

Keanekaragaman merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dilepaskan dari kultur masyarakat Indonesia, terutama karena keanekaragaman kebudayaan dan alamnya yang membuat setiap individu berangkat dan memiliki latar belakang berbeda-beda pula. Kekayaan tersebut bisa dilihat dari banyaknya jumlah agama, bahasa, budaya, suku, golongan, dan latar belakang masyarakat. Apabila dikaitkan dengan dimensi demokrasi, maka nilai ini cukup bertautan erat dengan aspek kebebasan, terutama kebebasan sipil dan politik. Dengan kata lain, masyarakat bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai seorang warga negara tanpa harus takut atau mendapat ancaman dari orang lain. Terlebih lagi, masyarakat bisa mendapatkan hak-hak mereka tanpa harus melihat latar belakang atau identitas yang melekat atas dirinya. Oleh karena itu, sistem demokrasi pada dasarnya menjamin semua orang dari berbagai latar belakang untuk mengakses berbagai pelayanan yang diberikan oleh negara, termasuk diakuinya keberadaan mereka sebagai bagian dari sebuah bangsa yang memiliki hak.

Apabila konteks tersebut dikaitkan dengan kepemimpinan seseorang, maka salah satu aspek yang dapat dijadikan patokan untuk menyebut bahwa seseorang itu adalah pemimpin demokratis bisa dilihat dari seberapa jauh dirinya mengakui nilai-nilai keberagaman di dalam sebuah masyarakat. Tidak berhenti pada aspek mengakui keberagamaan semata, tetapi juga membuat kebijakan yang tidak diskriminatif dan perlindungan hukum nyata kepada masyarakat yang

dipimpinnya. Artinya, pemimpin tersebut dapat menjamin masyarakatnya bisa mengakses berbagai pelayanan publik yang disediakan tanpa adanya diskriminasi. Hal tersebut menjadi penting supaya pemimpin yang bersangkutan tidak dicap sebagai pemimpin yang memihak salah satu golongan masyarakat semata.

Sri Sultan HB IX adalah salah satu sosok raja yang memiliki pemikiran khas terkait dengan hadirnya nilai-nilai keanekaragaman yang muncul di lingkungan sekitarnya. Sebagai raja Jawa yang cukup dihormati oleh rakyatnya, Sri Sultan HB IX telah berhasil menunjukkan sikapnya sebagai raja yang demokratis dengan menghormati pilihan politik rakyatnya tanpa harus mengintervensi rakyat. Setidaknya ada tiga hal besar yang menjadi gagasan Sri Sultan HB IX terkait dengan pengakuan terhadap nilai-nilai keanekaragaman yaitu keinginannya untuk menjadikan Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia dan mengayomi semua golongan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, Sri Sultan HB IX adalah sosok yang unik karena dirinya tidak hanya mengagungkan kekayaan tradisi yang ada di dalam Keraton, tetapi juga menghormati kekayaan yang ada di luar Keraton dengan caranya sendiri.

### *Yogyakarta Sebagai Miniatur Indonesia*

> *"Kini, Universitas Gadjah Mada sudah berkembang terlepas dari Kraton, bahkan menjadi induk dari perguruan tinggi negeri di Yogyakarta yang jumlahnya puluhan,"* ujar sejarawan PJ Suwarno.[119]

119 Lihat Julius Pour dan Nur Adji (ed.), *op.cit.*, hal. 159.

Sri Sultan HB IX adalah salah satu sosok penting di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di era revolusi, Sultan telah membuktikan komitmennya terhadap republik yang belum lama merdeka. Keputusan Sri Sultan HB IX untuk menyediakan pelataran Keraton sebagai tempat belajar bagi para pemuda dari berbagai daerah merupakan konsekuensi nyata bergabungnya Yogyakarta dengan republik. Pelataran tersebut sengaja diberikan oleh Sultan untuk digunakan para pemuda yang sedang menimba ilmu di sebuah universitas yang baru saja didirikan. Munculnya universitas tersebut pada awalnya merupakan gagasan dari tokoh-tokoh nasional yang ada di Yogyakarta. Universitas yang diresmikan pada tahun 1949 tersebut saat ini dikenal dengan nama Universitas Gadjah Mada. Dampak dari munculnya universitas tersebut adalah banyaknya para pemuda yang berasal dari seluruh Indonesia datang ke Yogyakarta dalam rangka menimba ilmu. Antusiasme pelajar itulah kemudian yang direspon oleh Sri Sultan HB IX dengan menyediakan bagian depan istananya sebagai tempat belajar.

Kebijakannya untuk menyediakan pelataran Keraton sebagai tempat belajar nantinya juga membawa efek serius bagi perkembangan dunia pendidikan di Yogyakarta juga Indonesia. Langkah yang diambil oleh Sri Sultan HB IX tersebut kemudian diikuti oleh kaum bangsawan yang tidak lain adalah saudara-saudara Sultan untuk turut berpartisipasi dalam menyediakan lahan pekarangan rumahnya sebagai tempat belajar universitas tersebut. Bagi Sri Sultan HB IX, banyaknya pelajar yang datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda menjadi momentum untuk mencapai

beberapa tujuan. Salah satu tujuan itu adalah terakomodasinya kepentingan mereka untuk menuntut ilmu. Selain itu, hal itu juga dimanfaatkan untuk memperoleh simpati angkatan muda yang merupakan kekuatan penggerak revolusi nasional. Hal tersebut dilakukan supaya Sri Sultan HB IX juga memperoleh penjaga yang terbaik untuk mencegah unsur-unsur destruktif revolusi memasuki istananya yang dikenal feodal.[120]

Tindakan tersebut menjadi wajar mengingat pelajar yang berdatangan ke Yogyakarta adalah mereka yang memiliki daya intelektual lebih dibandingkan pemuda-pemuda lainnya. Banyaknya kaum intelektual yang berkumpul di Yogyakarta tersebut apabila tidak disambut dengan tepat oleh Sri Sultan HB IX tentu membuka peluang bagi mereka untuk mengkritisi sistem pemerintahan monarki yang masih berjalan di Yogyakarta karena mereka akan lebih peka mengidentifikasi perkembangan politik dan pemerintahan.[121] Oleh karena itu, sambutan Sultan yang hangat dengan menyediakan tempat belajar menjadi tindakan yang tepat untuk menjaga pintu-pintu Keratonnya supaya tidak didobrak paksa oleh para intelektual muda.

Selain itu, keinginannya tersebut kemudian diaplikasikan secara nyata dengan memberikan tanahnya untuk dijadikan tempat belajar yang hingga sekarang digunakan oleh Universitas Gadjah Mada. Hal tersebut dilakukan Sri Sultan HB IX supaya wilayahnya yang kental dengan aspek monarki semakin tertutupi lewat banyaknya para pelajar dari berbagai

---

120 Lihat Selo Soemardjan, *Perubahan….op.cit.,* hal. 429.

121 Lihat Tri Yuniyanto, *op.cit.,* hal. 20.

macam latar belakang. Oleh karena itu, citra yang sedang ingin dibangun Sri Sultan HB IX adalah Yogyakarta sangat terbuka, bisa menerima terjadinya akulturasi budaya dan bukan menjadi wilayah tertutup untuk golongan lain. Tujuannya jelas, untuk menguatkan persepsi publik bahwa Sri Sultan HB IX konsisten mengangkat martabat bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak keanekaragaman.

Selanjutnya, untuk menjaga citra raja yang mengakui nilai-nilai keberagaman, Sri Sultan HB IX memiliki keinginan untuk menjadikan Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia. Miniatur yang dimaksud adalah Yogyakarta bisa menjadi tempat berkumpulnya berbagai latar belakang golongan, agama, suku, dan budaya yang ada. Layaknya sebagai tuan rumah, Sri Sultan HB IX justru tidak ingin menunjukkan kekuasaannya yang absolut sebagai raja melalui cara-cara yang tidak demokratis. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Sri Sultan HB IX untuk menjadikan Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia yaitu dengan menjadi pelayan bagi tamu daerah yang berdatangan ke Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan untuk mengangkat citra bahwa orang Jawa cukup terbuka dengan orang lain yang bukan berasal dari latar belakang Jawa sehingga sosok Sri Sultan HB IX dilihat sebagai tokoh yang cukup demokratis.

Tidak cukup hanya dengan menghormati keanekaragaman yang ada, Sri Sultan HB IX juga mempersilakan para tamu daerahnya yang sedang menuntut ilmu di Yogyakarta mendirikan asrama-asrama mahasiswa. Hasilnya, tidak mengherankan apabila di Yogyakarta terdapat puluhan asrama yang dihuni mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Hal

yang dilakukan oleh Sultan itu ternyata juga mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Minang yang sudah menetap di Yogyakarta lebih dari 78 tahun.[122] Mereka merasa bahwa keberadaan Sultan dapat memberikan rasa aman. Bahkan asrama Merapi Singgalang dan Bundo Kanduang yang dihuni oleh mahasiswa Minangkabau dibangun di atas tanah pemberian Sri Sultan HB IX.

Citra yang dibangun oleh Sri Sultan HB IX tersebut pada dasarnya membawa dampak yang menguntungkan bagi Yogyakarta. Berkat kebijakanya tersebut, Yogyakarta kini memiliki sebutan sebagai kota pendidikan, kota pelajar, dan kota toleransi (*city of tolerance*). Istilah-istilah yang melekat pada Yogyakarta tersebut secara tidak langsung menghapus citra Sultan sebagai raja yang berkuasa secara absolut dan bahkan mendekatkan Sultan pada citra demokratis karena mengakui keanekaragaman. Terlebih lagi, Sri Sultan HB IX juga memberikan kesempatan kepada seluruh rakyatnya (tidak hanya penduduk asli, tetapi juga para pendatang) untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan berbagai permasalahan publik.

### *Mengayomi Semua Golongan Masyarakat*

> *"Menjelang masuknya tentara Jepang, Sultan HB IX selalu melibatkan warga Tionghoa dalam segala pembicaraan. Juga berkat campur tangan Sultan, orang Tionghoa di*

---

122 Selengkapnya lihat Arwan Tuti Artha, *Laku Spiritual Sultan Langkah Raja Jawa Menuju Istana,* Galangpress, Yogyakarta, 2009, hal. 99.

*Yogya terluput dari aksi kekerasan fisik dan perampokan,"* ujar sejarawan, Didi Kwartanada.[123]

Sikap dan tindakan Sri Sultan HB IX untuk mengayomi berbagai golongan masyarakat dari latar belakang yang berbeda-beda pada dasarnya membawa dampak positif bagi perkembangan Yogyakarta. Gagasannya tersebut juga didukung oleh masyarakat yang pada saat awal kemerdekaan juga menerima kehadiran putra daerah dari berbagai suku dan etnis. Penerimaan masyarakat asli Yogyakarta tersebut didasarkan dengan sikap kekeluargaan. Para pendatang tersebut *mondhok* (menumpang tinggal) dan berbaur dalam satu kesatuan keluarga sehingga menjadi saudara. Hubungan batin kekeluargaan tersebut merupakan hubungan yang secara sosiologis berkembang menjadi ikatan keluarga besar hingga sering kali melebihi hubungan sanak saudara yang memiliki ikatan darah.[124] Sikap masyarakat inilah yang menjadi faktor pendorong tumbuh dan berkembangnya pluralisme serta keanekaragaman di Yogyakarta.

Sebagaimana keinginan Sri Sultan HB IX, yang disampaikan dalam pidato penobatannya, bahwa meskipun dirinya telah mengenyam pendidikan Eropa, dirinya adalah tetap orang Jawa. Lebih dari itu, Sri Sultan HB IX juga pada dasarnya mengadopsi nilai-nilai Barat tanpa yang Timur kehilangan 'jiwa timurnya'. Gagasan tersebut senada dalam konteks akulturasi budaya yang ada di Yogyakarta. Sultan HB IX telah memberikan contoh untuk menerima adat istiadat

---

123 Lihat Julius Pour dan Nur Adji (ed.), *op.cit.,* hal. 32.

124 Lihat Heru Wahyukismoyo, o*p.cit.,* hal. 116.

orang lain tanpa harus kehilangan jati dirinya. Tindakan Sri Sultan HB IX inilah yang kemudian juga diamini oleh masyarakat Yogyakarta sehingga akulturasi tersebut dapat menjadi kekayaan kultural bukan menjadi semangat untuk saling memunculkan sentimen kedaerahan.

Keinginan Sri Sultan HB IX untuk merangkul semua golongan masyarakat sebenarnya juga bisa dilihat dari tindakannya terkait dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Sri Sultan HB IX menemui sekitar 100 wakil pemuda dari golongan agama, nasionalis, kepanduan, dan Tionghoa di Bangsal Kepatihan untuk memberikan kabar terkait dengan proklamasi dan perubahan politik setelah kemerdekaan Indonesia.[125] Tindakan politik tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keadaan Yogyakarta agar tetap kondusif terutama setelah diproklamasikannya kemerdekaan republik. Selain itu, secara tidak langsung melalui forum tersebut, Sri Sultan HB IX mencoba untuk membangun legitimasi dirinya sebagai pemimpin Yogyakarta yang pada saat itu direncanakan akan menjadi bagian dari republik Indonesia.

Pada aspek filosofis, Sri Sultan HB IX memiliki pemikiran modern yang tidak dapat dilepaskan dari sosoknya sebagai seorang raja Keraton Yogyakarta terutama karena harus tetap memegang teguh nilai-nilai luhur budaya Jawa. Berbagai

---

125 Selengkapnya lihat Majalah Tempo Edisi Khusus Hari Kemerdekaan, *Hamengku Buwono IX: Pengorbanan Sang Pembela Republik,* Jakarta, edisi 17-23 Agustus 2015, hal. 47.

kebijakan demokratis yang spesifik mengakui nilai-nilai keanekaragaman tersebut pada dasarnya bersumber pada ajaran *Hamengku, Hamangku, dan Hamengkoni*.[126] *Hamengku* mengandung makna *hangrengkuh,* yaitu melindungi dan mengayomi tanpa membedakan golongan, keyakinan, dan agama. *Hamangku* berarti membesarkan hati dengan lebih banyak memberi daripada menerima. Sementara *hamengkoni* identik dengan suri tauladan dan berdiri paling depan untuk mengambil tanggung jawab dengan segala risikonya. Berangkat dari hal tersebut, maka sebenarnya prinsip itulah yang mempengaruhi tindakan Sri Sultan HB IX untuk terus mengayomi masyarakatnya tanpa harus membedakan latar belakang.

Kemudian, meskipun seorang sultan merupakan pemimpin agama Islam (bisa dilihat dari gelar *Khalifatullah* dan *Panotogomo*), dirinya tetap menghormati masyarakat yang memeluk agama lain dengan tidak melakukan deskriminasi terhadap golongan mereka. Justru berkat gagasannya, Yogyakarta memiliki forum komunikasi lintas agama yang di dalamnya terdapat Sultan sebagai salah satu tokoh utamanya. Pada hal yang lain, meski Sri Sultan HB IX adalah seorang Jawa tulen, dirinya juga tidak menutup diri untuk menggunakan bahasa dan menghormati budaya dari daerah lain yang ada di Indonesia.

Bentuk pengayoman kepada seluruh golongan masyarakat juga ditunjukkan Sri Sultan HB IX melalui seni. Setiap raja yang bertahta di Keraton Yogyakarta pada dasarnya memiliki

---

126 Selengkapnya lihat Heru Wahyukismoyo, o*p.cit.,* hal. 5.

kewajiban untuk bisa menciptakan sebuah tarian. Salah satu tarian terkenal yang diciptakan oleh Sri Sultan HB IX adalah Tari Golek Menak yang memiliki pesan filosofis mendalam. Karya itu muncul setelah Sri Sultan HB IX melihat pergelaran Wayang Golek Menak yang dilakukan oleh seorang dalang dari Bagelan.[127] Adapun isi dari Tari Golek Menak tersebut, adalah menggabungkan perpaduan antara budaya dari etnis Jawa, Minang, dan Sunda serta perpaduan filosofis unsur Parsi, Tionghoa, dan Nusantara dalam sebuah cerita *Wong Agung Jayengrana.* Dipadukannya beberapa unsur budaya tersebut menjadi bukti nyata dari tindakan Sri Sultan HB IX yang terbuka terhadap budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya aslinya.

Meskipun hanya dimanifestasikan dalam bentuk tari, makna yang terkandung setidaknya dapat mewakili keinginan Sri Sultan HB IX sebagai model pendidikan multikultural atas dasar pluralisme budaya dan filsafat yang sampai saat ini sebenarnya masih menjadi misteri karena punya nilai esoteris dengan pementasan pagelaran tari. Adapun makna dari gagasan Sri Sultan HB IX tersebut adalah untuk mengajak penonton agar mampu memahami keunggulan komparatif mengenai suku Jawa, Minang, dan Sunda sebagai pilar kebangsaan dan memahami keunggulan filosofis mengenai peradaban Parsi, Tionghoa, dan Nusantara sebagai pilar

---

127 Ahmad Adaby Darban dkk, *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwana IX,* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 63.

ketahanan global.[128] Berangkat dari hal tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan sementara bahwa keinginan Sri Sultan HB IX terkait dengan keanekagaraman tidak hanya dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan kebijakan, tetapi juga dalam bentuk yang lain, yaitu seni.

### Jalan Kelima: Sultan Harus Menegakkan Keadilan Sebagai Inti Moralitas Politik

Asas keadilan adalah poin terakhir yang memiliki pengaruh besar dalam berdemokrasi. Apabila dikaitkan dengan dimensi partisipasi, kompetisi, dan kebebasan, maka keadilan menjadi salah satu aspek penting yang harus dipegang dan diejawantahkan. Misalnya, dalam sistem politik di sebuah negara, ada mekanisme kompetisi yang apabila tanpa adanya keadilan, bisa jadi timbul efek yang tidak sehat dalam proses itu. Tak heran jika nanti muncul perilaku nepotisme, kolusi bahkan hingga korupsi yang notabene mengamputasi hak-hak orang lain. Dengan demikian, keadilan menjadi salah satu nilai yang digunakan untuk menjamin terakomodasinya hak-hak masyarakat secara seimbang tanpa harus ada salah satu pihak yang dirugikan. Dengan adanya prinsip keadilan yang dipegangnya, Sri Sultan HB IX bisa menjadi tokoh penengah apabila terjadi pertikaian atau pun konflik. Gagasannya tentang keadilan bisa dilihat dari tiga hal yaitu keinginannya menghapus sekat-sekat sosial berbasis golongan, tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, dan

---

128 *Ibid.,* hal.95

menjadi penengah yang adil di dalam setiap pertikaian yang mungkin dan telah terjadi.

### *Menghapus Sekat Sosial yang Berbasis Golongan*

> *"Pendidikan yang dilakukan oleh sekolah keputran milik kesultanan yang dulu khusus hanya untuk anak-anak abdi dalem dibuka untuk umum,"* ujar sejarawan PJ Suwarno.[129]

Sebelum Sri Sultan HB IX dinobatkan sebagai seorang raja, masyarakat di Yogyakarta masih terpecah-pecah menjadi beberapa golongan, misalnya, bangsawan, priyayi, dan rakyat biasa. Penggolongan masyarakat ke dalam beberapa jenis tersebut pada dasarnya membawa dampak yang cukup berarti bagi kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu contohnya, hanya golongan bangsawan yang bisa memasuki sekolah-sekolah yang memiliki kualitas pendidikan terbaik di Yogyakarta. Dengan kata lain, golongan masyarakat lainnya tidak diperkenankan untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang bersangkutan. Hal tersebut berdampak cukup serius bagi tingkat pendidikan di Yogyakarta. Bagi golongan bawah, yakni rakyat biasa, mereka hanya bisa menikmati sekolah yang berkualitas rendah. Bahkan, seringkali mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak.

Bagi Sri Sultan HB IX, masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses berbagai pelayanan publik, baik di bidang kesehatan, pendidikan, birokrasi, maupun kegiatan atau perayaan yang diselenggarakan oleh Keraton sebagai pusatnya. Keinginan Sri Sultan HB IX untuk tidak mengeksklusifkan

---

129 Lihat Julius Pour dan Nur Adji (ed.), *op.cit.*, hal. 156.

sebuah golongan masyarakat tertentu dibuktikan dengan berbagai kebijakan seperti menghapus Pengadilan Darah Dalem (pengadilan khusus untuk kaum bangsawan), membuka jabatan birokrasi berdasarkan kompetensi (bukan berdasarkan golongan masyarakat), membuka sekolah-sekolah umum untuk semua golongan masyarakat, dan mempersilakan semua lapisan masyarakat untuk mengikuti berbagai kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Keraton.

Terkait dengan jabatan birokrasi, ada sebuah kebijakan menarik yang dikeluarkan oleh Sri Sultan HB IX. Zaman dahulu, salah satu hal yang dinilai cukup berharga oleh kalangan priyayi Yogyakarta ketika Keraton masih menjadi bagian dari VOC adalah pemberian nama oleh Sultan ketika seseorang memasuki pamong praja atau menaiki jenjang kepangkatan yang lebih tinggi. Seseorang yang mendapatkan nama dan gelar baru tersebut adalah mereka yang menduduki jabatan-jabatan penting di setiap bagian pemerintahan. Bahkan mereka selalu menyelenggarakan syukuran sebagai rasa bangga mereka terhadap gelar baru yang diberikan oleh Sultan. Dengan adanya gelar baru yang didapatkannya tersebut, maka mereka mendapatkan status sebagai golongan setengah bangsawan dalam protokol resmi yaitu setingkat di bawah kaum bangsawan. Meskipun demikian, pemberian gelar terhadap pejabat yang memiliki kenaikan jabatan tersebut dihentikan oleh Sri Sultan HB IX setelah tahun 1948.[130]

---

130 Salah satu latar belakang Sri Sultan HB IX memutuskan untuk tidak lagi memberikan gelar kebangsawanan adalah berkat cerita dari seorang priyayi muda dan terpelajar yang pada tahun 1948 dipromosikan pada jabatan baru

Kebijakan tersebut dihentikan lantaran mendorong proses pengkotak-kotakan masyarakat dan akhirnya juga berdampak pada mata pencaharian mereka. Misal, dalam birokrasi pemerintahan, hanya orang-orang dengan gelar bangsawan yang bisa masuk dalam birokrasi pemerintah, sedangkan golongan lain tidak memiliki akses untuk bekerja di dalam pemerintahan. Pada konteks tradisi atau upacara ritual, Keraton juga hanya membuka akses untuk kaum bangsawan semata sehingga golongan lain tidak memiliki akses untuk berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Berangkat dari hal tersebut, maka dapat dilihat sebuah ketidakadilan di dalam masyarakat itu sendiri di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses pelayanan dan fasilitas publik.

Lebih jauh lagi, Sri Sultan HB IX mengambil keputusan bahwa tidak ada pegawai yang boleh diberi nama atau gelar, kecuali jika meminta sendiri secara tertulis kepada Sultan. Hal tersebut dilakukan oleh Sultan untuk memberikan sedikit kelonggaran kepada masyarakat untuk tetap bisa mendapatkan gelar dengan syarat mengajukan dirinya sendiri. Sri Sultan HB IX tidak ingin secara langsung menutup pintu tersebut kepada masyarakat karena dikhawatirkan akan membawa dampak atau perubahan yang tidak sehat di

dengan statusnya sebagai kaum setengah bangsawan. Pemuda terpelajar tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan gelar kehormatan apa pun karena bagi dirinya, seseorang tidak sepantasnya memperoleh prestise sosial hanya karena gelar atau nama, tetapi karena prestasi-prestasinya. Hal tersebut disampaikan pemuda kaum priyayi itu kepada sekretaris Sri Sultan HB IX. Pandangan tersebut pada akhirnya dihormati oleh Sri Sultan HB IX. Selengkapnya *Ibid*.

kalangan masyarakat sehingga dirinya masih memberikan kelonggaran. Tindakan Sri Sultan HB IX tersebut sejalan dengan komitmen dirinya untuk melakukan perubahan secara damai tanpa menimbulkan kegoncangan di dalam masyarakat karena adanya sebuah perubahan drastis bisa jadi belum bisa diterima masyarakat.

Keinginan Sri Sultan HB IX untuk menghapus sekat sosial yang berbasis golongan sebenarnya juga bisa dilihat dari berbagai sikap pribadinya yang ingin terlepas dari jabatan yang melekat pada dirinya. Hal tersebut dibuktikannya dengan cara hadir di tengah-tengah masyarakat biasa tanpa harus membawa statusnya sebagai seorang raja. Kendati demikian, hal itu juga membawa perubahan di kalangan kaum bangsawan yang lambat laun membuat kaum mereka mulai kehilangan jati dirinya sebagai kelas atas dan sebagai kiblat bagi kaum priyayi karena tergeser oleh munculnya kaum intelektual setelah terjadinya perang revolusi. Dengan demikian, kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat lambat laun mengalami masanya untuk saling meleburkan diri sehingga yang terlihat saat ini tidak ada penggolongan masyarakat. Lebih jauh, Sri Sultan HB IX ingin hidup seperti masyarakat pada umumnya yang tidak terikat pada aturan-aturan baku yang berlaku ketika dirinya harus memasuki tembok Keraton. Justru Sri Sultan HB IX ingin memiliki kebebasan untuk menikmati kehidupan layaknya masyarakat biasa tanpa terhalang dengan adanya status sosial yang melekat di dalam dirinya.

### *Pelibatan Rakyat dalam Proses Pembangunan*

> *"Tidak boleh memiliki ambisi apapun kecuali untuk menyejahterakan rakyat,"* pesan HB IX kepada Herjuno Darpito.[131]

Dalam perspektif budaya Jawa, seorang raja yang arif haruslah tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, tetapi memihak rakyatnya. Perspektif tersebut secara tidak langsung mengandung maksud bahwa kepemimpinan Jawa sebenarnya sarat dengan nilai-nilai demokrasi. Misalnya, seperti tertuang dalam prinsip *sura dira jayaningrat bakal lebur dening pangastuti* yang berarti orang yang menyalahgunakan kekuasaan akan hancur oleh orang yang berbudi pekerti luhur.[132] Prinsip tersebut dipegang teguh oleh Sri Sultan HB IX sehingga setiap keputusan yang akan dikeluarkannya cenderung jauh dari kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya. Gagasan yang sejalan dengan nilai demokrasi tersebut kemudian sampai sekarang masih menjadi jargon dalam sistem pemerintahan.

Keinginan Sri Sultan HB IX untuk mengimplementasikan prinsip tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip keadilan di samping prinsip itu digunakannya untuk melegitimasi kekuasaan yang dimiliki Sultan. Sri Sultan HB IX beranggapan bahwa model kepemimpinan kuno dengan bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya, terutama dalam sistem monarki tidak lagi berlaku di era yang semakin modern.

---

131 Lihat Parni Hadi dan Nasyith Majidi (ed.), *op.cit.*, hal. 81.

132 Selengkapnya lihat Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *op.cit.*, hal. 129.

Kesadaran tersebut dipahami oleh Sri Sultan HB IX dengan menyebarkan kekuasaan yang dimilikinya kepada rakyat. Hal itu dilakukan Sri Sultan HB IX untuk meminimalisir kemungkinan diruntuhkannya bentuk pemerintahan monarki khususnya di Keraton Yogyakarta yang dipimpinya oleh kaum-kaum intelektual.

Salah satu bentuk nyata dari pelibatan rakyat untuk proses pembangunan yang berkeadilan yaitu dengan meminjamkan tanahnya kepada rakyat. Prinsip tersebut sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah nenek moyang Sri Sultan HB IX yang mempertahankan daerah kekuasaan, termasuk dalam hal ini adalah tanah, dari tangan penjajah demi kesejahteraan rakyatnya. Dengan penuh rasa keadilan bagi kemaslahatan bersama, Sri Sultan HB IX memiliki gagasan bahwa menghormati tanah leluhur bukan berarti memiliki untuk diri sendiri, tetapi ketika tanah leluhur tersebut berguna untuk rakyat, maka di situlah letak penghormatan kepada leluhur.[133] Pada titik itulah, keinginan Sri Sultan HB IX untuk memberikan keadilan kepada rakyatnya mulai bisa diaktualisasikan.

Selanjutnya, keinginan Sri Sultan HB IX untuk memberikan rasa adil kepada rakyatnya yaitu diwujudkan dengan cara tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Salah satu bukti nyata pemikiran Sri Sultan HB IX adalah ketika ia menghapus Rijksblad Nomor 16 dan Nomor 18 Tahun 1918 yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak ada bukti

---

133 Lihat Aloysius Soni (ed.), *op.cit.,* hal. 58-59.

kepemilikan menurut hak *eigendom* (hak milik, menurut UU Agraria 1870), maka tanah itu adalah milik raja (sultan).[134] Berangkat dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya Sri Sultan HB IX memiliki keinginan untuk memberikan kekayaan yang dimilikinya—yakni berupa tanah—untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kata lain, rakyat memiliki kesempatan untuk memanfaatkan tanah milik Sultan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pada sisi lain, keinginan Sri Sultan HB IX untuk tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri tercermin dalam Amanat 30 Oktober 1946 terkait dengan pembentukan lembaga legislatif di Yogyakarta. Pada poin pertama disampaikan bahwa amanat tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan adanya Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 yang menggunakan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial sebagai prinsip utama dalam bernegara. Dicantumkannya frasa kedaulatan rakyat dan keadilan sosial oleh Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menjadi cerminan bahwa kedua pemimpin tersebut berkomitmen penuh untuk melaksanakan demokratisasi di Yogyakarta. Fenomena tersebut menjadi menarik mengingat kedua pemimpin tersebut adalah raja di masing-masing kerajaannya yang terkenal dengan nilai-nilai feodal.

Sri Sultan HB IX juga memiliki keinginan bahwa pemimpin dan rakyatnya harus bisa berjalan beriringan

---

134 Lihat Ahmad Sarwono bin Zahir, *Sabda Raja HB X Dalam Timbangan Revolusi Karakter Istimewa,* Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hal. 65.

untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan rakyat. Cara Sri Sultan HB IX untuk mengajak masyarakat berjalan seiringan dengan pemimpinnya yaitu dengan membuka akses kekuasaan kepada rakyat melalui lembaga legislatif yang dibentuknya. Dengan jalan tersebut, rakyat memiliki hak untuk mendapatkan kursi kekuasaan di lembaga legislatif tersebut melalui prinsip-prinsip keadilan yang jauh dari unsur kecurangan. Pada masa awal, Sri Sultan HB IX memang melakukan pengangkatan terhadap anggota legislatif tersebut. Barulah pada tahun 1951 Sri Sultan HB IX menggagas sebuah pemilihan umum anggota legislatif untuk mengaktualisasikan prinsip keadilan di mana rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Komitmen Sri Sultan HB IX untuk berjalan beriringan bersama dengan rakyat terus diimplementasikan ke dalam beberapa kebijakan yang akan dikeluarkan olehnya. Ketika Sri Sultan HB IX hendak mengeluarkan sebuah keputusan, secara otomatis ia akan meminta persetujuan dari rakyat melalui wakil mereka yang duduk di lembaga legislatif. Komunikasi yang dibangun oleh Sri Sultan HB IX juga cenderung dua arah sehingga baik dirinya ataupun pihak legislatif memiliki hak yang sama untuk menyampaikan inisiatif atau gagasan. Dengan demikian, Sri Sultan HB IX sebenarnya ingin menunjukkan bahwa pelibatan rakyat dalam proses pembangunan adalah salah satu bentuk tanggung jawab moral dirinya kepada rakyat. Pelibatan publik tersebut secara tidak langsung juga menjadi strategi Sri Sultan HB IX untuk menjaga legitimasi yang dimilikinya sebagai pemimpin daerah. Sri Sultan HB IX juga menyadari bahwa rakyat menjadi subjek sekaligus objek

dari proses pembuatan kebijakan publik. Karena itu, prinsip keadilan dilakukan dengan cara membagi kekuasaan secara formal : di satu sisi berada di tangan Sri Sultan HB IX dan sisi yang lain berada di tangan rakyat melalui lembaga legislatif.

### *Menjadi Penengah yang Adil*

> *"Ia memang tidak pernah mengangkat salah seorang istrinya menjadi garwa padmi, permaisuri, dengan gelar Kanjeng Gusti Ratu, meski semua istrinya diakui sebagai garwa dalem,"* tulisan dalam Presentasi Majalah Tempo.[135]

Prinsip keadilan Sri Sultan HB IX sejatinya tidak hanya ditujukan kepada rakyat yang dipimpinnya, tetapi juga kepada internal keluarganya. Artinya, dirinya terus memegang komitmen tersebut di mana pun dia berada. Kedemokratisan Sri Sultan HB IX terletak pada pilihannya untuk tidak memilih atau mengangkat *garwa padmi* dari kelima istri yang dimilikinya. Seperti telah diketahui bahwa Sri Sultan HB IX memiliki lima orang istri yang bernama KRAy Pintokopurnomo, KRAy Windyaningrum, KRAy Hastungkoro, KRAy Ciptomutri, dan KRAy Norma Nindya Kirana. Dari kelima istrinya tersebut, Sri Sultan HB IX memiliki putra dan putri kecuali dengan istri terakhirnya yaitu KRAy Norma Nindya Kirana. Menariknya, istri terakhir yang dipilihnya justru bukan berasal dari Jawa, melainkan berasal dari Bangka.

Keinginan Sri Sultan HB IX untuk tidak mengangkat *garwa padmi* merupakan pilihan yang menarik untuk

---

135 Lihat Presentasi Majalah Tempo, *op.cit.,* hal. 166.

ditelisik. Pilihan tersebut sebenarnya cukup berpengaruh pada penentuan pewaris tahta Keraton selanjutnya, yaitu sosok yang akan menjadi Sri Sultan HB X. Apabila Sri Sultan HB IX mengangkat salah satu istrinya menjadi *garwa padmi,* maka akan dengan mudah Sri Sultan HB IX menujuk putra laki-laki dari *garwa padmi*-nya untuk menjadi penerus tahta kerajaan dan hal tersebut akan mudah ditebak oleh keluarga Keraton. Tradisi yang sebenarnya juga pernah dilakukan oleh sultan-sultan sebelumnya tersebut menutup peluang bagi putra sultan lain yang berasal dari selir atau *garwa ampeyan*. Berangkat dari hal tersebut, aspek keadilan di dalam tradisi Keraton tersebut tentu saja tidak sejalan dengan semangat demokrasi.

Selain itu, Sri Sultan HB IX sejatinya juga memiliki prinsip untuk selalu menghargai pilihan orang lain, baik terkait dengan pilihan politik atau hal lain. Gagasan Sultan tersebut tercermin dari kebijakannya untuk melakukan pemilihan umum di Yogyakarta yang banyak diikuti oleh berbagai partai politik dari berbagai ideologi. Meskipun Sri Sultan HB IX tidak memiliki pilihan politik yang jelas saat itu karena dirinya secara otomatis tetap menjadi seorang kepala daerah, ia tetap menghargai segala pilihan rakyatnya untuk memilih partai politik tertentu. Justru yang ditekankan oleh Sultan adalah kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi memilih wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif.

Tidak hanya terkait dengan urusan politik, di dalam urusan keluarga pun, Sri Sultan HB IX tidak memaksakan kehendaknya untuk memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Keinginan tersebut tercermin dari kebijakan Sultan

untuk memberikan pilihan yang luas bagi anak-anaknya dalam hal berkarir. Sri Sultan HB IX tidak memaksakan anak-anaknya untuk menjadi seorang pegawai, pengusaha, atau pun sosok lain yang lebih spesifik. Justru Sri Sultan HB IX membiarkan anak-anaknya untuk berkembang di luar Keraton tanpa mereka kehilangan jati diri mereka sebagai pewaris budaya Jawa. Oleh karena itu, dari beberapa putra yang dimiliki Sri Sultan HB IX, ada di antara mereka yang berkarir sebagai pengusaha atau pun bekerja di dalam roda pemerintahan di daerah. Untuk pilihan politik pun Sri Sultan HB IX juga tidak membatasi anak-anaknya untuk mengikuti salah satu partai politik tertentu.

## Catatan Akhir: Sultan Menampilkan Demokrasi Semu

Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang dikenal sebagai sosok raja yang demokratis pada dasarnya tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Berbagai kebijakan yang mengarah ke jalan demokratisasi telah dilakukan olehnya, baik dalam kapasitasnya sebagai seorang raja maupun sebagai kepala daerah. Bahkan, Sri Sultan HB IX juga membuat kebijakan demokratis lain dalam kapasitasnya sebagai pemegang jabatan pemerintahan lainnya. Tidak hanya mentransfer nilai demokrasi kepada rakyatnya, Sri Sultan HB IX juga mengabdikan dirinya sebagai sosok yang demokratis melalui berbagai gagasan dan tindakannya. Raja Yogyakarta yang visioner tersebut adalah seorang demokrat unik yang hidup di dalam berbagai lingkungan yang berbeda-beda. Dia adalah raja Jawa yang hidup di lingkungan keluarga Belanda semasa mudanya.

Berangkat dari keadaan tersebut, raja yang dinobatkan setelah menjalani proses pendidikan di Belanda tersebut mencoba untuk mengadopsi nilai-nilai demokrasi modern tanpa harus menghilangkan nilai-nilai Jawa yang sudah ada. Hal tersebut tergambar dari pernyataannya bahwa adat istiadat akan tetap dijunjung tinggi di dalam Keraton. Sebagai seorang intelektual lulusan Belanda, Sri Sultan HB IX memahami bahwa perubahan yang akan dilakukannya tidak dapat dipaksakan begitu saja kepada masyarakat. Demokratisasi yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX di Yogyakarta diselenggarakan secara perlahan dari atas ke bawah tanpa menimbulkan kegoncangan di dalam masyarakat. Dengan wibawa yang dimilikinya, Sri Sultan HB IX berhasil meyakinkan kepada rakyat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik yang bisa digunakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat tanpa dirinya harus kehilangan kekuasaannya.

Pemberian kekuasaan kepada rakyat pada dasarnya merupakan strategi untuk mempertahankan eksistensi yang dimiliki oleh Sri Sultan HB IX. Hal tersebut merupakan hasil penafsiran dari tapak politik yang dilakukan Sri Sultan HB IX selama masa hidupnya. Meskipun demikian, keinginan Sri Sultan HB IX tersebut tidak dapat dilepaskan dari nenek moyangnya yang sebenarnya juga rakyat biasa. Dia tidak lain adalah Ki Ageng Pemanahan yang merupakan pendiri Kerajaan Mataram Islam pertama. Selain itu, Sultan Agung dan Sri Sultan HB I juga menjadi inspirasi bagi dirinya berkat kegigihan mereka memperjuangkan kesejahteraan rakyat dari tangan Belanda. Berangkat dari kisah tersebut, Sri Sultan HB IX menyadari bahwa kekuasaan raja yang dimilikinya juga

karena peran rakyat yang memberikan legitimasi penuh kepada raja.

Tapak politik demokratis yang dilakukan oleh Sultan sejatinya juga bisa ditangkap sebagai keinginan kuat dari Keraton untuk senafas dengan nilai-nilai demokrasi supaya eksistensi Keraton adaptatif dengan semangat perubahan zaman.[136] Selain itu, hal tersebut juga bisa dipahami dalam konteks keberpihakan Keraton terhadap rakyat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, serta meningkatkan kualitas hidup rakyat. Berkaca dari hal tersebut, Sri Sultan HB IX secara konsisten juga telah memperkuat kebijakan kakeknya, Sri Sultan HB VII, dengan merawat nilai demokrasi dengan mereformasinya melalui berbagai alternatif yang dimilikinya.[137] Dengan kata lain, Sri Sultan HB IX tetap mengadopsi nilai-nilai yang positif dari budaya Barat dan membuang segala kekurangan dari budaya tersebut. Beberapa nilai positif yang bisa diadopsi yaitu terkait dengan prinsip keadilan, keterbukaan akses bagi rakyat dalam politik, dan menjunjung hak asasi manusia.

Kedemokratisan Sri Sultan HB IX sejatinya merupakan hasil penafsiran atas tapak politik yang dilakukan oleh Sultan yang tercermin pada berbagai kebijakan tertulis yang pernah dikeluarkan oleh dirinya. Lebih jauh, tapak politik kedemokratisan Sri Sultan HB IX juga bisa dicermati mulai dari pidato penobatannya pada tanggal 18 Maret 1940, Amanat 5 September 1945, Amanat 30 Oktober 1945, Amanat Nomor

---

136 Lihat Abdur Rozaki dan Titok Hariyanto (ed.), *Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta,* IRE Press, Yogyakarta, 2003, hal. 5.

137 Lihat Ahmad Sarwono bin Zahir, *op.cit.,* hal. 64.

7 Tahun 1945 tentang Pembentukan DPR-Kelurahan, Amanat Nomor 14 Tahun 1946 tentang Majelis Permusyawaratan Desa, Amanat Nomor 15 Tahun 1946 tentang Pemilihan Pamong Kelurahan, Amanat Nomor 16 Tahun 1946 tentang Susunan Pamong Kelurahan, Amanat Nomor 17 Tahun 1946 tentang Pemilihan DPR Kelurahan, dan lain sebagainya.[138] Meskipun beberapa amanat tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui representasi BP-KNID, setidaknya amanat-amanat yang demokratis tersebut juga merupakan gagasan Sri Sultan HB IX.

Pada tataran yang lebih praktis, tapak politik Sri Sultan HB IX tersebut dibuktikan dengan adanya penegakan konsep demokrasi di Yogyakarta, seperti pemangkasan jalur birokrasi formal dengan cara menghapus peran Pepatih Dalem dan institusi kepatihan, membuka akses masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik, penegakan kesetaraan masyarakat yang ditandai dengan penghapusan gelar bangsawan, dan kuatnya mekanisme *check and balances* melalui institusi perwakilan (DPRD) di tingkat provinsi.[139] Bahkan, periode 1946-1948 menjadi bukti bahwa Sri Sultan HB IX lebih bersikap progresif dan semakin menuju perubahan politik dan sosial ke arah yang lebih demokratis.[140]

Pada sisi yang lain, demokratisasi yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX juga tidak dapat dilepaskan dari strateginya

---

138 Lihat Heru Wahyukismoyo, o*p.cit.*, hal. 31.

139 Lihat Cornelis Lay dkk. dalam Robert Endi Jaweng, Keistimewaan Yogyakarta: Babak Baru yang Menyisakan Sejumlah Catatan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia,* edisi 42, 2013, hal. 117.

140 Selengkapnya lihat John Monfries, *op.cit.,* hal. 198.

untuk mempertahankan Keraton sebagai pusat kekuasaan. Sri Sultan HB IX menyadari bahwa arus demokratisasi di berbagai belahan dunia tidak dapat dibendung, terlebih beberapa negara dengan sistem monarki mulai mengadopsi demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Sebelum kekuasaannya melalui Keraton Yogyakarta didobrak paksa oleh kaum intelektual dan rakyat, maka dengan cerdas Sri Sultan HB IX berhasil muncul sebagai aktor yang menginisiasi demokratisasi di wilayahnya sendiri sehingga posisinya cenderung aman. Meskipun telah dinilai demokratis, Sultan dan Keraton sejatinya masih menganut sistem monarki yang ditandai dengan adanya pergantian kekuasaan melalui hubungan darah (keturunan).

Pada aspek substansial, Sri Sultan HB IX pada dasarnya telah berhasil menampakkan karakter kedemokratisannya. Hal tersebut bisa dilihat ketika Sultan berhasil untuk melestarikan kerajaan dan dinastinya tanpa melakukan kekerasan demi kesetiannya kepada republik.[141] Pada sisi yang lain, sosok Sri Sultan HB IX adalah sosok yang tidak mudah untuk ditafsirkan. Hal tersebut bisa dilihat pada keinginannya untuk mempertahankan kekuasaan tanpa bisa disentuh oleh rakyatnya, meskipun dirinya telah membuat pilihan lebih terbuka, khususnya terkait dengan jabatan seorang kepala daerah. Keadaan tersebut kemudian didorong dengan adanya persepsi publik yang menganggap bahwa Sri Sultan HB IX menentang segala bentuk kekuasaan yang absolut sehingga gagasannya menjadi rancu.

141 *Ibid.*, hal.295.

Sebelum wafat, Sri Sultan HB IX mewariskan kedemokratisannya kepada putranya, Herjuno Darpito, yang kelak akan menjadi Sri Sultan HB X. Empat pesan tersebut yaitu Sri Sultan HB X diminta untuk bisa mengayomi semua orang, meskipun ada yang tidak menyukai dirinya, tidak boleh melanggar peraturan negara, harus lebih berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, serta tidak memiliki ambisi lain kecuali untuk mengabdi kepada rakyat.[142] Keempat pesan tersebut pada dasarnya juga mencerminkan gagasan demokrasi Sri Sultan HB IX dengan poin terakhir menjadi titik tekan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Sultan sudah sepantasnyalah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, hasil penafsiran terhadap tapak politik yang dilakukan Sri Sultan HB IX dengan menggunakan nilai-nilai demokrasi itu berujung pada satu kesimpulan yaitu bahwa Sri Sultan HB IX berhasil tampil menjadi sosok yang demokratis. Meskipun demikian, apabila dirunut dari kebutuhan aksi atau kepentingan yang dimilikinya, demokratisasi yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX tersebut dinilai semu. Hal ini karena demokratisasi semata-mata hanya digunakan untuk mengamankan posisinya sebagai pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Selain itu, citra demokratis yang ada di dalam dirinya juga digunakan untuk menyelamatkan keturunannya (termasuk Keraton) dari gelombang demokratisasi yang tengah diagung-agungkan saat ini. Buktinya, keberhasilan Sri Sultan HB IX tersebut bisa dilihat dari masih eksisnya kekuasaan Keraton di tengah sistem pemerintahan republik saat ini.

---

142 Lihat Parni Hadi dan Nasyith Majidi (ed.), *op.cit.,* hal. 39.

# BAB 4

# REFLEKSI AKHIR: DEMOKRASI SULTAN HANYALAH SIASAT

Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sultan kesembilan yang bertahta di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi salah satu sosok unik apabila dibandingkan dengan sultan-sultan sebelumnya yang pernah dimiliki oleh Yogyakarta. Lahir pada tahun 1912, Dorodjatun (nama kecil Sri Sultan HB IX) ditakdirkan untuk hidup di era kolonialisme — sebuah era ketika wibawa Keraton Jawa (tak terkecuali Keraton Yogyakarta) berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Rencana ayahandanya, Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, untuk menitipkan Dorodjatun ke keluarga Belanda menjadi titik awal terbentuknya gagasan dan karakternya yang pada satu titik punya kesamaan seperti seorang Belanda. Keputusan tersebut dilakukan oleh ayahnya supaya Dorodjatun yang kelak akan menjadi sultan bisa memahami cara hidup orang Belanda, termasuk cara

untuk menghadapinya selama pemerintah kolonial masih memegang kekuasaan. Tujuannya adalah supaya kewibawaan Keraton Yogyakarta tidak jatuh di tangan Belanda.

Dorodjatun tidak hanya dititipkan ke dalam keluarga Belanda, tetapi juga didorong untuk melanjutkan studinya di negeri Belanda dengan mengambil jurusan Indologi, sebuah ilmu ekonomi dan pemerintahan yang nantinya berguna bagi Dorodjatun, terutma mengenai sistem pemerintahan dan birokrasi. Selama berada di Belanda, karakter Dorodjatun mulai terbentuk layaknya seorang Belanda yang berpikiran progresif, modern, dan demokratis. Hal tersebut merupakan akumulasi pengalaman sosial-historis yang dimiliki Dorodjatun selama masa mudanya, tepatnya sebelum ia dinobatkan sebagai raja kesembilan di Keraton Yogyakarta.

Faktor sosial-historis yang mempengaruhi tindakan politik Sri Sultan HB IX pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aspek kognisi dan interaksi yang dilaluinya. Masuknya budaya Barat dan Timur ke dalam karakter kepribadiannya kemudian didorong oleh interaksi yang dilakukan selama masa mudanya. Dari kognisi dan interaksi tersebut kemudian muncul kebutuhan untuk aksi yang secara umum terwujud pada keinginannya untuk mendemokratisasikan Yogyakarta. Hal tersebut bukan tanpa alasan : Dorodjatun telah menyerap banyak pengetahuan tentang demokrasi karena perkembangan konteks global. Pengalaman global menunjukkan bahwa ada kecenderungan runtuhnya kekuasaan monarki yang tergeser dengan adanya ide-ide tentang demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan. Oleh karena itu, kebutuhan

untuk bertindak secara demokratis merupakan upaya untuk melindungi eksistensi kekuasaan yang dimilikinya.

Dua puluh empat tahun adalah waktu yang cukup lama untuk membentuk karakter seseorang. Selama itulah Dorodjatun selalu berurusan dengan orang-orang Belanda hingga terakumulasinya pengalaman sosial-historis yang dimilikinya. Memasuki usianya yang ke dua puluh delapan, Dorodjatun dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Kembali ke dalam Keraton, Sri Sultan HB IX memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang hidup di dalam Keraton, yaitu budaya Jawa. Dapat dikatakan bahwa sosok Sri Sultan HB IX adalah tempat bertemunya kebudayaan Barat (hasil pengalaman menimba ilmu di Eropa) dengan kebudayaan Jawa (setelah dinobatkan sebagai seorang Sultan). Pertemuan inilah yang memunculkan tindakan politik khas pada sosok Sri Sultan HB IX, khususnya terkait dengan tindakan demokratisnya.

Semenjak dinobatkan menjadi raja, Sri Sultan HB IX melakukan berbagai terobosan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang demokratis di Yogyakarta. Komitmen Sri Sultan HB IX untuk melakukan demokratisasi di Yogyakarta tidak terhalangi oleh jabatan yang melekat di dalam dirinya. Artinya, Sri Sultan HB IX tetap melakukan demokratisasi di dalam kapasitasnya sebagai seorang raja dan kepala daerah. Tidak hanya melakukan demokratisasi untuk rakyatnya, Sri Sultan HB IX juga melakukan demokratisasi di dalam lingkungan Keraton. Menariknya, Sri Sultan HB IX juga memulai untuk memunculkan sosoknya sebagai tokoh yang demokratis melalui berbagai sikap dan tindakannya yang

justru jauh dari nilai-nilai feodal. Sri Sultan HB IX berhasil muncul sebagai sosok baru bagi rakyatnya. Dia adalah pemimpin yang selalu hadir di tengah-tengah rakyatnya.

Berangkat dari berbagai kebijakan yang demokratis tersebut, dapat ditarik sebuah penafsiran mengenai tapak politik Sri Sultan HB IX tentang demokrasi. Berdasarkan tapak politik yang dilaluinya, Sri Sultan HB IX pantas disebut sebagai sosok yang demokratis. Refleksi terkait sosoknya yang demokratis tersebut bukan tanpa alasan. Sri Sultan HB IX adalah sosok yang mampu menyelesaikan permasalahan secara damai, melakukan perubahan sosial secara damai di dalam masyarakat yang selalu berubah, melakukan pergantian kekuasaan secara teratur, mengakui keanekaragaman, dan menegakkan keadilan sebagai inti moralitas politik. Kelima nilai-nilai demokrasi tersebut kemudian dimanifestasikan dengan berbagai tindakan politik yang dilakukannya dan kebijakkan yang diprakarsai oleh Sultan.

Hasil dari penafsiran tersebut merujuk pada kesimpulan bahwa Sri Sultan HB IX adalah sosok yang demokratis apabila dikaitkan dengan nilai-nilai demokrasi yang dipaparkan oleh Henry B. Mayo.[143] Hal tersebut menjadi penting mengingat nilai demokrasi yang dimaksud adalah nilai demokrasi substansial sehingga penafsiran terhadap tindakan politiknya tidak hanya berhenti pada aspek prosedural saja, tetapi juga aspek lain yang lebih substantif, seperti kebebasan atau hak asasi manusia (HAM), kesetaraan, adanya pluralisme, toleransi, dan anti-intimidasi (kekerasan). Meskipun

143 Henry B. Mayo dalam Misbahul Huda, *op.cit.*, hal. 30.

demikian, demokratisasi yang dilakukan Sri Sultan HB IX sedikit menimbulkan kontradiksi. Hal tersebut bisa dilihat ketika Sri Sultan HB IX menyebarkan kekuasaan yang dimilikinya tanpa dirinya kehilangan kekuasaan tertingginya sebagai penguasa Yogyakarta sehingga rakyat tidak memiliki keberanian untuk menyentuh kekuasaannya sebagai seorang raja.

Terakhir, Sri Sultan HB IX—merujuk pada tulisan Monfries—adalah sosok yang cerdik secara politis karena telah menggunakan statusnya (sebagai seorang sultan) tidak untuk mendukung perjuangan republik semata, tetapi juga untuk menjamin kelangsungan hidup politiknya sendiri, termasuk untuk melestarikan kerajaannya.[144] Tidak hanya dengan membela republik semata, tetapi Sri Sultan HB IX juga telah melakukan demokratisasi untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan perkembangan zaman yang mana sistem monarki tergeser eksistensinya oleh ide-ide demokrasi. Oleh karena itu, fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari kesimpulan akhir bahwa demokrasi sejatinya bisa digunakan sebagai siasat untuk menjaga eksistensi kekuasaan tradisional yang dimilikinya di tengah arus berkembangnya ide-ide demokrasi.

144 Lihat John Monfries, *op.cit.*, hal. 311.

# Daftar Pustaka

**Buku**

Abdur Rozaki dan Titok Hariyanto (ed.). 2003. *Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta*, Yogyakarta: IRE Press.

Achmad, Sri Wintala. 2013. *Falsafah Kepemimpinan Jawa: Soeharto, Sri Sultan HB IX, dan Jokowi*. Yogyakarta: Araska.

Ahmad Adaby Darban dkk. 1998. *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwana IX*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Anderson, Benedict. 1972. *Java in a time of revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Ithaca, N.Y: Cornell University Press.

Artha, Arwan Tuti. 2009. *Laku Spiritual Sultan Langkah Raja Jawa Menuju Istana*. Yogyakarta: Galang Press.

Atmakusumah (ed.). 2011. *Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bin Zahir, Ahmad Sarwono. 2015. *Sabda Raja HB X Dalam Timbangan Revolusi Karakter Istimewa*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Dahl, Robert. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Darmawan, Adhi. 2010. *Jogja Bergolak Diskursus Keistimewaan DIY Dalam Ruang Publik*. Yogyakarta: Kepel Press.

Dwiyanto, Djoko. 2009. *Puro Pakualaman: Sejarah, Kontribusi, dan Nilai Kejuangannya*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia.

Harjono, Susilo. 2012. *Kronik Suksesi Kraton Jawa 1755-1989*. Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM.

Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo. 2010. *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya: Merunut Sejarah, Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo. 2011. *Wasiat HB IX: Yogyakarta Kota Republik*. Yogyakarta: Galang Press.

Haryanto, Sindung. 2014. *Edelweiss Van Jogja: Pengabdian Abdidalem Kraton Yogyakarta dalam Perspektif Sosio-Fenomenologi*. Yogyakarta: Kepel Press.

Julius Pour dan Nur Adji (ed.) 2012. *Sepanjang Hayat Bersama Rakyat: 100 Tahun Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

Markoff, John. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Masdar, Umaruddin. 1999.*Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moedjanto. 1994.*Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman: Tinjauan Historis Dua Praja Kejawen Antara 1755-1992*. Yogyakarta: Kanisius.

Moedjanto. 2014. *Sukarno, Hatta, dan Hamengkubuwono IX*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Monfries, John. 2015. *A Prince in a Republic: The Life of Sultan Hamengku Buwono IX of Yogyakarta*. Singapore: ISEAS.

Mulder, Niels. 2007. *Di Jawa: Petualangan Seorang Antropolog*. Yogyakarta: Kanisius.

Mulyana (ed.). 2005. *Demokrasi Dalam Budaya Lokal*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Parni Hadi dan Nasyith Majidi (ed.). 2012. *Hamengku Buwono IX: Inspiring Prophetic Leader*, Jakarta: IRSI.

Poerwokoesoemo, Soedarisman. 1984. *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Presentasi Majalah Tempo. 1988. *Sri Sultan Hari-hari Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Purwadi. 2006. *Sejarah Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX*. Yogyakarta: Hanan Pustaka.

Ratmanto, Aan. 2012. *Mengawal Transisi Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Pemerintahan Transisi Republik Indonesia di Yogyakarta 1949*. Yogyakarta: Atap Buku dan Mata Padi Presindo.

Sabdacarakatama. 2009. *Sejarah Kraton Yogyakarta*. Yogyakarta: NARASI.

Sahid, Komarudin. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Salim, M.Nazir. 2014. *Membayangkan Demokrasi Menghadirkan Pesta: Pemilihan Umum Yogyakarta 1951*. Yogyakarta: Ombak.

Soekamto, R.Eddy. 2009. *Yogyakarta Ibukota Perjuangan*. Yogyakarta: NARASI.

Soemardjan, Selo. 1962. *Social Changes in Jogjakarta.* Ithaca, New York, Cornell University Press.

-------------. 2009. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Komunitas Bambu.

Soni, Aloysius. 2011. *"Monarki Yogya" Inkonstitusional?*. Jakarta: Kompas.

Suprapto, Bibit. 1985. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

Tino. 2010. *Hamengkubuwono IX: Dari Serangan Umum 1 Maret sampai Melawan Soeharto, Benarkah Hamengkubuwono IX Anggota CIA?.* Yogyakarta: Navila Idea.

Wahyukismoyo, Heru. 2008. *Merajut Kembali Pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono IX: Sebuah Kumpulan*

*Pemikiran dan Polemik Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Dharmakaryadhika Publisher.

Wirodono, Sunardian. 1989. *Sri Sultan Hamengku Buwono IX: Penjaga Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Wiwara.

Yuniyanto, Tri. 2010. *Daulat Raja Menuju Daulat Rakyat: Demokratisasi Pemerintahan di Yogyakarta*. Solo: CakraBooks.

**Jurnal**

Dermawan, Andy. 2013. "Dialektika Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan Sosiologi Pengetahuan", dalam *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 7, No. 2, hal. 247-261.

Faishal, Muhammad. 2007. "Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Sebuah Pencarian Teoritik", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 1, hal. 1-30.

Jaweng, Robert Endi. 2013. "Keistimewaan Yogyakarta: Babak Baru yang Menyisakan Sejumlah Catatan", Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia, Edisi 42, pp.105-119.

Kurniadi, Bayu Dardias. 2009. Yogyakarta in Decentralized Indonesia: Integrating Traditional Institutions in Democratic Transitions, *Jurnal Ilmu Sosial dan llmu Politik,* Vol.13, No.2, pp.190-203.

Meyer, Thomas. 2012. "Demokrasi Sosial dan Libertarian: Dua Model yang Bersaing dalam Mengisi Kerangka Demokrasi Liberal", Jakarta: FES. Diakses melalui http://

library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/09834.pdf pada hari Rabu 25 Juni 2014.

Raharja dkk, 2014. "Pengaruh Sri Sultan Hamengku Buwono I pada Seni Karawitan Kraton Yogyakarta", dalam *Jurnal Resital*, Vol. 15, No. 1, hal. 43-51.

Rogaiyah dan Alfitri. 2009. "Demokrasi Indonesia: Mewujudkan Kesetaraan atau Melahirkan Kesenjangan", dalam *Jurnal PPKn & Hukum*, Vol. 4, No. 1, hal. 1-12. Diakses melalui http://eprints.unsri.ac.id/725/2/Demokrasi_Indo-nesia%253BMewujudkan_Kesetaraan_atau_M-elahirkan_Kesenjangan.pdf pada hari Rabu 25 Juni 2014.

Taranggono, Eko. 2002. "Islam dan Demokrasi Upaya Mencari Titik Temu", dalam *Jurnal Al-Afkar*, Edisi VI, Tahun ke-5, hal. 1-8.

Thalhah, 2009, "Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen", dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3, hal. 413-422. Diakses melalui http://law.uii.ac.id/images/-stories/Jurnal%20 Hukum/3%20HM.%20-Thalhah.pdf pada hari Selasa 10 Juni 2014.

Wardani, Laksmi Kusuma. 2012. "Pengaruh Pandangan Sosio-Kultural Sultan Hamengkubuwana IX Terhadap Eksistensi Kraton Yogyakarta", dalam *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Vol. 25, No. 1, hal. 56-63.

Widodo, Ismu Gunadi, 2011, "Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4)

UUD 1945", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 2, hal. 316-334.

**Skripsi, Disertasi, dan Surat Kabar**

Baehaki, Achmad. 2007. Inkonsistensi Anwar Sadat Tentang Demokrasi, Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Diakses melalui http://repository.uin-jkt.ac.id/dspace/-bitstream/123456789/8494/1/ACHMAD%20-BAEHAKI-FUF.pdf pada hari Selasa 10 Juni 2014.

Helmy, Muhammad Irfan. 2014. Pemaknaan Hadis-hadis Mukhtalif Menurut Asy-Syafii: Tinjauan Sosiologi Pengetahuan, Yogyakarta: Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Huda, Misbahul. 2009. Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Demokrasi, Semarang: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Diakses melalui http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/97/jtptiain-gdl-misbahulhu-4817-1-skripsi_-6.pdf pada hari Selasa 10 Juni 2014.

Program televisi MEMOAR dengan judul Tahta Untuk Republik oleh Kompas TV yang disiarkan pada 12 Juli 2014.

Putra, Arie. 2012. Pemikiran Islam Ahmad Syafii Maarif: Dari Etika Al-Quran Menuju Masyarakat Demokratis, Jakarta: Skripsi Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia.

Riyanto, Achmad. 2010. Konsep Demokrasi di Indonesia Dalam Pemikiran Akbar Tandjung dan A.Muhaimin

Iskandar, Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Tribun Jogja edisi 27 Juni 2015, *Monumen Bagi Para Pejuang: Masjid Kraton Soko Tunggal*, rubrik Ramadhan Mubarak 1436 H.

Tempo, edisi 17-23 Agustus 2015, *Hamengku Buwono IX: Pengorbanan Sang Pembela Republik*, Jakarta.

**Artikel dan Website**

Artikel Arif Budi Prasetya. 2014. *Semiotik: Simbol, Tanda, dan Konstruksi Makna*, diakses melalui http://arifbudi.lecture.ub.ac.id/2014/03/semiotik-simbol-tanda-dan-konstruksi-makna/ pada hari Senin 12 Oktober 2015.

Artikel Manap Soham. *Proses Demokrasi yang Berliku di Negeri Gajah Putih (Studi Kasus Negara Thailand)*, diakses melalui http://www.academia.edu/8032774-/PROSES_DEMOKRASI_YANG_BERLIKU_DI_NEGERI_GAJAH_PUTIH_STUDI_KASUS_NEGARA_THAILAND_ pada hari Rabu 16 September 2015.

Artikel Paul M. Handley. *Monarki Thailand Halangi Demokrasi*, diakses melalui http://www.dw.com-/id/monarki-thailand-halangi-demokrasi/a-16558400 pada hari Rabu 16 September 2015.

Website Jurnal Malaysia, *Sejarah Sistem Demokrasi Berpalimen Malaysia*, diakses melalui http://www.jurnalmalaysia.com/?p=1624 pada hari Kamis 17 September 2015.

Website tourism Thailand, *Tentang Thailand: Politik*, diakses melalui http://id.tourism-thailand.org/Thailand/politics pada hari Rabu 16 September 2015.

**Wawancara dan Diskusi**

Diskusi dan peluncuran buku A Prince in a Republic oleh Dr. John Monfries, pada 13 April 2015 di Universitas Sanata Dharma.

Wawancara dengan Aldino Deanasa, salah satu keturunan atau trah dari Sri Sultan Hamengku Buwono II pada hari Kamis 11 Juni 2015.

# Lampiran-Lampiran

# AMANAT SRI PADUKA INGKENG SINUWUN KANGDJENG SULTAN

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan:

1. Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.

Ngajogjakarta Hadiningrat,
28 Puasa Ehe 1876 atau 5-9-1945

**HAMENGKU BUWONO IX**

# PIDATO PENOBATAN SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX

Dat de taak die op mij rust, moeilijik en zwaar is, daar ben ik mij tenvolle vam bewust, vooral waar het hier gaat de Westerse en de Oosterse geest tot elkaar te brengen, deze beide tot een harmonische samenwerking te doen overgaan zonder de laatste haar karakter doen verliezen. Al heb ik een uitgesproken Westerse opvoeding gehad, toch benen bliif ik in de allereerste plaats Javaan.Zo zal de adat, zo deze niet remmend werkt op de ontwikkeling, en voorname plaats blijven innemen in de traditierijke Kraton.

Mofe ik eindigen met de belofte dat ik de belangen van Land en Volk zal behartigen naar mijn beste weten en kunnen.

(Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, tetapi pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Maka selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap

menduduki tempat yang utama dalam Kraton yang kaya akan tradisi ini.

Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya.)

# MAKLUMAT NO. 18 TENTANG DEWAN-DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DI DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA (KASULTANAN DAN PAKUALAMAN)

*Mengingat* putusan-putusan sidang pleno Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta pada tanggal 24-4-1946 jang menetapkan antara lain, supaja Badan Pekerdja mewudjudkan putusan-putusan tentang bentuk Dewan-dewan perwakilan di Daerah Istimewa Jogjakarta didalam satu maklumat.

*Mengingat pula,* bahwa masih akan ada Undang-undang jang mengatur susunan pemerintahan buat daerah-daerah jang bersifat istimewa ialah jang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18.

**Maka** sambil menanti Undang-undang tesebut kami berdua Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Arja Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, *dengan persetudjuan Badan Pekerdja Dewan Daerah Jogjakarta,* mengadakan **peraturan tentang**

**djalanja kekuasaan mengatur dan memerintah (legeslatif dan executif) dalam daerah Kami berdua** seperti berikut:

**I**

Didalam daerah Istimewa Jogjakarta diadakan Dewan Perwakilan Rakjat:

a. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Jogjakarta, disingkat Dewan Daerah, buat seluruh daerah Jogjakarta, berkedudukan di Ibu Kota Jogjakarta.
b. Dewan Perwakilan Rakjat Jogjakarta kota, disingkat Dewan Kota, buat Ibu Kota Jogjakarta.
c. Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten, disingkat Dewan Kabupaten, buat tiap-tiap Kabupaten, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
d. Dewan Perwakilan Rakjat Kalurahan, disingkat Dewan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Maklumat No. 7, 14, dan 17.

**II**

Tiap-tiap Dewan Perwakilan bersama-sama dengan Kepala Daerah masing-masing membuat peraturan-peraturan Daerah masing-masing, jang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah jang lebih luas daripada daerahnja masing-masing jaitu:

a. Dewan Daerah dengan Seri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan dan Seri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Arjo Paku Alam.

b. Dewan Kota dengan Bupati Kota Kasultanan dan Bupati Kota Paku Alaman.
c. Dewan Kabupaten dengan Bupati Pamong Pradja.

**III**

Oleh dan dari Dewan Daerah dibentuk Badan Pekerdja jang sehari-hari melaksanakan pekerdjaan legislatif.

**IV**

1. Oleh dan dari Dewan Perwakilan dibentuk Dewan Pemerintah (badan executief) terdiri dari beberapa orang anggauta, jang bersama-sama dengan dan diketuai oleh Kepala-kepala Daerah tersebut dalam pasal II sub. a, b dan c, mendjalankan pemerintahan sehari-hari.
2. Dewan Pemerintahan baik seluruhnja, maupun seorang-seorang bertanggung djawab kepada Dewan Perwakilan jang bersangkutan.
3. Kedua Seri Paduka tersebut **bebas** dari tanggung djawab.

**V**

Semua putusan dalam sidang Dewan-dewan Perwakilan dan dalam sidang-sidang Dewan Pemerintah diambil dengan suara jang terbanjak.

Di dalam hal ini kedua Kepala Kota tersebut dalam pasal II sub. b, bersama-sama, hanja mempunjai satu suara.

**VI**

1. Di Kapanewon tidak diadakan Dewan Perwakilan Rakjat hanja diadakan Dewan Pemerintahan terdiri dari beberapa

anggauta jang bersama-sama dengan dan diketuai oleh Panewu mendjalankan pemerintahan sehari-hari.

2. Anggauta Dewan Pemerintahan Kapanewon dipilih oleh rapat gabungan Ketua dan wakil Ketua Dewan-dewan Kalurahan dilingkungan Kapanewon jang bersangkutan.
3. Dewan Pemerintah Kapanewon baik seluruhnja maupun seorang-seorang bertanggung djawab kepada rapat gabungan Ketua dan wakil Ketua Dewan-dewan Kalurahan dalam lingkungan Kapanewon jang bersangkutan.

**VII**

Dengan terbentuknja Dewan-dewan Perwakilan, seluruh susunan Komite Nasional Indonesia didaerah Jogjakarta dihapuskan dan pekerdjaannja jang selaras dengan pekerdjaan Dewan Perwakilan dilandjutkan oleh Dewan Perwakilan jang bersangkutan.

**VIII**

Maklumat ini berlaku sedjak diumumkan.

Jogjakarta, 11 Djumadilakir Djimawal 1877

atau 18 Mei 1946

**HAMENGKU BUWONO IX**

**PAKUALAM VIII**

**MARLAN**

# AMANAT SRI PADUKA INGKENG SINUWUN KANGDJENG SULTAN HAMENGKU BUWONO IX DAN SRI PADUKA KANGDJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM VIII, KEPALA DAERAH ISTIMEWA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat:

1. Dasar-dasar jang diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ialah kedaulatan rakjat dan keadilan sosial.
2. Amanat Kami berdua pada tgl.28 Puasa, Ehe 1876 atau 5-9-1945.
3. Bahwa kekuasaan-kekuasaan jang dahulu dipegang oleh Pemerintah djadjahan (dalam djaman Belanda didjalankan oleh Gubernur dengan kantornja) telah

direbut oleh rakjat dan diserahkan kembali kepada Kami berdua.

4. Bahwa Paduka Tuan Komissaris Tinggi pada tanggal 22-10-1945 di Kepatihan Jogjakarta dihadapan Kami berdua dengan disaksikan oleh para Pembesar dan para Pemimpin telah menjatakan tidak perlunja akan adanja Sub-comissariat dalam Daerah Kami berdua.
5. Bahwa pada tanggal 29-10-1945 oleh Komite National Daerah Jogjakarta telah dibentuk suatu Badan Pekerdja jang dipilih dari antara anggauta-anggautanja, atas kehendak rakyak dan panggilan masa, jang diserahi untuk mendjadi Badan Legislatif (Badan Pembikin Undang-undang) serta turut menentukan djalannja Pemerintah Daerah dan bertanggung djawab kepada Komite National Daerah Jogjakarta, maka Kami Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Badan Pekerdja Komite Nasional Daerah Jogjakarta, dengan ini mejatakan: Supaja djalanja Pemerintahan dalam Daerah Kami berdua dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Badan Pekerdja tersebut adalah suatu Badan Legeslatif (Badan Pembikin Undang-undang) jang dapat dianggap sebagai wakil rakjat dalam Daerah Kami berdua untuk membikin undang-undang dan menentukan haluan djalanja Pemerintahan dalam Daerah Kami berdua jang sesuai dengan kehendak rakjat. Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dari

segala bangsa dalam Daerah Kami berdua mengindahkan Amanant kami ini.

Jogjakarta, 24 Dulkaidah, Ehe 1876
atau 30 Oktober 1945

# MAKLUMAT NO. 7 NEGERI KASULTANAN JOGJAKARTA DAN PRADJA PAKU ALAMAN DAERAH ISTIMEWA NEGERI REPUBLIK INDONESIA

**Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Kalurahan**

1. Mengingat hasrat rakjat didalam daerah Kami berdua untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakjat di Kalurahan-kalurahan sebagai pendjelmaan dari azas kedaulatan-rakjat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka Kami berdua Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Arja Paku Alam VIII sebagai kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat Daerah Istimewa Jogjakarta, memerintahkan supaja ditiap-tiap Kalurahan dalam daerah Kami berdua dibentuk Dewan Perwakilan Rakjat Kalurahan.

2. Dewan Perwaklan Rakjat Kalurahan (selandjutnja disebut Dewan Kalurahan) ini mewakili terus seluruh rakjat didalam daerah perwakilannja untuk membitjarakan rumah-tangga daerah perwakilan itu dan membikin aturan-aturannja.
3. Anggauta Dewan Kalurahan dipilih oleh Warganegara, baik laki-laki maupun perempuan jang telah berumur 18 tahun keatas, jang sehat pikirannja dan jang sudah 6 bulan mendjadi penduduk daerah-perwakilannja.
4. Jang berhak dipilih djadi anggauta Dewan kalurahan ialah Warganegara jang berumur 20 tahun keatas, sehat pikirannja, baik laki-laki maupun perempuan dan sudah 6 bulan mendjadi penduduk daerah perwakilan itu.
5. Banjaknja anggauta Dewan Kalurahan menurut sedikit-banjaknya djiwa orang di Kalurahan. Djumlah anggauta Dewan Kalurahan paling sedikit 10 orang dan paling banjak 30 orang untuk tiap Dewan Kalurahan dengan mengambil dasar tiap 100 djiwa diwakili oleh seorang anggauta.
6. Keputusan Dewan Kalurahan diserahkan kepada Pemerintah Kalurahan untuk didjalankan.
7. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kalurahan dipilih oleh dan dari antara anggauta-anggautanja.
8. Sidang Dewan Kalurahan diakui sjah djika dikundjungi oleh lebih dari separoh dari banjaknja anggauta.
9. Dewan Kalurahan dipilih buat tiga tahun lamanja sedang anggauta lama boleh dipilih lagi.

10. Pemilihan anggauta Dewan Kalurahan harus didjalankan dengan tjara teratur dan adil jang akan ditetapkan dalam aturan chusus tentang pemilihan.
11. Anggauta berhenti oleh karena:
    a. Meninggal dunia
    b. Pindah dan keluar daerah perwakilan
    c. Mengundurkan diri
    d. Dipetjat oleh rapat
12. Dewan Kalurahan dapat diganti apabila tidak disetujui oleh sedikitnja 2/3 djumlah Warganegara dalam daerah perwakilan jang dimaksud dalam pasal 3.
13. Dewan Kalurahan dibiajai oleh Kas Desa.

**ATURAN PERALIHAN**

*1. Sesudah terbentuknja Dewan Kalurahan ini, Komite Nasional di Kalurahan harus bubar.

**ATURAN TAMBAHAN**

*1. Aturan tentang Dewan Perwakilan Rakjat lain-lainnja akan segera menjusul.

*2. Maklumat ini mulai berlaku semendjak diumumkan.

Jogjakarta, 1 Sura Djimawal 1877
atau 6-12-1945

**HAMENGKU BUWONO IX.**
**PAKU ALAMAN VII**
**MOH.SALEH.**

# MAKLUMAT NO. 14 DAERAH ISTIMEWA REPUBLIK INDONESIA JOGJAKARTA (KASULTANAN DAN PAKUALAMAN)

**Tentang Dewan Perwakilan Rakjat Kalurahan dan Madjelis Permusjawaratan Desa**

Mengingat bahwa pada waktu ini ditiap-tiap Kalurahan ada 3 badan ialah Rapat Desa, Rukun Desa (dahulu Rapat Aza) dan Dewan Perwakilan Rakjat (selandjutnja disebut Dewan Kalurahan) dan untuk badan-badan itu masih perlu diadakan aturan-aturan, sehingga djalannja Pemerintahan di Kalurahan-kalurahan dapat teratur dan menudju kearah kesempurnaan, maka Kami berdua, Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Arja Paku Alam VII Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat Daerah Istimewa Jogjakarta, mengadakan aturan-aturan untuk itu seperti dibawah ini:

**Pasal 1.**

Dengan dibentuknja Dewan Kalurahan, maka:

a. Rapat Desa dihapuskan dan semua hak, kewadjiban dan pekerdjaannja djatuh pada Dewan Kalurahan
b. Rukun Desa dan Rukun Tetangga (Azad an Tonarikumi diluar kota) dihapuskan seluruhnja sedang semua pekerdjaannja dikerdjakan oleh Lurah Desa beserta prabot-prabot desa dan pembantunja, ketjuali djika ada hal-hal jang diurus menurut ketetapan lain.

**Pasal 2.**

Dewan Kalurahan membuat aturan-aturan tentang rumah-tangga daerahnja asal tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintahan daerah jang lebih luas dari padanja.

**Pasal 3.**

Sebelum bentuk dan pekerdjaan Dewan Kalurahan sempurna adanja, dibentuk pula Madjelis Permusjawaratan Desa (selandjutnja disebut Madjelis Desa).

**Pasal 4.**

Majelis Desa terdiri dari semua kepala somah warganegara jang berumur 18 tahun keatas dan jang sedikitnja sudah 6 bulan bertempat tinggal di Desa itu, ditambah dengan anggauta-anggauta Dewan Kalurahan dan Pamong Kalurahan.

**Pasal 5.**

1. Madjelis Desa mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 bulan atau setiap waktu djikalau dipandang perlu oleh Dewan Kalurahan dan/ atau Pamong Kalurahan.
2. Rapat Madjelis Desa memilih seorang Ketua dan seorang Panitera buat setahun lamanja.
3. Ketua dan Wakil Ketua Madjelis Desa tidak boleh merangkap djabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kalurahan atau Lurah Desa.

**Pasal 6.**

Kewadjiban Madjelis Desa ialah:

1. Mendorong Dewan Kalurahan kearah perwakilan jang sempurna.
2. Mengamat-amati peraturan dan pekerdjaan Dewan Kalurahan, agar kesemuanja tidak bertentangan dengan kepentingan umum didesa ataupun tidak melalui batas pasal 2.
3. Mengabsjahkan rantjangan anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran jang dibuat oleh Dewan Kalurahan.
4. Mengabsjahkan peraturan-peraturan tentang hak tanah jang dibuat oleh Dewan Kalurahan dan mengabsjahkan putusan Dewan Kalurahan tentang perselisihan tanah.

**Pasal 7.**

Agar ada persaudaraan (koordinasi) antara Dewan-dewan Kalurahan itu didalam mendjalankan kewadjibannya masing-masing, maka Badan Eksekutip Kapanewon (sementara

KNI Kapanewon bersama-sama Panewu P.P) berkewadjiban mengawasi pekerdjaan Dewan-Dewan Kalurahan didalam daerahnja.

**Pasal 8.**

Segala perselisihan antara Dewan Kalurahan dengan Pamong Kalurahan diselesaikan oleh Madjelis Desanja. Djika putusan ini belum memuaskan maka perselisihan itu akan diselesaikan oleh Dewan Kabupaten (sementara Badan Pekerdja KNI Kabupaten) bersama-sama dengan Bupati dengan perantaraan dan pertimbangan Badan Eksekutip Kapanewon (sementara KNI Kapanewon bersama-sama dengan Panewu P.P) jang bersangkutan.

**Pasal 9.**

Maklumat ini mulai berlaku semendjak diumumkan.

Ngajogjakarta, 9 Bakdo Mulud Djimawal 1877

atau, 11-4-1946

**HAMENGKU BUWONO IX**

**PAKU ALAM VIII**

**MOH SALEH.**

# MAKLUMAT NO.15
# DAERAH ISTIMEWA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JOGJAKARTA (KASULTANAN DAN PAKUALAMAN)

**Tentang Pemilihan Pamong Kalurahan**

Agar supaja azas kerakjatan dalam daerah Kami berdua, terutama di Kalurahan-Kalurahan (Desa-desa) jang djadi sendi kekuatan Negara dapat lebih sempurna didjalankan, maka Kami berdua Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Arja Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta, mengadakan aturan tentang pemilihan Pamong Kalurahan seperti dibawah ini:

**Pasal 1**

1. Jang berhak memilih Lurah Desa dan Prabot-prabot Desa (Pamong Kalurahan) ialah segenap Kepala Somah warganegara baik laki-laki maupun perempuan berumur 18 tahun keatas, sehat fikirannja, dan telah 6 bulan djadji penduduk Kalurahan itu.
2. Pemilihan dapat berlangsung djika jang hadlir lebih dari separo dan segala keputusan diambil dengan suara terbanjak.

**Pasal 2**

1. Pemilihan didjalankan setjara langsung oleh Kumisi Pemilihan jang terdiri dari Badan Executif Kapanewon (sementara K.N.I. Kapanewon bersama-sama dengan Panewu PP) dibawah pimpinan Bupati jang bersangkutan atau wakilnja.
2. Lurah dan Prabot desa jang telah dipilih, selandjutnja ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

1. Jang dipilih djadji Pamong Kalurahan ialah warganegara lelaki, telah berumur 20 tahun keatas, sehat fikirannja, baik budi pekertinja, dapat membatja dan menulis huruf latin dan telah enam bulan djadji penduduk Kalurahan itu.
2. Pamong Kalurahan dipilih untuk 3 tahun lamanja, dan sesudah itu dapat dipilih lagi.

**Pasal 4**

Pembantu-pembantu Pamong Kalurahan dipilih, ditetapkan dan diperhentikan oleh rapat Dewan Kalurahan dan pamong Kalurahan menurut suara jang terbanjak.

**Pasal 5**

Segala peraturan pemilihan Pamong Kalurahan jang telah ada jang bertentangan dengan Maklumat ini, dibatalkan, tetapi pemilihan Pamong Kalurahan sebelumnja ada Maklumat ini, tetap berlaku.

**Pasal 6**

Maklumat ini berlaku semendjak diumumkan.

Jogjakarta, 9 Bakdo Mulud Djimawal 1877

atau 11-4-1946

**HAMENGKU BUWONO IX**

**PAKU ALAM VIII**

**MOH.SALEH.**

# MAKLUMAT NO.16
# DAERAH ISTIMEWA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JOGJAKARTA (KASULTANAN DAN PAKUALAMAN)

**Tentang Susunan Pamong Kalurahan**

Untuk menyempurnakan djalannja pemerintahan Kalurahan dalam daerah Kami berdua, dan supaya azas kerakjatan dapat didjalankan dengan penuh tanggung-djawab maka Kami berdua, Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Arjo Paku Alam VIII Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta, mengadakan aturan-aturan seperti dibawah ini.

**Pasal 1.**

Pamong Kalurahan terdiri dari seorang Lurah, seorang Kamitua, seorang Tjarik dan 3 orang Prabot Desa lainnja.

**Pasal 2.**

1. Pamong Kalurahan adalah Badan Executif, mengerdjakan putusan-putusan Dewan Kalurahan dan semua urusan rumah-tangga Kalurahan.
2. Pamong Kalurahan bertanggung-djawab sepenuhnja kepada Dewan Kalurahan.

**Pasal 3.**

1. Pamong Kalurahan harus mengadakan pembagian pekerdjaan antara anggauta-anggautanya, jang masing-masing harus bertanggung-djawab sepenuhnja tentang pekerjdaannja untuk seluruh daerah Kalurahan kepada Lurah Desa sebagai Ketua Pamong Kalurahan dan Kepala Daerah Kalurahan.
2. Pamong Kalurahan tidak boleh mendjadi anggauta Dewan Kalurahan.
3. Lurah Desa tidak boleh merangkap djabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Madjelis Desa.

**Pasal 4.**

Pekerdjaan pemerintahan Kalurahan, dibagi sebagai berikut:

1. Bagian sosial diketuai oleh Kamitua merangkap sebagai Wakil Lurah Desa.
2. Bagian Kemakmuran diketuai oleh Ulu-ulu.
3. Bagian Keamanan diketuai oleh Djogobojo.
4. Bagian Agama diketuai oleh Kaum.

5. Bagian administrasi dan lain-lain pekerdjaan jang tidak termasuk dalam bagian-bagian tersebut diatas, dikerdjakan oleh Tjarik Desa.

**Pasal 5.**

Untuk melaksanakan pekerdjaan tersebut dalam pasal 4, Pemerintah Kalurahan boleh mengangkat beberapa orang Pembantu Pamong Kalurahan, seperti jang tertera dalam Maklumat no.15 pasal 4. Petundjuk Djawatan Pradja no.20/ D.P. '46.

**Pasal 6.**

1. Pamong Kalurahan dan pembantu-pembantunja diberi lungguh.
2. Banjaknja lungguh untuk masing-masing ditetapkan oleh Dewan Kalurahan, jang harus disahkan oleh Madjelis Desa.

**Pasal 7.**

1. Tiap Kalurahan harus dapat mentjukupi kebutuhannja sendiri.
2. Djika ternjata ada Kalurahan tak dapat mentjukupi kebutuhannja sendiri, maka harus digabungkan dengan Kalurahan lain.
3. Atas kehendak rakjat dapat diadakan gabungan beberapa Kalurahan, walaupun masing-masing telah dapat mentjukupi kebutuhannja sendiri-sendiri.
4. Tentang pasal ini akan diadakan aturan chusus.

**Pasal 8.**

Maklumat ini berlaku semendjak diumumkan.

Jogjakarta, 9 Bakdo Mulud Djimawal 1877

atau 11-4-1946

**HAMENGKU BUWONO IX**

**PAKU ALAM VIII**

**MOH.SALEH.**

# MAKLUMAT NO.17
# DAERAH ISTIMEWA
# NEGARA REPUBLIK INDONESIA
# (KASULTANAN DAN PAKUALAMAN)

# JOGJAKARTA PEROBAHAN
# MAKLUMAT NO.7

**Tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Kalurahan**

Untuk menjesuaikan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Kalurahan (selandjutnja disebut Dewan Kalurahan) dengan pemilihan Pamong Kalurahan menurut Maklumat No.15 Pasal 1, pula mengingat akan sukarnja mengumpulkan segenap atau sebagian besar dari pada warganegara jang mempunjai hak memilih dalam suatu Kalurahan menurut Maklumat No.7 pasal 3, maka Kami berdua Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Arjo Paku Alam VIII

Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta, memutuskan, merobah beberapa pasal dalam Mufakat No.7 seperti dibawah ini:

**Pasal 1.**

Pasal 3 selandjutnja berbunji sebagai berikut:

1. Anggauta Dewan Kalurahan dipilih oleh Kepala Somah Warganegara, baikpun laki-laki maupun perempuan, jang telah berumur 18 tahun keatas, jang fikirannja dan jang sudah enam bulan mendjadji penduduk daerah perwakilannja.
2. Pemilihan dapat berlangsung, djika jang hadlir lebih dari separo dan segala keputusan diambil dengan suara terbanjak.

**Pasal 2.**

Pasal 4 selandjutnja berbunji sebagai berikut:

Jang berhak dipilih djadi anggauta Dewan Kalurahan ialah Warganegara jang berumur 20 tahun keatas, baik budi pekertinja, sehat fikirannja, baik laki-laki maupun perempuan dan sudah enam bulan mendjadi penduduk daerah perwakilan itu.

**Pasal 3.**

Dewan Kalurahan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta jang telah dipilih sebelum berlakunja Maklumat in dianggap absjah.

**Pasal 4.**

Maklumat ini berlaku semendjak diumumkan.

Ngajogjakarta, 9 Bakdo Mulud Djimawal 1877

Atau 11-4-1946

**HAMENGKU BUWONO IX**

**PAKU ALAM VIII**

**MOH. SALEH**

# Indeks

**L**



**M**



**N**



**P**

**R**



**S**

**T**



**U**

## V



## W

# TENTANG PENULIS



**Bastian Widyatama**, lahir di Yogyakarta pada 16 Maret 1993. Semenjak menamatkan pendidikan di SMAN 2 Yogyakarta pada 2011, dia melanjutkan studinya di Jurusan Politik Pemerintahan UGM. Selama kuliah, dia berhasil mendapatkan beasiswa Tanoto Foundation pada tahun 2011-2015. Pada 2014, Bastian menjadi juara favorit tingkat nasional pada lomba kepenulisan dengan judul *Menghadirkan Kembali Karakteristik Kepemimpinan Profetik Ala Sri Sultan Hamengku Buwono IX*. Selain itu, dia juga pernah mengikuti pertukaran mahasiswa ke Thailand dan mempresentasikan hasil penelitiannya tentang Gerakan Warga Berdaya di Tokyo University pada tahun 2014. Pria yang terpilih menjadi Wakil 1 Dimas Kota Jogja 2015 juga pernah aktif sebagai asisten peneliti di YouSure dan PolGov Fisipol UGM. Beberapa penelitian yang pernah dilakukannya yaitu *Dinamika Pemilih Pemula: Persoalan, Peluang, dan Tantangan (2013), There is Still Another Alternative: Youth, Transition, and The Dynamics of Creative Entrepreneurship in Yogyakarta, Bandung, and Bali*

*(2014)*, dan *Kajian Kelembagaan Penguatan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (2016).* Dia juga aktif sebagai penulis lepas di Badan Penerbit dan Publikasi (BPP) Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan S2 jurusan Public Policy and Leadership di Park Chung Hee School of Policy and Saemaul, Yeungnam University, Korea Selatan. Penulis bisa dihubungi di bastianwidyatama@gmail.com.